Manajemen Strategi dan Sistem Organisasi

Nahdlatul Ulama

dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dr. H. Mohammad Khusnu Milad, S.T., M.MT.

UINSA Press

SATU ABAD NU
1344 - 1444 H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

MANAJEMEN STRATEGI DAN SISTEM ORGANISASI

Nahdlatul Ulama

dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dr. H. Mohammad Khusnu Milad, S.T., M.MT.
Prof. Dr. Pribadiyono, M.S.
Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., C.A.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dal am Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. H. Mohammad Khusnu Milad, S.T., M.MT.
Prof. Dr. Pribadiyono, M.S.
Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., C.A.

MANAJEMEN STRATEGI DAN SISTEM ORGANISASI

Nahdlatul Ulama

dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

UINSA Press

MANAJEMEN STRATEGI DAN SISTEM ORGANISASI

Nahdlatul Ulama

dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh The UINSA Press

ISBN: 978-602-332-184-1
xii + 254 hal; 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, Juni 2024

***Copyright* © 2024 The UINSA Press**

Penulis : Mohammad Khusnu Milad
Pribadiyono
Ikhsan Budi Riharjo

Penyunting : Muhammad Andik Izzuddin
Achmad Teguh Wibowo
Desain Sampul : Ucup
Layouter : Ucup

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Dirterbitkan oleh:

The UINSA Press
Anggota IKAPI
Gedung Percetakan Wisma Transit Dosen Lt. 1
UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya
Tlp. 031-8410298
sunanampelpress@yahoo.co.id

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Manajemen Strategi dan Sistem Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia" ini dapat tersusun dan hadir di tengah-tengah pembaca. Buku ini merupakan hasil dari kajian mendalam dan pengalaman empiris dalam memahami peran penting Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nahdlatul Ulama, sejak didirikannya pada tahun 1926, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap NKRI dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan toleran. NU tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memahami bagaimana NU mengelola strategi dan sistem organisasinya adalah hal yang krusial bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika kebangsaan di Indonesia.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang manajemen strategi dan sistem organisasi

NU dalam konteks menjaga NKRI. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, buku ini membahas berbagai aspek, mulai dari sejarah dan perkembangan NU, strategi manajemen yang diterapkan, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks globalisasi dan dinamika politik nasional.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat umum yang ingin mendalami peran strategis NU dalam menjaga NKRI. Semoga buku ini juga dapat menginspirasi organisasi-organisasi lain dalam mengembangkan strategi dan sistem yang efektif untuk memajukan bangsa dan negara.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam setiap langkah dan upaya kita demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Selamat membaca!

Penulis

PENGANTAR PENERBIT

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, kami dari The UINSA Press merasa sangat berbahagia dapat mempersembahkan kepada pembaca buku berjudul "Manajemen Strategi dan Sistem Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia." Buku ini merupakan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang peran strategis Nahdlatul Ulama (NU) dalam mempertahankan keutuhan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, telah menunjukkan peranan yang luar biasa dalam menjaga stabilitas dan kesatuan negara. Sejak awal berdirinya, NU tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif, tetapi juga sebagai benteng yang kokoh dalam mempertahankan NKRI dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal.

Buku ini hadir untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana NU mengelola strategi dan sistem organisasinya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, penulis buku ini berhasil menggali berbagai aspek penting dari manajemen strategi dan sistem

organisasi NU. Pembaca akan dibawa untuk memahami sejarah panjang NU, strategi manajemen yang diterapkan, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks dinamika global dan nasional.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang tertarik untuk mendalami peran NU dalam menjaga NKRI. Buku ini tidak hanya menawarkan pengetahuan teoritis tetapi juga wawasan praktis yang dapat diaplikasikan dalam konteks organisasi dan manajemen strategis.

The UINSA Press mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bekerja keras untuk menyusun buku ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penerbitannya. Kami juga berterima kasih kepada para pembaca yang senantiasa mendukung kami dengan semangat membaca dan belajar yang tinggi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menjaga dan memajukan bangsa dan negara tercinta, Indonesia. Selamat membaca!

Hormat kami,

The UINSA Press

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS –[v]
PENGANTAR PENERBIT –[vii]
DAFTAR ISI –[ix]

BAB I: PROLOG –[1]

BAB II: KONSEP MANAJEMEN ORGANISASI –[27]
A. Konsep Kelincahan Organisasi –[27]
B. Konsep *Dynamic Capabilities* –[288]
C. Konsep *Absorptive Capacity* –[29]
D. Konsep *Strategic Flexibelity* –[30]
E. Manajemen dan Organisasi –[31]
F. Komunikasi Organisasi –[32]

BAB III: MENGENAL NAHDLATUL ULAMA -[35]
A. Sejarah Pendirian Nahdlatul Ulama -[35]
B. Gambaran Nahdlatul Ulama -[39]
C. Struktur Kepengurusan -[41]
D. Keanggotaan -[43]
E. Garis-garis Besar Pemikiran Nahdlatul Ulama -[45]

F. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama -[46]

BAB IV: PERKENALAN DAN PERTUMBUHAN NAHDLATUL ULAMA -[47]

A. Perkembangan Dari Organisasi Konvensional ke Merakyat -[47]
B. Pendirian Nahdlatul Ulama -[48]
C. Motif Berdirinya Nahdlatul Ulama -[54]

BAB V: EKSISTENSI NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -[113]

A. Masa Perintisan Nahdlatul Ulama -[113]
B. Masa Perkembangan -[138]
C. Masa Perlawanan Penjajahan Belanda -[149]
D. Perjuangan NU Melawan Penjajah Belanda -[153]
E. Diundang Pemerintah Jepang -[179]
F. Masa Penjajahan Jepang -[184]
G. Masa Pemerintahan Jepang -[187]
H. Penangkapan para Kiai – Kiai Nahdlatul Ulama -[192]
I. Penahanan KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq oleh Jepang -[193]
J. Penangkapan KH Mahfudz Shiddiq di Jember Jawa Timur -[197]
K. Penjara Koblen Bubutan Surabaya -[199]
L. Kondisi Setelah Penangkapan Para Kiai -[204]
M. Masa Kemerdekaan -[207]
N. Markas Besar Oelama (MBO) -[209]
O. Refleksi Perkembangan NU Semasa Kemerdekaan -[211]
P. Masa Orde Lama -[212]

Q. Pasca Proklamasi -[218]
R. Masa Orde Baru -[222]
S. Kepemimpinan NU semasa Gus Dur -[223]
T. Masa Reformasi -[224]

BAB VI: STRATEGI ORGANISASI DALAM MENUJU NAHDLATUL ULAMA YANG MODERN DAN MAMPU BERTAHAN DALAM ERA GLOBALISASI –[229]

A. Strategi Modernisasi Organisasi Nahdlatul Ulama –[229]
B. Pendidikan –[233]
C. Media Komunikasi –[237]
D. Kemitraan dan Toleransi –[242]

BAB VII: EPILOG –[245]

DAFTAR PUSTAKA –[247]
BIOGRAFI –[253]

PONDOK PESANTREN

Darul Mukhlasin

TEGALSIWALAN – PROBOLONGGO – INDONESIA

https://darulmukhlashin.ponpes.id

BAB I
PROLOG

Dalam sejarah Indonesia, banyak organisasi, baik masyarakat maupun politik, yang tidak berhasil bertahan selama seratus tahun. Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Masyumi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI) telah dibubarkan, meskipun mereka memiliki sejarah yang baik, didukung oleh anggota intelektual, dan didukung oleh dana besar. Meskipun setiap organisasi dapat menggunakan realitas politik sebagai alasan pembubaran, Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu-satunya yang telah bertahan hampir seratus tahun.

Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi keagamaan di Indonesia. "Nahdlatul Ulama" dapat diartikan sebagai pergerakan para ulama atau kebangkitan para ulama karena etimologinya berasal dari bahasa Arab, di mana "*nahdlah*" berarti bangkit atau bergerak, dan "*ulama*" adalah bentuk jamak dari "*alim*", yang berarti orang yang mengetahui atau berilmu. (Mahmud, 1973:278). Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, dipimpin oleh para ulama dan berbasis massa. (Halim, 1970:12). Dipercaya bahwa keyakinan dan keteguhan yang mendalam

terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep, dan metode organisasi yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) adalah faktor utama yang memastikan bahwa NU berkembang dan terus bertahan hingga saat ini (Yusuf, 2008:19).

Kalangan pesantren menentang kolonialisme dan membentuk berbagai organisasi pergerakan selama penjajahan Belanda. Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) didirikan pada tahun 1916, dan Taswirul Afkar, juga disebut Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), didirikan dua tahun kemudian pada tahun 1918. Tugasnya adalah memberikan pendidikan sosial, politik, dan keagamaan kepada kaum santri. Selanjutnya, terbentuklah Nahdlatut Tujjar, atau Pergerakan Kaum Saudagar, dengan tujuan meningkatkan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi awal ini terdiri dari komite dan kelompok yang berbeda, tetapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka perlu membangun organisasi yang lebih besar untuk berkumpul sebagai satu tim. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman (Mubin, 2020:29).

KH Wahab Hasbullah segera berkomunikasi dengan banyak kyai, dan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926), mereka akhirnya membentuk organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Selama kepemimpinannya sebagai Rais Akbar, Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari adalah pendiri dan Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Perkembangan organisasi secara keseluruhan bergantung pada kepemimpinannya. Pesantren yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari adalah asal dari Nahdlatul Ulama (Mujahid, 2013:49). Organisasi Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah,* NU, selalu mengawasi Negara Indonesia. Selain itu, NU sering berhadapan dengan kelompok yang mencoba mengubah

ideologi negara, yaitu Pancasila. PKI, DII/NII, dan HTI semuanya dibubarkan oleh NU melalui pemerintah.

Tidak cukup untuk memahami Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam'iyyah diniyah (organisasi keagamaan) hanya dengan melihatnya dari sudut pandang formal sejak didirikan. Ini karena sebelum didirikan sebagai *jam'iyyah* (organisasi), NU sudah ada dalam bentuk jama'ah (komunitas) yang erat terlibat dalam aktivitas sosial keagamaan dengan pola dan karakteristik unik. (Anam, 2010: 3). Dengan kata lain, sebuah *jam'iyyah* diniyah (organisasi keagamaan) yang terdiri dari berbagai jama'ah menjadi satu kesatuah dengan wadah Nahdlatul Ulama.

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama mewadahi beberapa jamaah yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, pembentukannya sebagai organisasi keagamaan merupakan penegasan formal dari mekanisme informal para jamaah ulama yang sepaham, yang selama ini menganut salah satu dari empat mazhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Mekanisme ini sudah ada sejak lama dan ada sebelum *Jam'iyyah* NU muncul (Masudi, 2007:1).

Nahdlatul Ulama didirikan untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang menganut salah satu dari empat mazhab, dan untuk menyatukan langkah para ulama dan pengikutnya. Selain itu, tujuan Nahdlatul Ulama adalah untuk memajukan masyarakat, memajukan negara, dan meningkatkan martabat dan harkat manusia (Tim PWNU Jawa Timur, 2007:1). Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Fokus utama dalam bidang agama adalah pelaksanaan ajaran Islam sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah.

2. Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan berkonsentrasi pada penyediaan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah menjadikan orang-orang muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, dan bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa.
3. Di bidang sosial, upaya dilakukan untuk mendorong masyarakat dalam hal kesehatan, kemaslahatan keluarga, ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat marginal (mustadl'afin).
4. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata, bidang ekonomi berkonsentrasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan usaha. Untuk mencapai Khairu Ummah, upaya ini dilakukan melalui pengembangan usaha dan kerjasama dengan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Mengembangkan usaha tambahan melalui kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang menguntungkan masyarakat umum untuk mewujudkan *Khairu Ummah* (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015:40)

Sejarah pertumbuhan Nahdlatul Ulama (NU) dapat secara luas dibagi menjadi tiga periode: periode pertama sebagai organisasi sosial keagamaan, periode kedua ketika NU berfungsi selain sebagai organisasi sosial keagamaan juga sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai, dan periode ketiga ketika NU kembali ke kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Diketahui bahwa tujuan didirikannya NU adalah sebagai *jam'iyah* diniyah atau organisasi keagamaan, sehingga konstitusi awalnya menyatakan bahwa NU akan berkhidmat pada aktivitas-aktivitas keagamaan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan-tujuan ini meliputi peningkatan komunikasi di

antara para ulama, peningkatan kualitas sekolah-sekolah Islam, seleksi kitab-kitab agama yang dipelajari di pesantren, serta pendirian lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan pertanian dan perdagangan umat Islam. Kehadiran NU memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, antara lain dalam mengubah sikap dan pandangan dunia banyak Muslim, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi. Peran ini sering disalahpahami oleh para pengamat, yang melihat NU sebagai jembatan antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional di negara ini (Barton et al., 2010:13).

Misalnya, sangat bermanfaat bagi arsiparis untuk menentukan sistem klasifikasi arsip yang akan ditangani karena ini akan melibatkan pemahaman tentang fungsi, struktur, jenis, dan perkembangan teori organisasi. Ini adalah cara kami memahami Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan perjuangan yang signifikan untuk agama dan Negara sepanjang sejarahnya. Tidak hanya NU berpartisipasi dalam perjuangan fisik, sosial, ekonomi, dan politik, tetapi yang paling penting adalah dalam menegakkan "*Izzul Islam Wal Muslimin*", yaitu kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Nahdlatul Ulama (NU) mengembangkan ajaran *Ahlussunnah Waljamaah*, sehingga dalam bidang budaya dan amaliah, NU tetap toleran bahkan melestarikan tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sikap keagamaan yang moderat ini telah terbentuk pada periode 1938-1944 ketika NU dipimpin oleh Hadratussyeikh KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq sebagai Presiden Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) pada saat itu. Keduanya meletakkan dasar-dasar organisasi yang kuat dan sistem komunikasi yang baik di

dalam NU. Selain itu, mereka menerapkan dan mengelola kehidupan organisasi secara profesional dan modern, yang menjadi dasar pembaruan organisasi pada masa itu.

Pendekatan yang dapat diterapkan oleh NU untuk berkembang dan menghadapi berbagai tantangan serta peluang adalah pendekatan yang didasarkan pada *resources-based view* (RBV). Melalui RBV, NU dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang heterogen. Menurut Helfat dan Peteraf (2003), salah satu pilar dalam teori RBV yang dinamis adalah siklus hidup kemampuan (*Capability Lifecycle/CLC*).

Suatu ide baru yang disebut "*Capability Lifecycle*" menjelaskan pola umum perkembangan kemampuan organisasi berdasarkan pendekatan teori berbasis sumber daya dinamis dari waktu ke waktu. CLC menawarkan kerangka kerja dasar untuk pandangan bisnis yang dinamis yang berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya menjelaskan heterogenitas kompetitif yang didasarkan pada gagasan bahwa pesaing dekat memiliki perbedaan sumber daya dan kemampuan, yang akan mempengaruhi keunggulan kompetitif dan kekurangannya.

Pandangan berbasis sumber daya (*Resource-Based View*) menjelaskan heterogenitas kompetitif dengan berpendapat bahwa pesaing yang dekat berbeda dalam hal sumber daya dan kemampuan mereka, sehingga mempengaruhi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantage*). Konsep RBV menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi yang didasarkan pada sumber daya dan kemampuan cenderung bertahan lebih lama dibandingkan dengan yang hanya didasarkan pada posisi pasar

(*positioning*). Sumber daya organisasi dalam konteks ini dapat meliputi aspek finansial, sumber daya manusia, sarana fisik, dan aset tidak berwujud seperti pengetahuan (*knowledge*). Konsep RBV sangat mengandalkan pada sumber daya dan kemampuan yang unik, valuable, dan sulit ditiru dalam upaya menciptakan keunggulan bersaing. Dengan RBV, suatu organisasi diharapkan mampu mengidentifikasi sumber daya (*tangible* dan *intangible*) yang dimiliki, dan menentukan kemampuannya agar memiliki *competitive advantage* yang berkelanjutan.

Pada muktamar NU ke – 33 di Jombang NU mengambil tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia" tersebut sangat tampak sikap profesionalitas dan modern pada tubuh organisasi kaum nahdliyin ini. Seakan ingin menunjukkan pada masyarakat muslim di dunia pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim Indonesia bahwa masyarakat islam penuh dengan kedamaian toleransi dan berahlakul karimah. Setiap muslim harus mampu menebar kedamaian dan kesejahteraan bagi semua mahluk di muka bumi ini.

Pada saat peradaban akhlaq yang menjiwai setiap perilaku dan tutur kata menjadikan manusia Nusantara yang trengginas, bertoleransi, ramah, dan santun mencoba berfikir melebihi zamannya. Bahkan dalam hal berkehidupan, nenek moyang bangsa Indonesia telah lebih dahulu menemukan keharmonian, kesejukan, dan keharmonisan dalam berbudaya dan bermasyarakat. Bahkan nenek moyang bangsa ini menyadari bahwa sejatinya manusia hanyalah ciptaan Allah pemilik semesta jagad di bumi untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam serta dapat menciptakan keharmonisan bumi. Sehingga

dapat menjadi pribadi Islam Nusantara yang santun welas asih, luhur, dan berketuhanan yang menyeluruh.

Kepercayaan manusia terhadap Allah SWT tidak hanya pada pakaian lahir semata. Akan tetapi lebih menyatu dalam semua aspek kehidupan sosial bermasyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kita tidak bisa mendapati salah satu pun laku nenek moyang kita yang terlepas dari sikap ketuhanan dan melakukan tugas sebagai hamba kepada Allah pemilik semesta Jagad.

Perkembangan zaman terus berlanjut, dan susunan kehidupan sosial masyarakat terus berubah sesuai dengan tuntutan waktu. Setiap bangsa berlomba-lomba menemukan sekutu baru untuk menjadi mitra dagang, yang mereka jadikan sebagai sumber daya ekonomi demi kemajuan dan kejayaan. Nusantara, yang saat itu bukan pelaku industri, mau tidak mau harus menerima kedatangan bangsa lain di tanah air. Kedatangan mereka membawa beragam budaya yang berbeda dari apa yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Akibatnya, Nusantara menjadi plural dengan sendirinya, menerima berbagai perbedaan budaya tersebut.

Perkembangan Islam di Nusantara semakin pesat tanpa mendiskreditkan masyarakat atau kerajaan lain yang memiliki paham dan keyakinan berbeda. Agama Islam tumbuh menjadi oase baru di tengah Nusantara yang kala itu mulai dilanda masalah akibat maraknya kejahatan demi kehormatan. Islam hadir sebagai penengah dalam konflik kekuasaan berkepanjangan di beberapa kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Dengan pendekatan yang ramah dan fleksibel, Islam mampu berbaur dengan semua lapisan sosial di Nusantara, menghapus sekat-sekat sosial yang sebelumnya menjadi pembatas dalam masyarakat. Hal ini mengubah pandangan

masyarakat yang sebelumnya menghormati orang lain berdasarkan tingkatan kasta, menjadi penghormatan berdasarkan tingkat keilmuan, akhlak, dan kebijaksanaan.

Sejarah mencatat bahwa bangsa Arab pada masa kejayaan Islam mencapai puncak kemakmuran, meskipun tidak dapat dipungkiri adanya berbagai intrik politik pada masa tersebut. Namun, akhlak santun yang bermartabat dalam Islam telah berhasil menciptakan masyarakat majemuk yang santun, permisif, dan tangguh di berbagai belahan dunia.

Dilihat dari metode kajian Islam Nusantara itu sendiri memiliki beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

   Pada tahap awal Islamisasi, sarana perdagangan sangat memungkinkan pendekatan secara sosiologis. Hal ini terlihat dari intensitas lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok ikut berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan dengan masyarakat di Asia. Melalui perdagangan ini, dakwah Islam dilakukan kepada berbagai pihak. Selain itu, golongan raja dan kaum bangsawan lokal sering terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Ini sangat menguntungkan karena dalam tradisi lokal, apabila seorang raja memeluk Islam, maka mayoritas rakyatnya akan mengikutinya. Hal ini terjadi karena penduduk pribumi masih memegang kuat prinsip-prinsip yang diwarnai oleh hierarki tradisional.

   Perkawinan antara pedagang atau saudagar Muslim dengan perempuan lokal juga menjadi bagian erat dari proses Islamisasi. Melalui saluran ini, proses pengislaman berlangsung lebih mudah. Hubungan intens antara

masyarakat Muslim dan penduduk setempat memungkinkan terjadinya perkawinan campuran dan adaptasi gaya hidup lokal. Perkawinan ini, selain membentuk generasi baru Muslim, juga berpengaruh besar terhadap proses pengislaman selanjutnya.

Sejalan dengan penyebaran Islam di Indonesia, pendidikan Islam mulai berkembang, meskipun pada awalnya masih bersifat individual. Secara bertahap, lembaga-lembaga seperti masjid, surau, dan langgar dimanfaatkan untuk mengadakan pengajian umum tentang tulis baca Al-Qur'an dan wawasan keagamaan. Bentuk dasar pendidikan ini umumnya disebut pengajian Al-Qur'an. Selain itu, lembaga pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, atau ulama mulai muncul. Di lembaga ini, calon guru agama, kiai, atau ulama dididik. Setelah lulus, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Tidak jarang para raja atau bangsawan mengundang kiai atau ulama sebagai guru agama bagi keluarganya. Banyak juga kiai yang diangkat menjadi penasihat kerajaan, sehingga mereka dapat memberikan pengaruh politik kepada raja-raja.

Bentuk bangunan pada masjid kuno di Indonesia yang mengadaptasi pola-pola bangunan atau keyakinan Hindu menunjukkan bahwa Islam disebarkan secara damai. Selain itu, secara psikologis dan strategis, penerusan tradisi seni bangunan dan seni ukir pra-Islam merupakan alat dakwah yang bijaksana sehingga mampu menarik orang-orang non-Muslim untuk memeluk Islam sebagai pedoman hidup baru mereka.

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis tampak dalam perkembangan Islam di Nusantara yang terletak di pinggiran Dunia Islam, mewakili salah satu bagian yang paling sedikit mengalami Arabisasi. Seperti di negara-negara Muslim Asia Tenggara lainnya, Islamisasi berlangsung secara bertahap. Dampaknya adalah bentuk dan keyakinan agama lama berubah secara perlahan tanpa harus dihilangkan sepenuhnya. Meskipun demikian, perkembangan Islam di Asia Tenggara tetap berhubungan erat dengan Islam di Timur Tengah, melanjutkan jalinan perdagangan internasional yang sudah mapan di Nusantara.

Kebijakan politik pemerintah kolonial yang membatasi ruang gerak umat Islam tidak menyurutkan semangat umat Islam di Indonesia untuk merajut jalinan intelektual dengan pusat-pusat studi Islam di wilayah lain. Komitmen mereka kepada Islam, baik secara spiritual maupun psikologis, sangat mendalam dan dinamis, serta tidak berbeda jauh dengan masyarakat Muslim lainnya di dunia. Howard M. Federspiel menegaskan bahwa lebih dari empat ratus tahun yang lalu, Islam di Indonesia telah bergerak menuju bentuk agama yang lebih ortodoks, dengan berkurangnya ajaran dan praktik menyimpang.

Secara intelektual, Muslim Asia Tenggara selalu bersifat terbuka dan reseptif terhadap proses Islamisasi yang terus berlangsung, sebuah ciri masyarakat itu selama berabad-abad. Namun, seperti masyarakat Muslim lainnya, mereka juga mudah terkena perubahan yang mengganggu dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh posisi Nusantara sebagai tempat persilangan jaringan lalu lintas laut

yang menghubungkan Timur dan Barat. Sejak Islam berkembang di Asia Tenggara, dinamika Islam di Timur Tengah mempengaruhi wacana Islam di dunia Melayu-Indonesia.

Hubungan kuat dan intensif antara kedua wilayah ini telah tercipta sejak awal kehadiran Islam di dunia Melayu-Indonesia. Menurut Azyumardi Azra, hubungan tersebut melalui beberapa fase. Pada fase pertama (sekitar abad ke-8 sampai abad ke-12), hubungan lebih bersifat ekonomis, berbentuk perdagangan yang diprakarsai oleh orang-orang Islam Timur Tengah, terutama Arab dan Persia. Fase kedua (abad ke-12 sampai akhir abad ke-15) lebih bercorak keagamaan selain ekonomis, dengan Muslim Arab dan Persia yang mulai menyebarkan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Fase ketiga (abad ke-16 sampai paro kedua abad ke-17) lebih bercorak politis selain keagamaan, ditandai dengan kedatangan dan peningkatan persaingan antara Portugis dan Dinasti Usmani di Lautan Hindia. Pada fase ini, umat Islam di Nusantara banyak menjalin hubungan politik dan keagamaan dengan Dinasti Usmani dan para penguasa Haramayn. Jalinan keilmuan antara Timur Tengah dan Nusantara semakin erat, terutama melalui "murid-murid Jawi" yang belajar di Haramayn.

Murid-murid Jawi membentuk inti tradisi intelektual dan keilmuan Islam di antara kaum Muslim Melayu-Indonesia, memainkan peran besar dalam perkembangan Islam selanjutnya. Aktivitas ulama "lulusan" Haramayn dalam menghembuskan angin pembaruan Islam di Indonesia menunjukkan dampak signifikan dari hubungan ini.

Indonesia, meskipun belakangan mengenal Islam, menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Umat Muslim di Indonesia dikenal dengan keramahan dan orisinalitas kebudayaan Islam yang moderat, santun, dan berakhlak karimah. Muslim Indonesia mampu melebur dengan kebudayaan lokal dan menjadikannya khasanah Islam yang ramah terhadap perbedaan agama dan budaya. Dalam kehidupan beragama dan bersosial, toleransi sangat tinggi tanpa adanya kecurigaan antarumat beragama. Masyarakat Muslim tumbuh bersama dengan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kejawen, Konghucu, dan kepercayaan lainnya, melebur menjadi satu Indonesia. Fenomena unik seperti non-Muslim yang bangga mengenakan peci dan sarung, atau meminta jenazah keluarganya didoakan di masjid, menunjukkan keragaman dan toleransi ini.

Masyarakat Islam di Indonesia mencerminkan peradaban Islam yang santun, moderat, dan berakhlak luhur. Penelitian tentang manajemen organisasi Nahdlatul Ulama yang mampu bertahan hampir satu abad sangat dibutuhkan. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana NU menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan kemurnian ajaran Islam berdasarkan Ahlussunnah Waljamaah, serta mempromosikan Islam yang damai dan toleran di Indonesia dan dunia.

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang merupakan bagian terpenting dari proses penulisan buku ini, dimulai dengan menggali sumber data penelitian terdahulu yang mengacu pada permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, dalam buku ini akan membedakan penelitian yang sudah

dilakukan dengan tujuan tidak adanya kesamaan pembahasan yang saling bertentangan. Maka dijelaskan penelitian terdahulu dibawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ismail. Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Serta bagaimana kontribusi Nahdlatul Ulama dalam berkontribusi terhadap pendirian negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa NU lahir di atmosfer dan budaya pesantren di mana doktrin 'Islam tradisional' telah mengakar dalam melestarikan. Peran KH Abdul Wahab Hasbullah (pemimpin Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur) dan KH Hasyim Asy'ari (pendiri Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur) sangat signifikan dalam proses pembentukan NU pada waktu itu. Karena pengaruh mereka yang penting dan luas di kalangan orang-orang Muslim tradisional, terutama di daerah pedesaan, kedua kyai terkemuka ini berhasil melestarikan dan mengembangkan NU. Akibatnya, banyak kyai lainnya, terutama di Jawa dan Madura, bergabung atau mapan cabang-cabang NU di daerah mereka. Pembentukan cabang NU tidak hanya terjadi di Jawa dan Madura pada waktu itu, tetapi juga di luar Jawa. Dengan cara ini, NU tumbuh kuat tidak hanya di Jawa, tetapi juga di regoin lain di Indonesia. Hubungan simbiotik antara para kiai (ulama), santri, dan pesantren berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan NU yang signifikan di banyak daerah di Indonesia.

Kedua, penelitian dengan judul *Nahdlatul Ulama And Colective Ijtihad.* Nadhirsyah Hosen Monash University. New Zealand Journal of Asian Studies 6, 1 (June, 2004): 5-26 (Hosen, 2004). Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sejak 1926 NU

telah memainkan peran penting dalam wacana tentang hukum Islam di Indonesia. Selain itu, NU telah meninjau metode, formulir, dan sumbernya dalam melakukan ijtihad. Ini menunjukkan perkembangan positif NU. Meskipun kerendahan sumbernya dalam melakukan ijtihad. Ini menunjukkan perkembangan positif NU. Meskipun kerendahan sumbernya dalam melakukan ijtihad. Ini menunjukkan perkembangan positif NU. Meskipun kerendahan sumbernya dalam melakukan ijtihad. Meskipun kerendahan hatinya dalam tidak menyatakan dirinya sebagai Mujtahid, NU telah menunjukkan bahwa ia dapat digunakan fatwa sebagai instrumen untuk mengatasi perkembangan modern dengan melakukan ijtihad digunakan fatwa sebagai instrumen untuk mengatasi perkembangan modern dengan melakukan ijtihad digunakan fatwa sebagai instrumen untuk mengatasi perkembangan modern dengan melakukan ijtihad digunakan fatwa sebagai instrumen untuk mengatasi perkembangan modern dengan melakukan ijtihad secara kolektif. Model kolektif ijtihad yang dilakukan oleh NU dapat dilihat sebagai model secara kolektif. Model kolektif ijtihad yang dilakukan oleh NU dapat dilihat sebagai model alternatif ijtihad jama'i di dunia Muslim, dan, khususnya, untuk mengisi kesenjangan bimbingan teknis yang telah diabaikan oleh *Majma 'al-Buhus al-Islamiyah* sejak 1964.

Ketiga, penelitian dengan judul *Religious Networks In Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture.*Yanwar Pribadi Laboratorium Bantenologi, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia, Al-Jami'ah, Vol. 51, No. 1, 2013 (Pribadi, 2014). Penelitian ini berfokus pada aspek santri

Islam di Madura. Ini berurusan secara Makalah ini berfokus pada aspek santri Islam di Madura. Ini berurusan secara Makalah ini berfokus pada aspek santri Islam di Madura. Ini berurusan secara khusus dengan para pelaku di mana tiga elemen utama orang Madura santri budaya — itu pesantren khusus dengan para pelaku di mana tiga elemen utama orang Madura santri budaya, Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili mayoritas Islam, dan kiai (pemimpin agama) yang melambangkan para pemimpin Islam telah menjadi ciri dan telah menjadi elemen sentral Islam dan politik di Madura.

Keempat, penelitian dengan judul *Communication Patterns Among Kiais of Nahdlatul Ulama in The Madurese Ethnic Group*, Akhmad Haryono Faculty of Culture Science, University of Jember, Indonesia. Indonesian Journal of Applied Linguistics, Vol. 7 No. 3, January 2018 (Haryono, 2018a). Penelitian tentang pola komunikasi dengan pendekatan etnografi telah banyak dilakukan oleh ahli bahasa, namun ternyata hampir tidak ada penelitian tentang pola komunikasi dalam masyarakat NU yang berlatar belakang budaya paternalistik yang kuat. Padahal, keunikan budaya ini juga berpengaruh besar terhadap pola komunikasi anggota NU dalam pergaulan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi antar sesama Kiai (guru terhormat Islam) dari Nahdlatul Ulama dalam kelompok etnis Madura, dan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Kelima, penelitian dengan judul *Culture and Political Understanding on Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) in East Java*. Ishomuddin1*, Laili Abidah2, Rinikso Kartono3, Wahyudi4, 1

Professor of Sociology of Islamic Society of University of Muhammadiyah Malang, 2 Doctor Candidate of Social and Political Sciences of University of Muhammadiyah Malang 3 Doctor of Social Welfare of University of Muhammadiyah Malang 4 Doctor of Sociology of University of Muhammadiyah Malang. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) Volume 6, Issue 8, August 2019, PP 5 1-62 (Ishomuddin et al., 2019). Penelitian ini untuk memahami budaya dan pemahaman politik warga Muslim NU di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen.

Ketujuh, penelitian dengan judul *Development of Digital Library Through Student Empowerment Scholarship of NU Smart Program*. Ehwanudin, Mispani, Choirudin, Mahmudi, M. Saidun Anwar, *International Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue*11, November 2019 (Anwar & Saidun Anwar, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk 1) memberdayakan siswa yang mendapatkan program beasiswa NU Smart dengan memberikan soft skill tentang pengetahuan dan kemampuan literasi perpustakaan 2) Membangun perpustakaan digital sebagai pusat ilmiah dan upaya untuk menumbuhkan budaya literasi bagi guru dan siswa , dan 3) Membuka cakrawala guru dan staf perpustakaan di sekolah NU di 3 kabupaten / kota untuk sumber informasi digital yang disediakan di perpustakaan sekolah. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR) yang melibatkan semua pihak terkait (pemangku kepentingan) dalam meninjau tindakan yang sedang berlangsung

Kedelapan, penelitian dengan juduk *Inclusivity of Lecturers with Nahdlatul Ulama Background in Political and Religious Views in Indonesia*, Muhammad Roy Purwantoa, Tamyiz Mukharromb, Yusdanic, Ahmad Munjin Nasihd, a,b,c Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, dUniversitas Negeri Malang. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.Volume 9, Issue 10*, 2019 (Roy Purwanto et al., 2019). Penelitian ini berusaha untuk menguraikan peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam membentuk pola pikir inklusif masyarakat dan ideologi keagamaan, terutama di kalangan dosen universitas di Indonesia. Pemikiran keagamaan dosen dipetakan menjadi inklusif, eksklusif, dan radikal. Makalah ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner ketika mengumpulkan data.

Kesembilan, penelitian dengan judul *Islam Nusantara: A Semantic and Symbolic Analysis. Mark Woodward Center for the Study of Religion and Conflict, Arizona State University* mark.woodward@asu.edu, heritage of nusantara: *International Journal Of Religious Literature And Heritage,* Vol. 6 No. 2 Desember 2017 (Woodward & Kunci, 2018). Studi ini menganalisis konsep Islam Nusantara dari perspektif semantik dan simbolis, serta bagaimana ia menimbulkan makna dan perasaan untuk melawan gerakan transnasional ekstremis dan kekerasan, seperti al-Qaeda dan ISIS, yang didasarkan pada ideologi Salafi-Wahhabi. Kerangka tema agama, budaya, dan politik dalam dua film yang diproduksi oleh Nahdlatul Ulama (NU): The Blessing of Islam Nation (Lautan Penyingkapan: Islam sebagai Berkah untuk Semua Ciptaan) dan Launching of the Blessing of Islam Nusantara adalah dasar dari makalah ini. Yang pertama membangun visi Islam berdasarkan elemen dari

Sufisme, Jawa, dan beberapa budaya Indonesia lainnya untuk melawan ekstremis Salafi-Wahhabi yang keras dan tanpa kekerasan. Yang terakhir mendorong film dan kemungkinan organisasi pemuda Ansor (NU) untuk memerangi terorisme dan ekstremisme.

Kesepuluh, penelitian dengan judul *Islam Nusantara And World Peace A Concept of Struggle Nahdlatul Ulama in Indonesia*. Abdul Mu'id, *International Journal of Current Advanced Research* Vol 7, Issue 5(E), pp 12522-12529, May 2018 (Baru & Boboh, 2018). Penelitian ini menyajikan pemikiran Islam di Indonesia (nusantara) diprakarsai oleh Prof. Dr.KH.S`aid Agil Siraj, MA adalah landasan Islam Rahmatal lil alamin karena Allah SWT mengirim Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan orang-orang di seluruh dunia dengan cara damai, dan bukan melalui kekerasan. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Wali Songo, khususnya konsep yang ditawarkan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya. Sunan Kali Jaga menerapkan dan menawarkan Konsep kebaikan, ia menggunakan Seni Perwaayangan. Dia mengundang orang mendekat. Karena itu, Islam berkembang di negara yang dicintai ini melalui pendekatan yang sangat elegan, sopan, tidak memaksa dan meninju, tanpa mengejek dan menyalahgunakan dan membenci. Bahwa ada saling mencari dan mencintai, merangkul dan menghargai satu sama lain. Karena itu, cinta damai dan penuh kebijaksanaan membawa berkah ke seluruh alam semesta dan dunia. Kemudian, Islam Nusantara Ala Ahlusunnah Waljamaah mendatangkan berkah bagi ummat pada umumnya.

Kesebelas, penelitian dengan judul *The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia*. Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, *Contemporary*

Southeast Asia Vol. 42, No. 1 (2020), pp. 58–8 (Mietzner & Muhtadi, 2020). Penelitian ini menganalisis sikap pengikut NU terhadap toleransi beragama dan pluralisme, dan menemukan ketidakcocokan yang signifikan antara persepsi diri kepemimpinan NU dan pandangan aktual yang dipegang oleh akar rumput NU. Berdasarkan data survei.

Kedua belas, penelitian dengan judul *The Discourse of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama with Considerations of Geertz's Religion of Java*. Firdaus Wajdi, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 (Wajdi, 2018). Menggambarkan deskripsi yang berbeda dari kedua organisasi ini dari sudut pandang Clifford Geertz dalam karya pemikiran, Agama Jawa, di mana Geertz meliput beberapa ciri khas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Studi ini kemudian dilanjutkan dengan membahas alasan umum dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Penelitian kualitatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Studi ini diambil dari perdebatan berbeda, ada beberapa perdebatan, lebih pada pengembangan Islam di Indonesia. Kemudian diharapkan para pengikutnya untuk dapat bekerja sama untuk membangun Indonesia yang damai melalui pemahaman yang lebih baik tentang hubungan agama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Ketiga belas, penelitian dengan judul *The Strategy of the Educational Institution Ma'arif Nahdlatul Ulama of Central Java in Preventing Radicalism*, Hamidulloh Ibda, Borneo International Journal of Islamic Studies Vol. 1(2), 2019 (Ibda, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dalam mencegah radikalisme. Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian, strategi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari penguatan kualitas sekolah, ideologi, melek huruf, kurikulum, guru, dan sekolah pengelolaan.

Keempat belas, penelitian dengan judul *Why Islam Nusantara Is a Significant Leveraging Feature to Indonesia's Foreign Policy: A Policy Recommendation To The Indonesian Government,* Marlis H. Afridah, *ISTIQRO'* Volume 15, No. 02, 2017 (Afridah, 2017). Penelitian ini berupaya meyakinkan pemerintah Indonesia mengapa sudah saatnya Indonesia mengadopsi Islam Nusantara, penafsiran ideologis tradisional Islam, dan mempromosikannya dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Indonesia dapat berbagi Islam Nusantara dengan seluruh dunia sebagai solusi alternatif mengapa Islam Nusantara bisa dimanfaatkan untuk Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

Kelima belas, penelitian dengan judul *Organizational Spirituality and Knowledge Sharing: A Model of Multiple Mediation*, Chitra Khari1 • Shuchi Sinha, Global Journal of Flexible Systems Management https://doi.org/10.1007/s40171-018-0197-5. 10 oktober 2018 (Khari & Sinha, 2018). Makalah ini mengambil pandangan yang mendukung integrasi spiritualitas di tempat kerja dalam memengaruhi sikap berbagi pengetahuan karyawan dalam organisasi. makalah ini memberikan wawasan bagi para praktisi yang berusaha memperluas basis pengetahuan mereka yang dianggap sebagai kemampuan dinamis penting yang membentuk fleksibilitas strategis organisasi.

Keenam belas, penelitian dengan judul *Competitive Strategies Of Religious Organization*, SKENT D. MILLER*

Krannert Graduate School of Management, Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A. Strategic Management Journal Strat. Mgmt. J., 23: 435–456 (2002) Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/smj.234 (Miller, 2002)

Studi ini membawa perspektif manajemen strategis untuk studi organisasi keagamaan. Manajemen strategis menyoroti peran sumber daya yang unik (J. Barney, 1991) dan pilihan strategis oleh koalisi dominan dalam organisasi (Child, 1972) dalam membentuk strategi kompetitif. Yang menjadi perhatian utama di lapangan adalah bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif (J. B. Barney & Wright, 1998).

Dari beberapa penelitian terdahulu maka didapatkan beberapa novelty penelitian yaitu:

- Meneliti manajemen organisasi Nahdlatul Ulama dalam tinjauan penelitian kualitatif Etnografi dengan menggunakan penelitian longitudinal.
- Meneliti eksistensi manajemen strategi organisasi Nahdlatul Ulama sehingga bisa menjaga keutuhan organisasi.
- Meneliti amaliyah Warga Nahdliyin mengamalkan ajaran *Ahlus Sunnah Wal Jam'aah* (Aswaja) sebagai bagian dari Islam di Nusantara.
- Meneliti hubungan Nahdlatul Ulama, Islam di Nusantara dan NKRI

Agar pembahasan buku ini lebih mengarah dan lebih jelas maka diperlukan kerangka pikir. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan dengan permasalahannya, maka kerangka berpikir pembahasan buku ini sangatlah di perlukan untuk memberikan gambaran dan acuan pembahasan.

Fokus utama dalam pembahasan buku ini adalah tentang manajemen organisasi Nahdlatul Ulama dalam menjaga eksistensi organisasi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang terus berkembang dan maju dalam mejalankan roda organisasi pemerintahan demi menciptakan suatu negara yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun disetiap waktu pasti akan ada gangguan baik dari internal maupun eksternal organisasi akan tetapi bangsa Indonesia tetap menjadi negara yang bisa menjaga kedaulatan sebagai bangsa yang mengedepankan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan asas tunggal Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam kerangka berpikir ini diharapkan dapat menganalisa manajemen Nahdlatul Ulama sejak mulai berdiri hingga sekarang. Dimulai dari pendirian organisasi pada tahun 1926 disaat masa pembentukan dan perkenalan Nahdlatul Ulama pada saat masa kolonial yaitu pada saat negara Indonesia melakukan perlawanan kepada penjajahan Belanda dan Jepang hingga Indonesia Merdeka. Dengan semangat menyebarkan Islam *Ahlussunnah Wal jamaah* dengan nilai nilai ke-Islaman yang:

- *Tawasut* (Sikap berada di tengah-tengah, dalam artian tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan dalam beragama)
- *Tasamuh* (Toleransi. Dalam artian menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama.)
- *Tawazun* (Seimbang dalam segala hal, dalam artian penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran

rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits)

- *I'tidal* (Tegak lurus, dalam artian selalu membela kebenaran dan keadilan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara)

Selanjutnya adalah menganalisa bagaimana perjalanan Nahdlatul Ulama berusaha mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap utuh menjadi satu kesatuan Disetiap tahapan bernegara Nahdlatul Ulama selalu berada di garda terdepan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sampai dengan sekarang.

Adapun yang akan menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

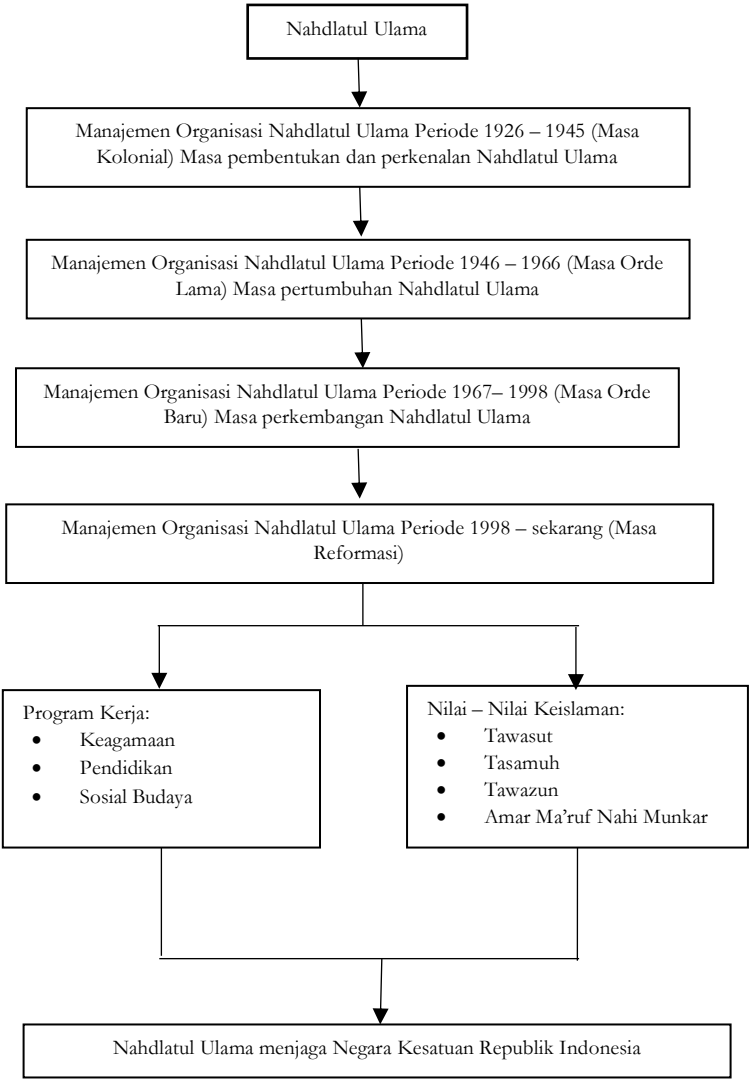

Gambar 1.1. Kerangka berfikir

Dengan mengembangkan program kerja keagamaan yang toleran, Pendidikan dan sosial budaya diharapkan Nahdlatul Ulama tetap bisa mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

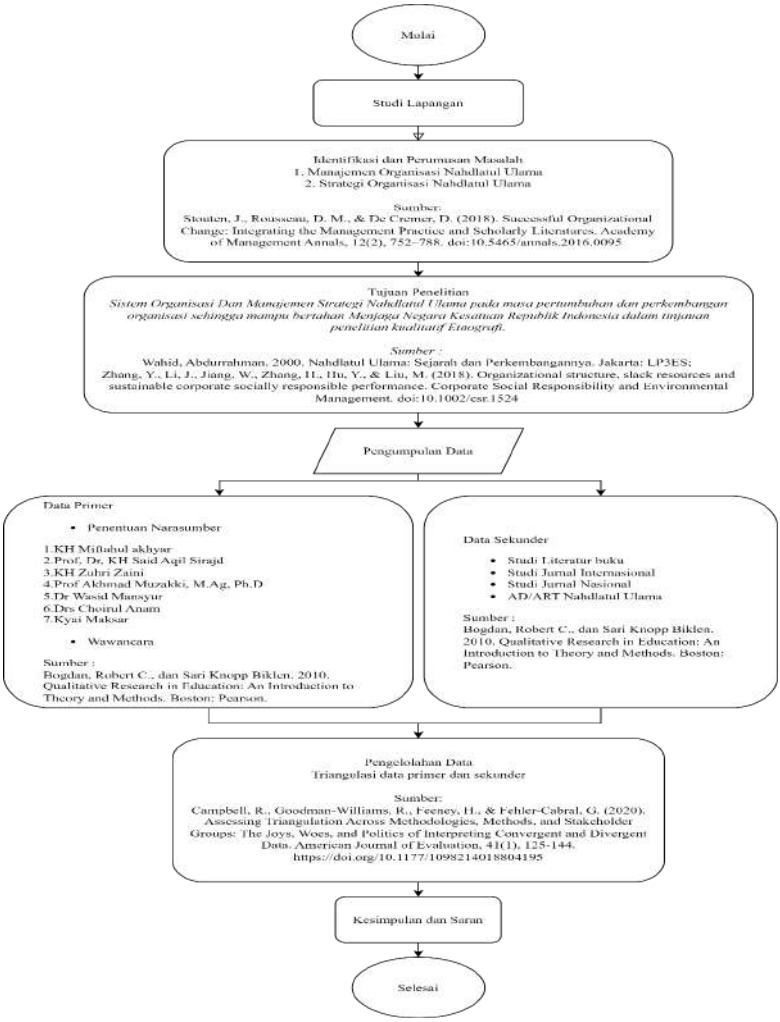

Gambar 1.2 Diagram alir Penelitian

BAB II
KONSEP MANAJEMEN ORGANISASI

A. Konsep Kelincahan Organisasi

Kemampuan organisasi untuk merasakan dan merespons perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat adalah apa yang disebut ketangkasan organisasi (Sambamurthy et al., 2003). Kemampuan untuk merasakan atau merasakan (*sensing*) dan kemampuan untuk menanggapi atau bertindak (*responding*) membentuk ketangkasan organisasi (Journé et al., 2020:32). Banyak ahli memiliki perspektif yang berbeda tentang kedua komponen ini. Kemampuan fisik untuk menanggapi perubahan lingkungan disebut kemampuan, sedangkan kemampuan penginderaan adalah pengetahuan manajemen. Dengan menggunakan manajemen pengetahuan, orang dapat meningkatkan kemampuan intelektual mereka untuk menemukan elemen yang relevan dalam merasakan perubahan, menentukannya, dan bertindak terhadap perubahan tersebut. Perubahan lingkungan seperti ini dipicu oleh banyak hal, seperti tindakan pesaing, perubahan undang-undang pemerintah, kemajuan teknologi, dan lainnya (Dove & Palmer, 2004).

Ketangkasan organisasi dapat dibangun dengan memanfaatkan ide-ide lain yang berkaitan dengan teori manajemen dan keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan untuk bertahan hidup. Salah satu konsep ini adalah kemampuan dinamis yang terdiri dari (Teece et al., 1997), *absorptive capacity* (George, 2003) dan *strategic flexibility* (Grewal & Tansuhaj, 2001). Meskipun pemikiran ini serupa dengan ide-ide tentang kelincahan organisasi, mereka berbeda dalam hal konsep yang mereka bahas dan faktor-faktor penting yang membentuk kelincahan organisasi itu sendiri.

B. Konsep *Dynamic Capabilities*

Dynamic capabilities adalah kemampuan organisasi untuk menggabungkan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kemampuan internal dan eksternal untuk mengatasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh (Teece et al., 1997) adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan daya saingnya. Konsep kemampuan dinamis (dynamic capabilities) memiliki banyak kesamaan dengan konsep ketangkasan organisasi (organizational agility), keunggulan kompetitif (competitive advantage), dan konsep lainnya yang relevan dengan kemampuan menanggapi perubahan lingkungan organisasi secara efektif. Namun, konsep kemampuan dinamis lebih luas dalam memahami perubahan lingkungan. Konsep ini mencakup semua jenis proses perusahaan yang dapat meningkatkan kemampuan dinamis dalam merespons perubahan lingkungan.

Perbedaannya dengan konsep ketangkasan organisasi adalah bahwa ketangkasan organisasi merupakan bagian dari kemampuan dinamis. Dengan kata lain, kemampuan dinamis adalah 29actor yang perlu diaktifkan untuk mencapai ketangkasan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kemampuan dinamis menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai respons yang efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

C. Konsep *Absorptive Capacity*

Konsep kapasitas absorptif (*absorptive capacity*) membahas serangkaian proses dan rutinitas organisasi dalam pengelolaan informasi. Kapasitas absorptif direfleksikan melalui proses akuisisi, asimilasi, transformasi, dan pemanfaatan pengetahuan untuk menghasilkan kemampuan organisasi yang dinamis (George, 2003). Kemampuan daya serap (absorptive capacity) pada dimensi akuisisi dan asimilasi pengetahuan mencakup kemampuan untuk mengumpulkan dan memahami informasi yang berasal dari luar organisasi. Hal ini mirip dengan komponen dari konsep kelincahan organisasi (organizational agility), yaitu kemampuan sensing atau merasakan perubahan lingkungan organisasi. Sedangkan dimensi transformasi dan pemanfaatan memiliki kesamaan dengan komponen responding, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari proses penyerapan sebelumnya.

Perbedaan utama antara konsep *absorptive capacity* dan konsep kelincahan organisasi adalah bahwa *absorptive capacity* berfokus pada manajemen pengelolaan pengetahuan yang

digunakan secara dominan untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Konsep ini diterapkan secara rutin dalam proses operasional dan digunakan secara periodik ketika dipicu oleh perubahan lingkungan. Sebaliknya, kelincahan organisasi lebih menekankan pada kemampuan organisasi untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan melalui adaptasi strategi dan operasional.

D. Konsep *Strategic Flexibelity*

Strategic Flexibelity dengan kemampuan organisasi dalam merespons ancaman dan peluang pasar dengan mengelola risiko ekonomi dan politik secara proaktif dan reaktif. Organisasi yang memiliki strategi yang mengecewakan cenderung memiliki sumber daya yang besar dan fleksibel dengan beragam portofolio strategi pilihan (Grewal & Tansuhaj, 2001). Istilah fleksibilitas strategis mengacu pada masalah strategis, seperti bagaimana tindakan pihak-pihak mempengaruhi rencana kegiatan organisasi dan bagaimana memperoleh keunggulan kompetitif. Ini adalah masalah strategi, baik operasional maupun taktis, yang menyebabkan perubahan lingkungan.

Konsep fleksibilitas strategis membahas lebih banyak tentang menangani masalah strategis atau mengatasi proses tertentu dengan menggunakan berbagai model strategi, sementara konsep ketangkasan organisasi berlaku untuk membangun kemampuan untuk menangani dan menangani setiap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi.

E. Manajemen dan Organisasi

Organisasi dan manajemen adalah satu sama lain. Manajemen menjalankan organisasi sebagai wadah, tetapi manajemen adalah yang menentukan bagaimana organisasi berjalan dan berkembang. Sebuah organisasi tidak dapat berfungsi tanpa manajemen, dan manajemen hanya dapat diterapkan dalam sebuah organisasi. Dijelaskan mengenai definisi manajemen, yaitu:" *management as being responsible for the attainment of objectives, taking place within a structured organization and with prescribed roles*". Manajemen sangat terkait dengan organisasi, karena di dalam suatu organisasi ada struktur dan peran yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan. Dengan demikian, manajemen mencakup individu yang melaksanakan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi.

Dari beberapa rumusan pengertian organisasi, secara konseptual menurut (Morgan, 2006:3) dalam buku *Images of Organization*, mengklasifikasikan organisasi seperti citra bergerak (images in motion) yakni *machine, organism, brain, culture, political system, psychic prison, transformation,* dan *domination*. Secara konseptual, klasifikasi Morgen ini dapat digunakan untuk memahami model organisasi saat ini serta sebagai alat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi dan kesalahan perhitungan saat mengembangkan organisasi. Pendapat Morgen telah dibandingkan dan ditingkatkan oleh penulis lain. Ketujuh pendapat, atau sebagian dari mereka, telah dibuat. Misalnya, Geoffrey Vickers, Edgar H. Schein, atau Hofstede mengembangkan konsep Morgan dalam perspektif baru untuk studi organisasi

yakni "budaya organisasi dan kepemimpinan (*Organizationan Culture and Leadership*),

Dalam buku Erni Rernawan (Ernawan, 2011:15) dikutip pengertian organisasi dari Mathis and Jackson sebagai berikut: "Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan" menurut (Ernawan, 2011:27)

Sementara itu, Dale dalam Blanchard (Hersey & Blanchard, 1969), mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah sebagai proses multi langkah yaitu:

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Mengkombinasikan pekerjaan dengan cara yang logis dan efisien.
4. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan bawahan dalam suatu kesatuan yang harmonis.
5. Memantau efektivitas organisasi dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

F. Komunikasi Organisasi

Hubungan antara komunikasi dan keberhasilan organisasi kuat karena dengan meningkatkan dan

mengembangkan komunikasi organisasi, kualitas organisasi dapat ditingkatkan. Banyak faktor—faktor universal yang membuat suatu organisasi ideal dan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengubah suatu organisasi yang berfungsi lebih baik—berhubungan dengan keinginan untuk mencapai hasil, kinerja organisasi. Salah satu dari banyak faktor ini adalah memilih hal-hal yang baik yang termasuk dalamnya. Berhubungan dengan masalah ini, dijelaskan oleh (Lewis, 1987:6) bahwa: *"managerial effectiveness cannot be improves without examining the managers individual communication knowledges and skill and his or her alities to work with groups".* Di sini, jelas bahwa manajer perlu berkomunikasi dalam menjalankan tugas mereka.

Komunikasi dilihat dari sudut pandang organisasi, sesungguhnya merupakan salah satu perilaku organisasi. Secara umum, dijelaskan oleh (Lewis, 1987:8), bahwa: *"Communication is the exchange of message resulting in a degree of shared meaning between a sender and a receiver"*. Menurut pendapat ini, komunikasi mencakup seluruh aktivitas manusia; dalam komunikasi, orang bertukar pesan, yang dihasilkan dari pembagian makna antara orang yang mengirim dan orang yang menerima pesan.

Dari sudut pandang manajemen, organisasi, dan komunikasi, kreativitas dan produktivitas serta keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup tempat kerja terkait. Dari sudut pandang pekerja organisasi, sebaliknya, mempelajari komunikasi organisasi adalah upaya untuk menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Apa sebenarnya tujuan mereka? Akibatnya, mereka akan dapat memahami kehidupan organisasi karena mereka dapat berbicara dengan

orang-orang di dalamnya. Bagaimana dengan kehidupan komunikasi? Metode komunikasi yang digunakan dalam pembentukan dan keberlanjutan suatu organisasi (Pace & Faules, 1989:2). Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan penting tidak hanya dalam mencapai suatu pekerjaan tetapi juga dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Interaksi pemimpin dengan bawahan tercakup dalam peran komunikasi. Perilaku komunikasi non-verbal adalah mencakup: (1) gestur, (2) ekspresi wajah, (3) kontak mata, (4) bahasa turubuh, dan (5) memposisikan diri". Karena dalam konteks komunikasi ini, seorang pemimpin memiliki pengaruh interpersonal dan pengaruh kedudukan (role system). Dengan begitu tentu perlu dikembangkan kekuatan pribadi dalam membangun hubungan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan cara yang menyenangkan.

BAB III
MENGENAL NAHDLATUL ULAMA

A. Sejarah Pendirian Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh Hadratussyeh Hasyim Asyari pada 31 Januari 1926, atau 16 Rajab 1344. Perkembangan pemikiran keagamaan dan politik di dunia Islam pada masa itu sangat berkaitan dengan pembentukan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1924, Abdul Aziz bin Saud, yang berpaham Wahabi, mengalahkan Raja Hijaz (Makkah), Syarif Husein. Berita tersebar bahwa pemimpin baru akan menggantikan praktik Sunni yang sudah ada di Arab dengan praktik wahabi.

Setelah Daulah Usmaniyah runtuh, Raja Abdul Aziz bin Saud kemudian berencana untuk meneruskan kekhilafahan Islam yang telah runtuh. karena itu, sebagai penerus Khilafah, dia berencana mengadakan muktamar Khilafah di Makkah. Setiap negara Islam, termasuk Indonesia, menerima undang-undang ini. Mula-mula, KH Wahab Hasbullah (Pesantren), KH Mas Mansyur (Muhamadiyah), dan HOS Cokroaminoto (SI) akan menjadi delegasi dari Indonesia. Upaya jahat telah dilakukan oleh kelompok yang mempromosikan para utusan Indonesia.

Nama salah satu utusan, KH Wahab Hasbullah, dicoret dari daftar utusan karena dia tidak mewakili Organisasi resmi.

Karena peristiwa buruk itulah para Kiai menyadari betapa pentingnya sebuah organisasi yang legal. Mereka tidak setuju dengan kebijakan Raja yang menentang maulid Nabi, Tawasul, ziarah kubur, dan bahkan terdengar bahwa Raja Ibnu Saud berencana untuk menggusur makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Jami'iyah Nahdlatul Ulama didirikan sebagai akibatnya.

Langkah berikutnya adalah musyawarah dan istikharoh para kiai yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengenai upaya untuk membentuk organisasi para kiai. Syekhona Kholil Bangkalan Madura, gurunya, memberikan syarah yang mendukung niat pendirian tersebut. Syekhona Kholil mengirimkan santri bernama Lora As'ad (Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo), yang membawa tasbih dan tongkat serta pesan kepada Hadratussyeh Hasyim Asyari sambil membaca Qur'an Surat Tahaa ayat 17–23. Setahun kemudian, Syekhona Kholil mengirimkan Lora As'ad kembali dan mengalungkan tasbih di lehernya sambil memberinya pesan untuk membaca Yaa Jabbar dan Yaa Qohhar. Setelah itu, Hadratussyeh Hasyim Asyari mengumpulkan para kyai di Surabaya dan mendirikan Nahdlatul Ulama secara resmi.

Nahdlatul Ulama secara resmi sebagai wadah Jam'iyah dengan pendiri Hadratussyeh Hasyim Asyari dari pondok pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur. Adapun Susunan Pengurus HBNO (Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama) sekarang menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 1926 yang pertama adalah:

Ro' i s Akbar	:	KH. Hasyim Asy' ari, Jombang
Wakil Ro' is	:	KH. Dachlan Achyad, Surabaya
Katib	:	KH. Abdul Wahab Chasbullah, Surabaya
Na'ib Katib	:	KH. Abdul Halim, Surabaya
A'wan	:	KH Bisri Syansuri Jombang, KH. Alwi bin Abd Aziz Surabaya, KH Ridwan Abdulloh Surabaya, KH. Sa'id, KH. Abdullah Ubaid Pasuruan, KH. Nahrowi bin Tohir. KH. Amin, dan KH. Mashuri
Mustasyar	:	KH. Asnawi Kudus, KH. Ridwan Semarang, KH. Nawawi Sidogiri, KH. Muntaha Bangkalan, Syech Ahmad Ghonaim, Al-Misri dan KH Raden Hambali, Kudus.

Susunan pengurus Tanfidziah, terdiri dari:

Presiden	:	H. Hasan Gipo, Surabaya
Sekretaris	:	M. Siddiq Sugeng Yudodiwiryo
Katib	:	KH. Abdul Wahab Chasbullah, Surabaya
Bendahara	:	H. Saleh Samil, H. Ichsan, H Ja'far, H. Usman, H. Ahzab, H. Nawawi, KH. Dahlan Abdul Qahar dan H.Mangun

Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan untuk mengembangkan, mempertahankan, dan mengamalkan

ajaran agama Islam Ahlussunnah Waljamaah yang dianut oleh salah satu dari empat madzhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.

Muslim Indonesia mencari fatwa dari ulama Timur Tengah, terutama dari Kairo dan Mekkah, sampai awal abad ke-20. Sebagai contoh, buku yang disebut Muhimmât al-Nafâ`is, yang mengumpulkan fatwa-fatwa ulama Mekkah untuk Muslim Indonesia, muncul pada akhir tahun 1800-an. Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bentuk lithografi di Mekkah pada tahun 1310 H/1892 oleh M. Nico Kaptein. Karya-karyanya menunjukkan bahwa fatwa yang ada dalam kitab itu berbicara tentang kondisi di Indonesia. Selain itu, Kapten mengutip Djajadiningrat bahwa edisi tahun 1913 buku tersebut tersedia di toko buku Muslim di Indonesia.

Ketika Nahdlatul Ulama berdiri, warganya tidak lagi mencari fatwa dari Mekkah dan Mesir. Sebaliknya, mereka sekarang dapat mencari jawaban dari organisasi mereka sendiri, melalui ulama yang memahami latar belakang masalah dan mengenali karakter atau kultur orang yang mencari fatwa.

Bukan berarti bahwa ulama Nahdlatul Ulama tidak boleh menggunakan ijtihad mandiri. Beberapa kelompok modernis mengkritik kecenderungan taklid, yang berarti menerima pendapat dan pendapat para mujtahid secara mentah-mentah, karena mereka mengeluarkan fatwa hanya dengan mengutip kitab fikih tanpa memeriksa argumen di dalamnya, dan yang paling penting, tanpa merujuk langsung pada al-Qur'an dan Sunnah.

Pada tahun 1935, KH. Hasyim Asy'ari menjawab kritikan kaum modernis itu:

> "Wahai para ulama! Jika kamu melihat seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan i'tibâr seorang Imam yang boleh untuk diikuti, walaupun lemah dan kamu tidak setuju dengannya, jangan merendahkan dia, tetapi nasehati dia dengan bijaksana dan ramah. Dan jika dia tetap tidak ingin mengikuti kamu, jangan bermusuhan dengan dia. Jika kamu bermusuhan dengannya, maka kamu adalah orang yang membangun sebuah tempat dengan menghancurkan kotanya dulu."

Dalam hal pendekatan dakwahnya kaum Nahdliyin banyak mengikuti dakwah model Wali Songo, yaitu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Budaya yang berasal dari suatu daerah ketika Islam belum datang akan terus dilestarikan dan dikembangkan. Sementara budaya yang jelas bertentangan dengan syariat Islam harus ditinggalkan.

Dengan gaya dakwah seperti Wali Songo, maka Wali Songo dimasukkan kedalam bentuk bintang sembilan dalam lambang NU. Bintang sembilan identik dengan sebutan untuk Nahdlatul Ulama.

B. Gambaran Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) selalu melakukan perjuangan yang signifikan untuk agama dan Negara. Itu tidak hanya berjuang dalam bidang fisik, sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga menegakkan prinsipnya, "Izzul Islam Wal Muslimin", yang berarti kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Dengan mengembangkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah, NU mempertahankan toleransi dan pelestarian

dalam bidang budaya dan amaliah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada tahun 1938–1944, perspektif keagamaan moderat ini telah dibentuk oleh NU, yang dipimpin oleh Hadratussyeh KH Hsyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq sebagai Presiden HBNO. Beliau berdua membangun fondasi organisasi yang kuat dan sistem komunikasi yang kuat di Universitas Nasional. Selain itu, bagaimana dia menerapkan dan memperlakukan kehidupan organisasi secara modern dan profesional.

Sangat penting bagi organisasi NU untuk berkembang agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Jika suatu organisasi berkembang, aturannya harus diubah atau ditambahkan. Dalam kurun waktu lima tahun sekali, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Universitas Nahdlatul Ulama (NU) adalah dokumen yang berfungsi sebagai landasan operasional organisasi. Keputusan Muktamar XXXII NU (2010) menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk memperjuangkan penerapan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Waljamaah. Menurut salah satu dari Madzhab Empat, tujuan Nahdlatul Ulama adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan untuk kebaikan dan kesejahteraan semua orang dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagaimana berikut:

1. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Waljamaah dan menurut salah satu Madzhab Empat dalam

masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar.

2. Dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan Iahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
4. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kcsempatan bernsaha clan mcnikmati hasi1~hasil pembangunan, dcngan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ckonomi kcrakyatan.
5. Mengembangkan usahausaha lain yang bcrmanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.

C. Struktur Kepengurusan

1. Struktur Organisasi NU
   a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat.
   b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi
   c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten/kota, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar negeri.
   d. MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.

e. Ranting untuk tingkat kelurahan/desa.

2. Struktur Lembaga Kepengurusan NU
   a. Mustasyar (Penasehat)
   b. Syuri'ah (Pimpinan Tertinggi) terdiri dari:
      - Rais Aam
      - Wakil Rais Aam
      - Beberapa Rais
      - Katib Aam
      - Beberapa Wakil Katib
      - A'wan
   c. Tanfidziyah (Pelaksana) Terdiri dari:
      - Ketua Umum
      - Beberapa Ketua
      - Sekretaris Jenderal
      - Beberapa Wakil Sekjen
      - Bendahara
      - Beberapa Wakil Bendahara
3. Struktur Organisasi Lajnah, Banom dan Lembaga
   a. PP (Pimpinan Pusat) untuk tingkat pusat.
   b. PW (Pimpinan Wilayah) untuk tingkat propinsi.
   c. PC (Pimpinan Cabang) untuk tingkat kabupatcn/kota.
   d. PAC (Pimpinan Anak Cabang) untuk tingkat kecamatan.
   e. Ranting untuk tingkat kclurahan/desa dan Komisariat untuk kepengurusan di suatu tempat tertentu.
4. Musyawarah di Organisasi NU
   a. Muktamar untuk tingkat Nasional
   b. Konferensi Wilayah untuk tingkat pengurus propinsi

c. Konferensi Cabang untuk tingkat pengurus kabupaten/kota
d. Konferensi Anak Cabang untuk tingkat pengurus kecamatan
e. Konferensi Ranting untuk tingkat pedesaan

D. Keanggotaan

Nahdlatul Ulama memiliki anggota yang luar biasa besar. Hasil riset yang dilakukan oleh lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada tanggal 18-25 Februari 2019, Nahdlatul Ulama dinyatakan sebagai organisasi agama terbesar di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) berada di posisi pertama dengan presentasi 49,5%.

Survei tersebut, yang melibatkan 1.200 orang, dilakukan melalui wawancara yang dipilih secara langsung dengan metode multistage random sampling. Sebagian besar responden adalah Muslim, dengan 87,8 persen dan 12,2 persen merupakan pemilih minoritas. Ada margin kesalahan, atau tingkat kesalahan, survei sebesar 2,9 persen.

Organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah, yang didirikan lebih awal daripada Nahdlatul Ulama, harus puas berada di urutan kedua dengan persentase yang cukup jauh jika dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama, yaitu 4,3% saja. Peringkat ketiga diduduki oleh gabungan ormas Islam lainnya, yaitu 1,3%, mengalahkan dua kelompok, yaitu Persatuan Alumni 212 (PA 212), yang memiliki 0,7%, dan FPI, yang memiliki 0,4%.

Gambar 5. 1 Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap Organisasi Masyarakat beragama Islam bulan September 2019

Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar orang Islam tidak merasa bagian dari ormas, yang mencapai 35%. Hasil survei LSI ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama saat ini memiliki anggota ormas terbesar di tingkat nasional dan di dunia secara keseluruhan.

Saat ini, lebih dari 250 juta orang tinggal di Indonesia, dengan 87% dari mereka muslim. NU memiliki kira-kira 108 juta anggota masyarakat, dengan persentase 49,5%. Namun, tanpa keraguan, New York University (NU) akan memasuki usia seratus tahun pada tahun 2026 dan mungkin akan mengubah dunia secara keseluruhan. Mengingat jumlah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) yang terus meningkat di

beberapa negara, sangat mungkin akan lebih mengakar di seluruh dunia. Selain itu, NU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Badan Otonom, Lembaga, dan Lajnah.

E. Garis-garis Besar Pemikiran Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: aLQuran, as-Sunnah, al-Ijma' (kesepakatan para Sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya di atas, NU mengikuti paham Ahlussunnah Waljamaah dan menggunakan jalan pendekatan madzhab:

1. Dalam bidang aqidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah Waljamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
2. Dalam bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (madzhab) salah s'atu dari madzhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
3. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam Junaid a1-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam lain.

NU mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU bersifat myempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

F. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

NU sebagian besar menggunakan model dakwah Walisongo, yang berarti tidak menggunakan kekerasan dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Selama tidak bertentangan dengan agama, kebudayaan yang berasal dari suatu wilayah sebelum kedatangan Islam akan terus berkembang dan dilestarikan. Sementara kebudayaannya jelas telah diabaikan.

Dengan gaya dakwah yang mirip dengan Walisongo, nama Walisongo telah melekat pada jam'iyah Nahdlaml Ulama dan digunakan dalam bentuk Bintang Sembilan dalam lambang NU. Sebutan Bintang Sembilan juga identik dengan Nahdlaml Ulama. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:

1. Tawassuth dan I'tidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari scgala bentuk pendekatan dengan tatharruf (ekstrim).
2. Tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kcmajemukan identitas budaya masyarakat.
3. Tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Swt.

Karena prinsip dakwahnya yang model Walisongo itu, NU dikenal sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan sering berperan sebagai perekat bangsa.

BAB IV
PERKENALAN DAN PERTUMBUHAN NAHDLATUL ULAMA

A. Perkembangan Dari Organisasi Konvensional ke Merakyat

Proses perubahan organisasi NU yang awalnya hanya sebatas organisasi konvensional, hingga saat ini telah menajdi bagian dari masyarakat memiliki proses yang panjang. NU telah ada sejak awal abad ke-20 dan memiliki akar yang kuat dalam budaya lokal Jawa dan Indonesia (Musyarrofah & Zulhannan, 2023). Ini adalah faktor penting dalam menjadikan NU sebagai organisasi yang merakyat. Organisasi harus menghormati dan memahami budaya lokal di mana mereka beroperasi dan memadukan nilai-nilai mereka .

NU dikenal sebagai organisasi yang inklusif, menerima anggota dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Organisasi konvensional perlu memastikan bahwa mereka menerima semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang etnis. NU telah lama berperan dalam memberikan pelayanan masyarakat, seperti

pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial. Ini telah memungkinkan mereka untuk meraih dukungan dan cinta dari masyarakat. Organisasi konvensional yang ingin menjadi merakyat juga harus aktif terlibat dalam pelayanan masyarakat.

Transformasi NU dari organisasi konvensional menjadi organisasi yang merakyat adalah hasil dari komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam, inklusivitas, partisipasi anggota, pelayanan masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan politik (Arifianto, 2021). Hal tersebut memerlukan kesadaran akan sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara luas.

B. Pendirian Nahdlatul Ulama

Pendirian Nahdlatul Ulama tidak pernah lepas dari peranan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari. Beliau sebagi tokoh sentral dalam pendirian ini, ingin menjalankan Amanah yang diberikan oleh Syaikhona KH Muhammad Kholil Bangkalan yang merupakan guru dari Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari ketika beliau mencari ilmu di Pondok Pesantren Syaikhona KH Muhammad Kholil Bangkalan. Syaikhona KH Muhammad Kholil Bangkalan pada saat itu bermimpi bertemu dengan gurunya Syaikhona KH Nawawi Al Bantani yang merupakan Imam besar Masjidil Haram, dimana Syaikhona KH Muhammad Kholil Bangkalan mencari ilmu di kota Makkah *Al Mukarramah*.untuk membentuk perkumpulan para Ulama di Indonesia (Haryono, 2018b).

Selanjutnya Syaikhona KH Muhammad Kholil Bangkalan memerintahkan kepada santrinya KH As'ad

Samsul Arifin untuk diutus menemui Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari dengan membawa sebuah tongkat, membawa surat Thoha ayat 17 – 23 dalam Alqur'an dan tasbih pemberian Syaikhona KH Muhammad Kholil Bangkalan. Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari begitu dapat perintah dari gurunya bergerak cepat membentuk perkumpulan para ulama ini dengan mengumpulkan para Kyai se-Jawa dan Madura.

Jadi perintah dari Syaikh Nawawi Al Bantani inilah yang melatar belakangi terbentuknya Nahdlatul Ulama (Wawancara tanggal 4 Mei 2022 di rumah KH Miftahul Akhyar).

Kemudian KH Miftahul Akhyar meyakinkan apabila perkembangan Nahdlatul Ulama bisa berkembang dan tumbuh pesat juga dikarena adanya Surat Keputusan (SK) tidak tertulis dari para Auliya' dan para wali. Dengan adanya barokah dari para Auliya' dan para wali inilah Nahdlatul Ulama akhirnya bisa bertahan sampai hampir 1 abad ini. Kekuatan doa para pendiri (*Muassis*) inilah yang bisa menghantarkan NU menjadi organisasi sosial keagamaan sampai hari ahir kelak. Bukan hanya sampai usia 1 abad ini.

Gambar 6. 1 Wawancara dengan KH Miftahul Akhyar Rois Am PBNU tanggal 4 Mei 2022

Dari sudut pandang agama, Para Kyai diminta untuk menjawab tantangan dunia yang bergolak pada saat pendirian Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Pada saat Perang Dunia Pertama baru saja berakhir, monarki agama mulai merasa tidak memadai, dan Wahabisasi muncul sebagai awal radikalisme di Hijaz. Patriotisme mulai muncul di Nusantara, menentang penjajahan kemiskinan dan ketidakadilan, yang mengarah pada apa yang sekarang kita kenal sebagai era kebangkitan nasional.

Sebagai jam'iyyah, NU lahir dari transformasi praktik kemandirian jamaah, termasuk kemandirian komunitas pesantren yang telah bertahan selama berabad-abad di bawah pengaruh kolonialisme. Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia kedua dengan ledakan bom atom sekutu di Nagasaki dan Hiroshima. Ledakan ini menunjukkan betapa

cepatnya teknologi dapat merusak kehidupan manusia. Setelah itu, banyak negara baru muncul di seluruh dunia. Dunia berubah, dan orang-orang dihadapkan pada dua pilihan masa depan. pilihan untuk menjadi negara agama atau sekuler.

Ketika NU didirikan, ada pertanyaan besar tentang apakah kita bisa hidup bersama di bumi Allah setelah perang dan darah. Jika itu bisa terjadi, bagaimana caranya? Saat saya tinggal di Arab selama beberapa tahun, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya Uni Nasional untuk Indonesia dan dunia. Dengan segala hormat, agama tidak terlibat secara aktif dalam mengisi makna nasionalisme di negara-negara Arab sejak awal. Jika Anda membaca sejarah dan konstitusi negara-negara Arab, Anda akan segera menyadari betapa penting dan berharganya Pembukaan Undang-Undang 45.

Pejuang nasionalis di Arab bukan hanya pejuang agama, tetapi juga pejuang agama. Di Indonesia, hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asyari juga nasionalis Islam. Tidak banyak nasionalis dan ulama di Timur Tengah, dan jarang ada nasionalis dan ulama yang sama. Akibatnya, nasionalisme dan agama sering bertentangan, yang menyebabkan konflik sektarian seperti yang terjadi di Palestina, Myanmar, Rohingya, Israel, Somalia, Suriah, Yaman, dan Afganistan. Ini adalah rangkaian ketidaktuntasan yang menantang dunia modern.

Belum ditemukan titik temu antara semangat Islam dan semangat nasionalisme. nasionalisme dan agama adalah dua kutub yang paling menguatkan, keduanya jangan pertentangkan demikianlah pusaka wasiat dari Hadartus Syaikh Hasyim Asy'ari yang diamini dan disuarakan ribuan

ulama pesantren dan dengan demikian dapat dimengerti bahwa ujian atas sikap tawasuth, ujian moderasi polarisasi dua kutub ekstrim memang sudah khas NU sejak awal mula pendiriannya (Wawancara dengan Prof. KH Said Aqil Sirajd, tanggal 21 Mei 2021).

Gambar 6. 1 Seusai wawancara dengan Prof KH Said Aqil Sirajd

Pembentukan jam'iyyah NU adalah upaya untuk mengorganisasikan potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada untuk ditingkatkan dan dikembangkan lebih luas lagi. Dengan kata lain, NU didirikan untuk menjadi wadah untuk usaha mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren dalam rangka tugas pengabdian yang tidak lagi terbatas pada soal kepesantrenan dan kegiatan ritual keagamaan semata-mata, tetapi lebih fokus pada masalah

yang lebih sensitif dan sensitif terhadap kebutuhan umat Islam.

Keinginan untuk meningkatkan pengabdian secara luas itu, terlihat jelas pada rumusan cita-cita dasar di awal berdirinya NU yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ikhtiar sebagai berikut:

> "Mengadakan perhoeboengan di antara Oelama-oelama jang bermadzhab, memeriksa kitab-kitab sebeloemnja dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari kitab-kitab Ahli Soennah wal Djama'ah atau kitab-kitab Ahli Bid'ah menyiarkan agama Islam berazaskan pada mazhab empat dengan djalan apa sadja jang baik, berikhtiar memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam, memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe joega dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan jang tiada dilarang oleh sjara agama Islam".

Rumusan ikhtiar tersebut merupakan prioritas yang dirasakan "penting untuk dilaksanakan di saat berdirinya NU. DI dalamnya nampak - jelas bahwa ikhtiar yang hendak dilakukan itu bersumber pada keinginan untuk mengabdikan diri di bidang ke ilmuan, kepekaan terhadap masalah sosial khususnya untuk mengatasi masalah fakir miskin dan anak-anak yatim, serta kemauan keras untuk memajukan bidang sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kita sampai pada definisi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah "Jam'iyyah diniyyah Islamiyyah" atau organisasi sosial keagamaan Islam yang

didirikan oleh para ulama pesantren, yang berpegang teguh pada salah satu dari empat mazhab. Dia berasal dari Ahlussunah wal Jama'ah. Tujuannya adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah ala madzahibil arba'ah, serta menangani masalah sosial, ekonomi.

C. Motif Berdirinya Nahdlatul Ulama

Untuk mengenal lebih jauh akan potret-diri NU perlu melihat berbagai faktor yang mendorong berdirinya organisasi tersebut. Di bawah ini beberapa persoalan yang menjadi motif berdirinya NU.

1. Motif Agama

Para muballigh Islam, terutama Wali Sanga, berhasil menyebarkan Islam di Indonesia (khususnya di Jawa). Menurut Lothrop Stoddard dalam bukunya "*The Rising Tide of Color*", penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke tujuh dan terutama setelah abad kesebelas dan dua belas dapat dikatakan secara total menggantikan Hinduisme dan Budhisme yang sebelumnya sangat berjaya. Kerajaan dan pemimpin rakyat dipengaruhi oleh Islam. Runtuhnya Majapahit dan berdirinya kerajaan Islam Demak pada sekitar tahun 1478 M menunjukkan bahwa kepercayaan orang Jawa berubah dari Hinduisme dan Budhisme ke arah Islam. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam mewarnai kehidupan masyarakat di hampir seluruh negeri.

Namun, kejahatan penjajah menghancurkan keberhasilan itu. Belanda pertama kali mendarat di

Banten pada tahun 1592 M. Tiga tahun kemudian, mereka berhasil mendirikan Perserikatan Dagang Hindia Timur (VOC). Cornelis de Houtman memimpin VOC, yang memungkinkan Belanda untuk membentuk tentara dan menghasilkan uang.

Sementara itu, orang Portugis telah datang ke Indonesia Timur dan menguasai Maluku pada tahun 1575 M. Namun, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman (1596) tidak dapat menguasai Maluku. Van Waewijk (1599) melakukan ekspedisi kedua, dan baru pada tahun 1599 dia bisa berlabuh di Ambon, kota besar di kepulauan Maluku. Selanjutnya, Vander Hagen menggunakan metode brutal untuk mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1600.

Belanda membenci Portugis di mana-mana, termasuk di Maluku, itu jelas. Itu bisa terjadi karena Belanda memberontak terhadap penjajahan Spanyol sebagai akibat dari perkembangan baru di Eropa. Selain alasan politik, perselisihan di antara kedua negara kulit putih itu disebabkan oleh masalah agama. Perselisihan ini terjadi sebagai hasil dari gerakan agama Luther dari Jerman dan Calvin dari Jenewa, yang memberontak terhadap gereja Katholik Roma. Di bawah pimpinan Willem 1, Belanda melawan pemerintahan Philip II dari Spanyol. Berlangsung selama 80 tahun (1568–1648 M.), pemberontakan berakhir dengan kemenangan Belanda dan kekalahan Spanyol.

Sebagai sekutu Spanyol, Belanda menganggap Portugis. Ini terbukti sejak perang 80 tahun itu berakhir dan banyak kapal dagang Belanda yang berlabuh di

Lissabon dirampas dan dibakar oleh Portugis. Lebih membenci lagi karena orang-orang Spanyol dan Portugis adalah penganut Katholik yang fanatik. Belanda, yang sebagian besar beragama Protestan, mendukung Luther dan Calvin yang menentang Paus Katholik dalam perang Kristen di Eropa.

Belanda dan Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan Kristen dan bukan hanya mengejar kekayaan Indonesia. Misalnya, setelah Portugis menguasai Maluku, mereka segera mendirikan Jemaat Katholik. Jemaat itu awalnya kecil, tetapi setelah 24 tahun, perkembangan dan perjalanannya terlihat cukup pesat. Jemaat tersebut malah digunakan oleh Franciscus Xaverius untuk menyebarkan agama Kristen di kepulauan Maluku dengan sangat keras.

Sangat mirip dengan Portugis. Kolonisasi Belanda yang jarang dan kemudian menguasai Indonesia selama tiga setengah abad dengan tujuan bukan hanya mengambil kekayaan Nusantara, tetapi juga memberikan misi Kristen kepada rakyat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam.

Sejarawan terkemuka Amir Syakib Arselan, dalam bukunya: "*Hadlirul Alamil Islami*", menceritakan tentang usaha kolonial Belanda untuk menyebarkan Kristen di Timur. Ia berkata, pada 1931 menghadiri kongres kaum Orientalis di Leiden negeri Belanda. Tetapi ia kemudian betul-betul terkejut setelah. mendengar pernyataan seorang Orientalis Belanda, Prof. DR. Snouch Hurgronje, tentang rencana kristenisasi di Timur (termasuk Indonesia) sebagai berikut:

"Bahwa perkembangan bangsa Belanda di Timur tidaklah maksudnya semata-mata keuntungan materil, tetapi yang lebih banyak dimaksudkan oleh Belanda dengan demikian ialah mengembangkan keutamaan-keutamaan agama Kristen".

Pemimpin Indonesia, terutama pemimpin agama, bangkit setelah mengetahui bahwa penjajahan Belanda bertujuan untuk menjadikan Indonesia, yang mayoritas Islam, sebagai pengkabar Injil selain menjajah. Kyai atau ulama secara teratur mengumpulkan pengikutnya untuk melawan penjajah. Akhirnya, pemberontakan lokal dan provinsial muncul di mana-mana. Ini jelas tidak berarti tidak mengakui bahwa ada faktor lain yang mendorong kebangkitan mereka, seperti kebijaksanaan politik ekonomi Belanda. Namun, setiap pemberontakan yang dipimpin oleh ulama atau kyai pasti memiliki alasan agama.

Perlawanan para ulama terhadap penjajahan Belanda adalah contohnya. Misalnya, di Jawa, Perang Diponegoro (1825–1830) adalah perang untuk mengusir penjajah. Perlawanan yang cukup keras, yang melibatkan banyak kyai, berakhir dengan penderitaan yang besar. Pangeran Diponegoro, yang bernama Kanjeng Abdul Hamid Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa Ing Mataram (1785–1855), terjebak dalam penipuan Jenderal De Kock dan kemudian dibuang ke Manado dan Makasar hingga meninggal pada tahun 1855.

Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri di Minangkabau (1821-1837). Meskipun perang ini lebih

dikenal sebagai perlawanan Imam Bonjol terhadap kaum adat, penyerbuan Belanda juga tidak dapat dihindari. Sebenarnya, perang yang berlangsung lama itu berakhir dengan Imam Bonjol dibawa ke Ambon dan kemudian Manado oleh kolonial Belanda, di mana dia meninggal pada tahun 1864. Ini juga berlaku di Aceh. Antara tahun 1873 dan 1905, berbagai perlawanan muncul, termasuk Teuku Umar (1854-1899), Teuku Cik Ditiro (1836-1891), dan Cut Nya Dien (1848-1906).

Namun, di Maluku, keterlibatan agama (Islam) dalam memicu perang melawan Belanda dan Portugis paling terlihat. Sultan Ternate III—diperankan oleh Khairun—berhasil mundur. Portugis yang tinggal di Maluku. Karena mereka tidak dapat lagi melanjutkan perang, Portugis menugaskan Gubernur De Mosquita untuk bernegosiasi dengan Sultan Khairun. Sultan Khairun menerima permintaan damai itu dengan mengangkat Al-Qur'an dan Injil.

Namun, Portugis tidak pernah berpikir tentang damai. Perdamaian itu dianggap oleh pihaknya sebagai strategi untuk melemahkan kekuatan Sultan Khairun. Akibatnya, pihak Portugis segera menyiapkan algojo untuk membunuh Sultan Khairun saat dia diundang ke sebuah perjamuan dan bersedia hadir. Di tahun 1570 M, Sultan tiba-tiba diserang dari belakang dan ditikam.

Selain itu, pemberontakan Cilegon (1888 M) di Jawa Barat dipimpin oleh Kyai Wasit dan Kyai Haji Ismail. Pemberontakan Cilegon masih dianggap sedikit beruntung, meskipun setiap perjuangan pahlawan Islam ini selalu menghasilkan hasil yang menyedihkan. Dalam

kerusuhan Cilegon, banyak pembesar Belanda yang berhasil ditangkap. Meskipun banyak korban di pihak Kyai Wasit dan Kyai Haji Ismail, bahkan Goebels, Asisten Residen, juga terbunuh.

Ketika pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan "Kerstening Politiek", atau kebijaksanaan menasranikan bangsa Indonesia di awal abad ke-20, perlawanan para ulama atau kyai terhadap kolonial Belanda semakin keras. Gubernur Jenderal Belanda A.W.F. Indenburg (1909-1916 M) dengan tegas menyatakan, "Bahwa dapat tetap dipertahankan tanah jajahan Indonesia, tergantung buat sebagain besar dari kristenisasi rakyat di sini.".

Pernyataan itu kemudian menjadi kenyataan ketika pemeritantah Hindia-Belanda membantu misi Katholik dan Zending Protestan dengan memberikan bantuan moral, materil, dan finansial yang signifikan. Setelah itu, Misi dan Zending bekerja keras untuk membangun sekolah-sekolah dan dengan rajin memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pembangunan rumah sakit.

Dengan demikian, para pemimpin Islam semakin marah. Karena tindakan penjajah yang semakin menghantui pikiran mereka, bayang-bayang Islam akan terdesak dan dihapus. Namun, apa yang bisa dikatakan? Semua pintu tertutup untuk menghilangkan bayang-bayang buruk ini; satu-satunya pilihan yang tersedia adalah melawan mereka secara fisik. Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh pengalaman, setiap pertempuran

harus berakhir dengan kegagalan, baik dari pihak pribumi maupun Islam. Sejak saat itu, para pemuka Islam mulai mempertimbangkan cara-cara baru untuk menangani kebijaksanaan kristenisasi Belanda.

Metode baru itu mulai muncul di awal abad ke-20. Para pemuka Islam: mulai memperoleh kekuatan melalui pesantren atau mendirikan organisasi sosial keagamaan, yang pada akhirnya akan menjadi palu godam kuat untuk menghajar penjajah. Sangat penting untuk menunjukkan peran KH. Hasyim Asy'ari dalam mengumpulkan santri di pesantren Tebuireng, Jombang.

Pemilihan KH Hasyim Asy'ari didasarkan pada pentingnya perjuangan beliau yang akhirnya menghasilkan organisasi besar yang dikenal sebagai "Nahdlatul Ulama". Selain itu, beliau adalah salah satu dari sedikit ulama pada tahun 1900-an yang berhasil mencetak ribuan ulama yang kemudian tersebar di hampir seluruh Nusantara. Faktor penting lainnya adalah komitmen dan janji yang dia buat saat kembali ke tanah air dari menuntut ilmu di Makkah pada sekitar 1898 M.

Menurut buku Muhammad Asad Syahab "AI allamah Muhammad Hasyim Asyari", Kyai Hasyim sempat bertemu dengan beberapa sahabatnya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum kembali ke Indonesia. Mereka berkumpul pada suatu hari di bulan Ramadlan. Pendeknya, mereka setuju untuk mengangkat sumpah di hadapan "Multazam", yang terletak di dekat pintu Kabah. Sumpah itu hanyalah janji yang harus dipenuhi setelah mereka tiba di negara masing-masing. Namun, janji tersebut berupa komitmen untuk berjuang

di jalan Allah SWT untuk memperkuat Agama Islam dan mencoba menyatukan umat Islam dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu agama Islam.

Sangat jelas bahwa tekad tersebut harus dideklarasikan bersama dan dengan mengangkat sumpah. Karena, pada saat itu, kondisi sosial politik dan sosial di negara-negara Timur berada di bawah kekuasaan penjajahari bangsa Barat.

Kyai Hasyim Asy'ari segera memenuhi janjinya saat tiba di rumah. Dia mendirikan pesantren Tebuireng pada tahun 1899 M. Pesantren ini kemudian mengumpulkan calon-calon pejuang muslim yang tangguh yang dapat mempertahankan, melindungi, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara.

Namun, gerak-gerik Kyai Hasyim tidak pernah luput dari sorotan mata-mata Belanda. Sedangkan dalam sejarah. pertumbuhan dan perkembangan pesantren Tebuireng sendiri — ketika itu masih relatif muda — telah banyak menemui hambatan dan rintangan yang tidak kecil. Beberapa pembesar Belanda seringkali datang ke Tebuireng dengan membawa tuduhan bermacam-macam. Tuduhan yang biasa dilontarkan adalah mengadakan kerusuhan dan pembunuhan. Setiap terjadi. pembunuhan di sekitar Jombang, pastilah: santri Tebuireng yang menjadi sasaran. Dengan dalih tuduhan-tuduhan itulah, pemerintah Hindia Belanda seringkali mengirimkan teguran yang pada pokoknya: meminta Kyai Hasyim untuk menghentikan kegiatannya. Namun teguran-teguran tersebut sama sekali tidak

mempengaruhi semangat juang Kyai Hasyim. Bahkan nama Tebuireng semakin hari bertambah harum dan menjadi - pusat perhatian masyarakat luas. Sehingga, pihak Belanda memandang perlu untuk mencari jalan pintas guna menghentikan kegiatan pesantren Tebuireng.

Pada sekitar tahun 1913 pondok Tebuireng diserang dengan ganasnya oleh tentara Belanda. Bangunan pondok dihancurkan hingga berkeping-keping. Kitab-kitab agama yang diajarkan di pondok dirampas dan sebagain dimusnahkan. Namun, sampai sejauh itu, tidak dijelaskan mengenai jatuhnya korban. Tetapi kemudian diberitakan bahwa Tebuireng merupakan markas pemberontak dan pusat ekstrimis muslim.

Kepada para santri, Kyai Hasyim mengatakan: "Kejadian ini justru menambah semangat kita untuk terus berjuang menegakkan Islam dan kemerdekaan yang hakiki". Dan setelah itu beliau mengutus para santri untuk memberitahukan musibah tersebut ke berbagai pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Bantuan moril maupun materiil kemudian mengalir dari berbagai daerah ke Tebuireng. Dan dalam tempo relatif singkat — hanya sekitar delapan bulan — pondok pesantren Tebuireng yang hancur itu sudah kembali asal, bahkan bertambah megah. Para santri yang datang pun semakin banyak, sampai kemudian pesantren Tebuireng dikenal sebagai "kiblatnya pesantren." Ini berarti 'Kerstening Politiek' Belanda mulai mendapatkan perlawanan serius, jika tidak dikatakan mengalami kegagalan.

Dari sini, kemudian sejarah mulai mencatat, bahwa semakin keras kemauan Belanda memberlakukan Politik Kristenisasi, semakin kuat pula persatuan ummat Islam untuk mengimbanginya. Bukan hanya itu. Di kalangan umat Islam pun kemudian muncul berbagai gerakan sosial dan keagamaan yang terorganisasi secara rapi dan bermotif menegakkan "ajaran Islam".

Di antara gerakan-gerakan itu adalah: Muhammadiyah (di Yogyakarta, 1912), Syarikat Islam (semula Syarikat Dagang Islam (SDI) di Sala, 1905), Al-Irsyadiyah (di Jakarta, 1914), Nahditul Ulama (di Surabaya, 1926), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Perti (di Bukit Tinggi, 1928), Al Jam'iyatul Washliyah (di Medan, 1930), dan masih banyak lagi organisasi sosial keagamaan yang bermunculan untuk menghadapi dan mengimbangi politik kristenisasi pemerintah kolonial.

Dengan demikian, perlawanan sudah mulai terorganisasi namun bukan dalam bentuk kekerasan. Model perlawanan seperti ini, pada saat . kapan pun bisa dipergunakan untuk menekan kebijaksanaan politik pemerintah kolonial yang merugikan Islam.

Salah satu contoh, perlawanan gerakan keagamaan Islam yang dipelopori Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terhadap politik kristenisasi Pemerintah Kolonial mengenai pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah agama, di tahun 1937. Baik NU maupun: Muhammadiyah, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pemberian subsidi yang tidak berimbang dan sangat menguntungkan golongan Protestan maupun Katholik tersebut.

Selama jangka waktu empat tahun, Pemerintah Kolonial membayar subsidi bagi sekolah atau kegiatan keagamaan sangat tidak adil, sebagaimana angka pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 1 Perbandingan Subsidi bagi sekolah atau kegiatan keagamaan oleh kolonial

Staatsblad Van Nederlandsch Indie	Protestan	Katholik	Islam
1936, No.355 (hal.25 6)	F 686.100	F 268.500	F 7.500
	F 683.200	F 290.700	F 7.500
1937, No.410 (hal.25 6)	F 696.100	F 296.400	F 7.500
	F 844.000	F 335.700	F 7.600
1938, No.511 (hal.27 8)			
1839, No.593 (hal.23)			

Dengan demikian, sampailah pada suatu pengeteian bahwa, beberapa organisasi Islam yang muncul pada dasawarsa dua puluh dan - tiga puluhan abad ini, salah satu motif atau faktor pendorongnya adalah untuk menegakkan agama Islam. Para ulama.dan pemuka-Islam (agaknya) sadar betul bahwa ajaran Islam yang telah tertanam ke lubuk hati bangsa Indonesia oleh para muballigh (khususnya) "Wali Sanga" ketika itu sedang terancam oleh bahaya politik kristenisasi Pmerintah Kolonial. Sehingga, mereka merasa perlu untuk bangkit mengadakan perlawanan sekalipun bukan dalam bentuk kekerasan. Tidak terkecuali NU, karena

organisasi para ulama ini lahir, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keluhuran agama.

2. Membangun Nasionalisme

Selain alasan agama, NU didirikan oleh keinginan untuk merdeka. Ia berusaha memupuk patriotisme melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Lothorp Stoddard menyatakan bahwa sementara semangat nasionalisme bangsa Indonesia masih tenang di masa lalu, dengan berdirinya Syarikat Islam (SI) dan pendiriannya Haji Oemar Said Tjokroaminoto (1883-1934), semangat nasionalisme mulai bangkit. Di seluruh Nusantara Indonesia, muncul berbagai organisasi kebangsaan dan keagamaan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah yang telah memegang tanah Indonesia selama hampir tiga puluh lima tahun.

Kemudian, pada sekitar tahun 1914, Abdul Wahab Hasbullah yang muda kembali dari belajar di Makkah dan menikah dengan puteri Kyai Musa dari Surabaya. Setelah itu, dia melihat ke rumah mertuanya di Kertopaten Surabaya. Kyai Wahab, yang sebelumnya merupakan pengurus cabang SI di Makkah, tertarik dengan inisiatif SI setelah melihatnya berhasil. Selain itu, Kyai Wahab aktif mengajar agama di pondok Kertopaten, yang dimiliki oleh Kyai Musa. Meskipun dia termasuk di antara orang-orang penting di SI, Kyai Wahab tampaknya tidak senang jika dia tidak mendirikan perkumpulannya sendiri. Mungkin karena SI dianggap terlalu fokus pada aktivitas politik, sedangkan Kyai Wahab lebih suka menumbuhkan nasionalisme melalui pendidikan.

Akibatnya, ketika bertemu dengan KH Mas Mansur, yang kemudian menjadi figur Muhammadiyah, yang baru saja kembali dari studi di Mesir, Kyai Wahab segera mengajaknya berbicara tentang masalah-masalah yang mengganggu bangsa. Setelah diskusi, ide untuk mendirikan sebuah perguruan untuk membangkitkan semangat nasionalisme kaum muda timbul. Sejumlah tokoh masyarakat, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Raden Pandji Soeroso, Soendjoto, seorang arsitek terkenal pada masa itu, dan KH Abdul Kahar, seorang saudagar terkenal, menyambut ide tersebut. Mereka kemudian bertanggung jawab untuk membangun gedung perguruan.

Dengan dukungan dari masyarakat Surabaya, terutama para dermawan yang dipelopori oleh KH. Abdul Kahar, sebuah gedung bertingkat di Surabaya (kampung Kawatan Gg IV) didirikan sebagai perguruan "Nahdlatul Wathan". Pada tahun 1916, perguruan ini mendapat status Rechtspersoon (badan hukum resmi) dengan KH. Abdul Kahar sebagai Direktur, KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Pimpinan Dewan Guru, dan KH. Mas Mansur sebagai Kepala Sekolah. Nahdlatul Wathan menjadi pusat penggemblengan pemuda sejak saat itu. Mereka dididik untuk menjadi generasi muda yang berpendidikan tinggi dan mencintai tanah air mereka. Para siswa diharuskan untuk menyanyikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab sebelum kelas dimulai. Lagu ini telah digubah oleh Kyai Wahab Hasbullah dalam bentuk syair berikut:

Wahai bangsaku wahai bangsaku
Cinta tanah air bagian dari iman
Cintailah tanah air ini wahai bangsaku
Jangan kalian menjadi orang terjajah
Sungguh kesempurnaan itu harus
dibuktikan dengan perbuatan
Dan bukallah kesempurnaan itu hanya
berupa ucapan
Berbuatlah demi cita-cita
Dan jangan-hanya pandai bicara
Dunia ini bukan tempat menetap
Tetapi, hanya tempat berlabuh
Berbuatlah sesuai dengan perintah-Nya
Dan janganlah kalian menjadi sapi tunggangan
Kalian tak-tahu orang yang memutar balikkan
Dan kalian tak mengerti apa yang berubah
Di mana akhir perjalanan
Dan bagaimana pula akhir kejadian
Adakah mereka memberimu minum
Juga kepada ternakmu
Atau, mereka membebaskan kamu dari beban
Atau, malah membiarkan-tertimbun beban
Wahai bangsaku yang berfikir jernih
Dan halus perasaan
Kobarkan semangat Jangan jadi pembosan

Ketika menjadi bapak pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Abdul Wahab Hasbullah berusaha menanamkan nasionalisme melalui pendidikan. Nama madrasah yang dipilih, "Nahdlatul Wathan", yang berarti "Pergerakan Tanah Air", menunjukkan hal ini. Selain itu,

syairnya penuh dengan semangat perjuangan, cinta terhadap tanah tumpah darah, dan kebencian terhadap penjajah. Ini menunjukkan cita-cita murni Kyai Abdul Wahab Hasbullah untuk berpartisipasi dalam pembebasan rakyat dari penjajahan Belanda.

Namun, penting untuk memperhatikan tindakan Kyai Wahab setelah mendirikan "Nahdlatul Wathan". Ini penting karena Kyai Wahab (mungkin) memiliki beberapa sifat yang jarang dimiliki orang lain. Dia pandai bergaul dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun demikian, beliau juga seorang ulama yang paling tangguh dalam mempertahankan dan membela keyakinan yang dia anut. Terakhir, beliau dikenal sebagai pembela ulama bermazhab (ulama pesantren) dari ancaman kaum modernis yang anti-mazhab.

Sifat dan sikap Kyai Wahab mendorongnya untuk bekerja sama dengan ulama terkenal seperti KH A Dachlan, pengasuh pondok Kebondalem di Surabaya, untuk mendirikan madrasah Taswirul Afkar, yang dapat dipahami dengan mudah. Taswirul Afkar, yang berarti "Konsepsi-konsepsi atau Potret Pemikiran", adalah grup diskusi yang membahas berbagai masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan sebelum menjadi madrasah. Para ulama dan ulama muda yang mempertahankan sistem mazhab juga termasuk dalam kelompok ini. Namun, pada tahun 1919, kelompok ini mendirikan madrasah "'Taswirul Afkar". Tujuannya adalah mendidik anak-anak lelaki di sekolah dasar untuk menguasai ilmu pengetahuan agama di tingkat elementer.

Madrasah "Taswirul Afkar" bergerak maju di Ampel Suci, yang terletak di dekat Masjid Ampel Surabaya. Di Surabaya bagian Utara, puluhan bahkan ratusan anak menjadi siswa "Taswirul Aikar", yang pada awalnya dipimpin langsung oleh KH A Dachlan. Sementara itu, kegiatan diskusi tetap berjalan seperti biasa, dan tampaknya lebih bersemangat lagi karena mereka yakin dapat menciptakan madrasah "Taswirul Afkar". Madrasah tersebut sekarang lebih megah. Satu-satunya tempatnya yang berubah setelah itu adalah di jalan Pegirian-Surabaya, bukan lagi di Ampel Suci. Perpindahan ke lokasi ini semata-mata karena lokasi semula tidak dapat menampung jumlah siswa yang lebih besar.

Sampai di sini, Kyai Wahab telah berada di tiga lingkungan: Pertama, lingkungan Syarikat Islam (SI) dengan H.O.S Tjokroaminoto sebagai tokoh utama, Kedua, lingkungan Nahdlatul Wathan dengan KH Mas Mansur sebagai tokoh sentralnya, dan, Ketiga lingkungan Taswirul Afkar dengan KH A Dachlan sebagai pengelolanya. Tiga lingkungan itu pun memiliki ciri yang berbeda-beda. Tjokroaminoto lebih condong pada kegiatan politik praktis, KH. Mas Mansur lebih dekat dengan kelompok anti-mazhab, sedangkan KH A Dachlan tidak berbeda dengan Kyai Wahab, yakni ulama yang mempertahankan mazhab.

Perlu diketahui pula bahwa sejak dasawarsa pertama abad XX gerakan pembaharuan Islam dari Timur Tengah mulai masuk ke Indonesia. Akibatnya, timbul dua istilah dalam gerakan Islam yang tak dapat

dipertemukan, yakni kelompok modernis dan kelompok tradisional atau yang lazim disebut kaum "ortodoks". Kelompok "modernis' pada pokoknya anti-mazhab, sedangkan "tradisional" mempertahankan mazhab.

Kyai Wahab sering menghadapi serangan dari kelompok modernis, baik di SI maupun KH Mas Mansur sendiri. Meskipun tujuan utama kelompok ini adalah membangun nasionalisme, serangan modernis seringkali datang hingga Kyai Wahab terpaksa melayani mereka. Di sinilah ketidaksepakatan mulai muncul antara Kyai Wahab dan KH Mas Mansur.

Perbedaan pendapat akhirnya mencapai puncaknya. Pada tahun 1921, pendiri Muhammadiyah, KH A Dachlan, yang sering datang ke Surabaya untuk memberikan ceramah agama, berhasil mendorong KH Mas Mansur untuk mengikuti jejaknya. Jadi, Mas Mansur meninggalkan Kyai Wahab pada tahun 1922 dan bergabung dengan Muhammadiyah. Dewan pengurus memilih KH Mas Alwi untuk menggantikan Mas Mansur sebagai kepala "Nahdlatul Wathan".

Tampaknya Kyai Wahab sudah lama mengingat peristiwa perpisahan itu. Akibatnya, meskipun orang pertama yang secara tiba-tiba meninggalkan Nahdlatul Wathan, tidak terjadi guncangan yang signifikan atau memengaruhi semangat perjuangan dewan pengurus. Kyai Wahab bahkan berkomitmen untuk menyebarkan Nahdlatul Wathan ke berbagai wilayah. Kyai Wahab membentuk cabang-cabang baru Nahdlatul Wathan bersama KH Mas Alwi, kepala sekolah yang baru dilantik. Cabang-cabang tersebut termasuk Akhul Wathan di

Semarang, Far'ul Wathan di Gresik, Hidayatul Wathan di Jombang, Farul Wathan di Malang, Ahlul Wathan di Wonokromo, Khitabatul Wathan di Pacarkeling, dan Hidayatul Wathan di Jagalan.

Nama "wathan"—yang berarti "tanah air"—selalu ada di belakang nama madrasah di beberapa cabang. Ini menunjukkan bahwa ada tujuan tertentu, yaitu menumbuhkan semangat cinta tanah air. Seperti yang disebutkan sebelumnya, syair "Nahdlatul Wathan" juga dinyanyikan di berbagai tempat dengan cara yang berbeda. Hingga tahun 1940-an, misalnya, para santri di Tebuireng menyanyikan syair ini setiap kali kelas dimulai. Dan setiap murid (santri) diminta berdiri tegak saat mereka menyanyikan syair tersebut, seperti saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kyai Wahab tidak hanya harus memperhatikan Nahdlatul Wathan dan keterlibatannya di SI, tetapi juga tidak bisa membiarkan kaum modernis menyerang ulama bermazhab. Lagi pula, serangan-serangan ini tidak mungkin diatasi oleh Kyai Wahab sendirian. Oleh karena itu, pada tahun 1924, beliau membuka kelas "masail diniyyah", atau masalah keagamaan, untuk meningkatkan pengetahuan ulama muda yang mempertahankan mazhab.

Kegiatan kursus ini diselenggarakan di madrasah "Nahdlatul Wathan" dan berlangsung tiga kali seminggu. Tidak hanya orang dari Jawa Timur, tetapi juga orang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Madura. Jumlah total peserta kursus adalah 65 orang. Karena banyaknya peserta, Kyai Wahab meminta teman-temannya untuk

membantu. Antara teman-temannya yang bersedia mengikutinya adalah KH. Bishri Syansuri dari Jombang, KH. Abdul Halim Leuwimunding dari Cirebon, KH. Mas Alwi Abdul Azis dan KH. Ridwan Abdullah dari Surabaya, KH. Maksum dan KH. Cholil dari Lasem-Rembang.

Selain itu, para pemuda yang setia mendampingi Kyai Wahab termasuk Abdullah Ubaid dari Kawatan, Thahir Bakri dan Abdul Hakim dari Petukangan, dan Hasan dan Nawawi dari Surabaya. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa Kyai Wahab telah membangun pertahanan yang cukup kuat untuk melawan serangan dari kaum modernis. Enam puluh lima ulama yang telah mengikuti kursus tampaknya telah dilatih secara menyeluruh untuk bertindak sebagai perwakilan tegas bagi organisasi pembaharu. Oleh karena itu, ketika perdebatan tentang masalah "khilafiyah" muncul di beberapa daerah di masa mendatang, tidak lagi perlu meminta kedatangan Kyai Wahab; sebaliknya, ulama muda yang mengikuti kursus tersebut cukup untuk menghadirinya.

Meskipun demikian, Kyai Wahab tampaknya tidak yakin dengan kekuatan pertahanan yang ia bangun sebelum mendirikan organisasi. Akibatnya, Kyai Wahab meminta Kyai Hasyim Asyari untuk membentuk organisasi ulama pada sekitar tahun 1924.

Namun, kyai Hasyim, saudara sepupu dan guru kyai Wahab, yang pada saat itu menjadi "kiblat" para ulama pesantren di Jawa dan Madura, tidak setuju dengan gagasan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai

proses konfirmasi ritual (tentang proses ritual ini akan dibahas dalam uraian berikutnya), Kyai Hasyim memberikan izin dan bahkan menjadi pimpinan tertinggi.

Menurut pendapat lain, sikap Kyai Hasyim Asy'ari yang menolak ide atau saran Kyai Wahab Hasbullah mungkin disebabkan oleh fakta bahwa masalah pokok agama belum pernah menjadi subjek perdebatan antara kelompok tradisional dan modernis selama ini. Mungkin juga karena alasan lain, seperti membuat kaum penjajah takut dan mempercepat pemulihan nasionalisme bangsa yang telah dijajah. Akibatnya, percakapan ini memungkinkan sejumlah orang penting untuk berkumpul dan berbicara tentang masa depan negara. Karena itu, para ulama tidak perlu membentuk kelompok atau organisasi mereka sendiri.

Perselisihan antara kelompok pembaharu dan ulama bermazhab benar-benar muncul, menurut Stoddard. Selain itu, pada tahun 1921-an, ada perdebatan antara Wahab Hasbulah dan Surkati dari Al Irsyad dan Achmad Dachlan dari Muhammadiyah, yang sangat ekstrim dan fanatik.

Meskipun peristiwa seperti itu pada dasarnya melemahkan, semangat kebenaran Islam mulai menyebar dengan kehadiran ulama terkenal seperti Achmad Dachlan, Wahab Hasbullah, Ahmad Surkati, Mas Mansur, Agus Salim, Sangadi, dan Wondoamiseno di setiap diskusi. Pada akhirnya, ini akan menjadi palu godam yang kuat untuk memukul penjajah. Ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang khilafiyah masih menguntungkan pada masa itu, terutama untuk

membangkitkan rasa nasionalisme yang dihalangi oleh penjajah. Karena ternyata pemerintah kolonial terganggu oleh percakapan yang dihadiri oleh para ulama terkenal yang sangat antusias dengan perjuangan bangsa tersebut.

Tidak diterimanya ide atau usul untuk mendirikan "perkumpulan ulama" oleh KH Hasyim Asy'ari sama sekali tidak mengendorkan semangat perjuangan KH Wahab Hasbullah. Beliau tetap berusaha menggalang persatuan di antara para tokoh pergerakan Islam maupun kebangsaan. Ketika pada Juli 1924 seorang tokoh politik, dokter Soetomo, mendirikan "Indonesische Studieclub", sebuah organisasi kaum terpelajar yang berorientasi pada pendalaman kesadaran dan kewajiban terhadap masyarakat serta memperdalam pengetahuan politik, KH Wahab juga bergabung di dalamnya.

Dengan demikian, waktu istirahat bagi KH Wahab menjadi habis. Selain harus berhubungan dengan Sarekat Islam (SI), mengatur Nahdlatul Wathan, berdiskusi di "Taswirul Afkar", dan memberikan kursus untuk ulama-ulama muda, KH Wahab juga harus aktif berdiskusi di "Indonesische Studieclub" yang kala itu bermarkas di Bubutan.

Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan di 'Indonesische Studieclub' dan menyaksikan betapa kompaknya para pemuda terpelajar yang tergabung di dalamnya, KH Wahab kembali tergerak untuk bertemu dengan KH Mas Mansur guna membicarakan kemungkinan mempersatukan pemuda Islam dalam sebuah wadah. Pada tahun 1925, pertemuan untuk membahas masalah ini diadakan. Beberapa tokoh

pemuda pendukung Mansur maupun Wahab dikumpulkan dan diajak berunding untuk membuat wadah persatuan dan kesatuan.

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Kedua kelompok tidak dapat dipersatukan dalam satu wadah karena perbedaan pendapat dalam soal khilafiyah. Akhirnya, pemuda pengikut Mansur membentuk wadah sendiri bernama "Pemuda Mardisantoso", sementara pemuda pendukung Wahab yang dipelopori Abdullah Ubaid membentuk wadah bernama "Syubbanul Wathan" (Pemuda Tanah Air). Bermarkas di jalan Orderlingblang (di ujung perempatan jalan Bubutan Surabaya), Syubbanul Wathan mengadakan kursus-kursus keagamaan dan mendiskusikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Misi utama ormas pemuda pendukung Wahab ini adalah membangkitkan semangat kaum muda untuk mencintai tanah air yang sedang terjajah.

Berdasarkan riwayat KH Abdul Wahab Hasbullah, tulisan ini bermaksud mengemukakan adanya motif lain (selain motif agama) yang mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama (NU). Keterlibatan KH Wahab dalam Sarekat Islam, Indonesische Studieclub, Nahdlatul Wathan, Taswirul Afkar, Syubbanul Wathan, dan dalam kursus masail diniyyah bagi para ulama muda pembela mazhab tidak bisa lepas dari tujuan utamanya, yaitu membangun semangat nasionalisme bangsa yang sedang terjajah.

Tekad ini sekali lagi ditegaskan oleh KH Wahab sehari sebelum lahirnya NU. Ketika undangan pertemuan para ulama untuk membicarakan delegasi Komite Hijaz

pada 31 Januari 1926 selesai diedarkan, Kyai Abdul Halim bertanya tentang rencana pembentukan perkumpulan atau organisasi para ulama tersebut. "Apakah mengandung tujuan untuk menuntut kemerdekaan?" tanya Kyai Abdul Halim.

Kyai Wahab menjawab:

"Tentu, Itu Syarat nomor satu
Ummat Islam menuju ke jalan itu
Ummat Islam tidak leluasa
Sebelum negara kita merdeka"

Namun, Kyai Abdul Halim masih agak ragu akan tujuan menuntut kemerdekaan tersebut. Pasalnya, pembentukan 'perkumpulan ulama' saja baru pada tahap pengiriman undangan. Apa mungkin menuntut kemerdekaan. Karena itu, Kyai Abdul Halim kemudian melanjutkan pertanyaannya: "Apakah dengan usaha macam begini ini bisa menuntut kemerdekaan?" Mendengar pertanyaan itu, Kyai Wahab langsung menyulutkan api rokoknya, sambil berkata:

"Ini bisa menghancurkan bangunan perang
Kita jangan putus asa
Kita harus yakin tercapai negeri merdeka"

jawabnya sambil memegang tangkai korek api yang sedang menyala.

Jadi, lahirnya NU juga didorong oleh semangat membangun n soanlisme. Membangun nasionalisme pada masa itu, sama artinya dengan membela tanah air. Dan, membela tanah air, berarti juga membela . tuntutan rakyat untuk merdeka sekalipun harus melawan penjajah.

Namun, bagaimana bentuk perlawanan NU terhadap penjajah, akan - dibahas dalam bab selanjutnya.

3. Mempertahankan paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*

Selain motif agama dan nasioanlisme, lahirnya NU juga didorong olch semangat mempertahankan paham *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Kesan ini tampil begitu kuat setiap kita hendak membicarakan masalah NU. Namun demikian, bukan berarti "Ahlussunah' atau "Sunny' itu monopoli NU, sedangkan yang lain bukan.

Untuk mengetahui lebih jauh pembelaan NU terhadap paham 'Ahlussunnah', kiranya perlu terlebih dulu melihat (kenyataan) praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan mayoritas umat Islam Indonesia khususnya di Jawa.

Seperti telah dimaklumi bersama, para muballigh *"Wali Sanga"* telah berhasil mengemban tugas sebagai penyebar agama Islam terutama di Jawa. Pengaruh Islam bukan saja masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, melainkan sekaligus menggantikan Budhisme dan Hinduisme yang telah lama diyakini masyarakat setempat. Namun demikian, kenyataan menunjukkan masih adanya praktek-praktek keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Masih terlalu banyak dijumpai kegiatan keagamaan yang berbau animistik.

Harry J. Benda dalam prasarannya berjudul: *"Continuity and change in Indonesia Islam"* (Kontonyuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia), menilai kenyataan praktek keagamaan seperti itu sebagai hat wajar, oleh karena khazanah budaya bangsa Indonesia hampir seluruhnya berasal dari luar. Pengaruh budaya itu pun

semakin terasa bekasnya, bila dilihat dari berbagai aspek tentang kepulauan Indonesia dan terutama letak geografisnya. Berada di antara Teluk Persi dan Laut Cina Selatan, Indonesia senantiasa merupakan persimpangan arus perdagangan dan lalu lintas dunia.

Karena itu, bisa dimengerti apabila agama Hindu dan Budha yang berasal dari India dapat berlabuh dalam waktu lama di Indonesia, khususnya di Jawa. Sehingga pengaruh Hindu-Budha ini pun sampai menembus ke sendi-sendi kehidupan yang sangat dalam.

Tetapi, karena faktor letak geografis tadi, maka kemudian datang agama Islam, mula-mula merembes melalui Parsi dan India bukan langsung dari tempat asal, yakni Timur Tengah. Karena bukan datang dari Timur Tengah itulah, Harry, kemudian hendak membedakan corak Islam di Indonesia dengan Islam di tempat asalnya. Dengan kata lain, karena Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia melalui Parsi dan India — keduanya merupakan tempat Islam bercorak tasawwuf atau mistik — maka perkembangannya lebih bertoleransi dengan budaya setempat. Sehingga corak Islam di Indonesia lebih berbau sinkristik animistik.

Tentu saja, pendapat Harry itu patut dihargai, sejauh tidak diperuntukkan menilai kapasitas maupun kwalitas para muballigh pembawa dan penyebar Islam ke Indonesia, khususnya muballigh "Wali Sanga". Sebab, bila harus menilai, pasti akan terbentur pada suatu pertanyaan: Apakah para muballigh setingkat "Wali Sanga" itu tidak atau belum tahu mana yang budaya dan mana pula yang ajaran Islam? Atau, adakah mereka

memang sengaja membiarkan agar perkembangan Islam bercorak sinkristik animistik? Lantas apa maksudnya?

Tentu saja tidak demikian halnya. Sebab muballigh setingkat "Wali Sanga" sudah pasti paham terhadap mana yang budaya dan mana pula yang agama. Karena itu, persoalannya bukan saja terletak pada "**sebab Islam yang masuk bukan langsung dari Timur Tengah.** Melainkan, lebih pada metode dan sistem berdakwah. Bahwa kenyataannya masih terdapat praktek keagamaan berbau animistis, itu tidak semata karena Islam yang masuk bukan dari tempat asal, tapi lebih dari itu adalah karena **'metode dan sistem berdakawah'**. Adakah penyebaran Islam di masyarakat yang (dulunya) telah terlibat jauh ke dalam agama Hindu Budha itu harus berjalan secara sporadis, atau justru dengan cara elastis kontinyuitas tanpa perlu mendatangkan tantangan yang berarti? Pilihan cara dakwah inilah yang, tentunya, paling menentukan corak Islam di Indonesia.

Lagi pula, persoalan metode dan cara dakwah tersebut, pada masa 'Wali Sanga' sudah menjadi bahan diskusi antara Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Giri (Raden Paku atau Raden Ainul'yaqin) di satu pihak dan Sunan Kalijaga (Raden Syahid) di pihak lain. Sunan Ampel dan Sunan Giri, menghendaki cara berdakwah secara murni tanpa toleransi terhadap budaya lokal (setempat). Sesajen, selamatan tiga hari, ketujuh hari dan seterusnya untuk mengingat orang mati (almarhum), harus diberantas seketika bersama *takhayul, khurafat, syirik* maupun *bid'ah*.

Tetapi, Sunan Kalijaga menolak cara itu. Ia menghendaki cara yang lunak terhadap adat istiadat lama dan tidak memberantasnya sekaligus. "Sebab, sikap kaku, tidak mau bertoleransi, justru akan mempersulit jalannya dakwah itu sendiri. Sunan Kalijaga memilih metode partisipasi penuh sambil mempengaruhi dan memberikan warna baru. Dengan demikian, kontinyuitas menuju kemurnian ajaran tetap diharapkan meskipun berjalan sangat lamban, tetapi tidak banyak mendatangkan tantangan.

Cara yang ditempuh Sunan Kalijaga itulah yang kemudian dianut - oleh para ulama pesantren yang kelak mendirikan NU. Dalam berdakwah, mereka lebih bertoleransi terhadap budaya lokal (setempat) dan bila perlu ikut memelihara dan melestarikannya sebagai sarana dakwah. Sehingga, dalam beberapa penampilan yang bersifat keagamaan seperti, msialnya, upacara khitanan, perkawinan, mauludan, rajabiyahan (rejeban) maupun upacara kematian (tahlilan) dan sebagainya, kelompok ini terlihat lebih hidup, kreatif dan apresiatif terhadap budaya setempat.

Cara berdakwah model Wali Sanga itu mendapat kecaman pedas, ketika gairah dan semangat pembaharuan Islam Timur Tengah masuk ke Indonesia, pertengahan abad XIX dan (terutama) di awal abad XX ini. Warna pengaruh Timur Tengah pada pokoknya adalah membangkitkan kembali ummat Islam yang tidur lelap guna melepas penderitaan dari kungkungan penjajah Barat. Tetapi, semangat dan gairah itu bukan berarti tidak merembes kepada masalah pembaharuan ajaran Islam

dengan semboyan kembali kepada Al-Our'an dan Hadist. Praktekpraktek keagamaan yang, menurut kelompok pembaharu, penuh *bid'ah, takhayul, khurafat, syirik*, mazhab maupun tradisi-tradisi keagamaan lainnya yang tidak ada dalam Al-Our'an dan Hadist, harus pula dibersihkan. Praktek-praktek keagamaan semacam itu, selain menyimpang dari ajaran Islam, juga membuat ummat Islam menjadi beku, lemah, lumpuh dan terbelakang. Dengan demikian, kegairahan Islam baru dari Timur Tengah itu, bukan cuma mengecam cara atau metode berdakwah saja, akan tetapi juga mendobrak tradisi keilmuan yang selama ini dianut oleh para ulama pesantren. Soal sistem bermazhab, persyaratan ijtihad, keharusan bertaklid, dan juga tradisi keagamaan semisal ziarah kubur, talgin buat si mayit, tawasul kepada para wali dan tradisi-tradisi lain yang, biasanya, disebut **'khilafiyah furu'iyah'**, harus dikikis habis. Kegairahan baru macam inilah yang, nantinya, dinilai oleh para ulama pesantren sebagai mengancam kelestarian paham "*Ahlussunah wal Jama'ah"*. Sehingga, mereka perlu tampil sebagai pembela yang pantang menyerah.

Pengaruh Timur Tengah yang begitu cepat meluas ke Indonesia — mungkin saja melalui jama'ah haji, ternyata menarik minat banyak pelajar kita untuk menuntut ilmu di Semenanjung Arabia khususnya Makkah. Ini sangat mungkin bisa terjadi, oleh karena hubungan laut yang semakin membaik semenjak dibukanya Terusan Zues di tahun 1869. Malah bukan hanya para pelajar saja yang kemudian berdatangan ke

Timur Tengah. Jama'ah haji Indonesia pun semakin meledak-ledak jumlahnya dari tahun ke tahun.

Dalam *'Indisch Verslag'* 1931, pemerintah Hindia-Belanda merinci jumlah jama'ah haji Indonesia --yang didaftar di Jeddah-- dari tahun 1900-1914 berjumlah 192.167 orang. Sedangkan dalam waktu satu tahun (1913-1914) jumlah jama'ah haji seluruh dunia berjumlah 56.855 orang. Dari jumlah itu, 28.427 orang adalah jama'ah haji asal Indonesia. Berarti 50 persen dari jumlah manusia yang datang ke Makkah untuk ibadah haji di tahun itu, adalah haji-haji Indonesia. Bisa dibayangkan betapa besar pengaruh Timur Tengah terhadap Indonesia. Karena itu, segala apa yang terjadi di Semenanjung Arabia, akan segera dapat ditangkap dan direkonstruksi secara cepat lewat para jama'ah haji tersebut.

Apa saja yang dilakukan oleh **Muhammad bin Abdul Wahab** (1703-1787 M), seorang tokoh pembaharu yang lahir di Ayibah — hwah kota kecil di lembah Najed —segera dapat ditangkap dan bekctahui bahkan juga ditiru oleh ummat Islam di Indonesia. Muhammad bin Abdul Wahab menggedor dunia Islam khususnya Arab, "yang gerakannya yang terkenal **'Gerakan Wahabi'** atau **"Muwahhidin'** (glongan yang meng-Esakan Tuhan), juga segera dijumpai Wahabi-wahabi imitasi di Indonesia.

Ajaran Wahabi, pada prinsipnya adalah "kembali kepada Al-Quran dan Hadist, memberantas bid'ah dan adat istiadat lama dengan penuh fanatisme. Lebih jauh, beberapa pokok ajarannya dapat dikemukakan, sbb: Hanya Allah SWT yang harus disembah; mohon berkah

kepada ali, syekh dan kekuatan ghaib adalah musyrik, melarang menyebut nama Nabi, Wali, Guru maupun malaikat untuk perantara do'a, karena perbuatan macam itu adalah syirik; berdo'a harus langsung kepada Alah SWT tidak boleh menggunakan perantara segala, tidak boleh mohon syafaat (pertolongan) kepada selain Allah SWT; merokok hukumnya haram dan bila ketangkap dicambuk 40 kali dan lain masih banyak lagi. Mula-mula ajaran Wahabi itu diuji-coba kepada penduduk kota Basrah. letapi karena kritiknya terhadap masalah-masalah bid'ah, taqlid dan juga tradisi keagamaan yang berlaku di Basrah cukup pedas dan menyakitkan, maka Wahabi bagaikan menubruk batu karang. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab memilih kembali pulang ke kampung Ayibah.

Namun, perkembangan berikutnya gerakan Wahabi mendapat sokongan cukup berarti dari beberapa pejabat berpengaruh, antara lain: Pangeran Usman bin Mu'amar, Amir Ayinah, Gubernur Dari'ah serta keluarga kerajaan Su'ud (kini Saudi Arabia) yang kemudian mengikat janji dengan Muhammad bin Abdul Wahab untuk bersungguh-sungguh mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Ouran dan Hadist. Segala praktek keagamaan yang tiada diajarkan oleh kedua sumber utama Islam itu, harus dibasmi.

Dengan demikian, gerakan Wahabi telah lahir dalam bentuk negara Wahabi, yakni Arab Saudi yang didirikan oleh Su'ud — murid setia Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian diteruskan oleh Abdul Azis ibnu Saud (1880-1953) yang juga pendukung utama

Wahabi. Ini berarti, paham atau ajaran "Wahabi' harus berlaku dan harus pula ditaati oleh segenap penduduk, bila tidak ingin dituduh sebagai pembangkang. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, paham Wahabi tidak saja diperuntukkan bagi penduduk dalam naungan negara Wahabi saja, tetapi juga diperuntukkan kepada penduduk negara lain yang tidak sepaham. Caranya, mereka dipaksa untuk menerima, dan bila perlu dengan kekerasan.

Selain gerakan Wahabi, ada pula gerakan lain yang beritanya juga sampai ke telinga ummat Islam di Indonesia. Misalnya, gerakan Sayid "Muhammad bin Sanusi (1791-1859) di Al-Jazair. Gerakan ini bermaksud menggerakkan solidaritas Islam melalui ***'Tharekat Sanusiyah'***. Dan juga di Turki, Sultan Abdul Hamid (1725-1789) bergerak menggalang solidaritas melalui gerakan **'Khilafat'** (sistem pemerintahan dipegang seorang khalifah). Tujuannya untuk menggalang potensi dunia Islam guna mengimbangi politik Barat.

Tetapi, dari semua gerakan itu, yang paling berpengaruh dan bahkan populer hingga kini, adalah gerakan **'Pan-Islamisme'** yang dipelopori Sayid Jamaluddin Al-Afghani (1838-1898). Jamaluddin al-Afghani lahir di desa Kanar, Afghanistan, di saat negara itu gelap gulita, kacau balau, akibat penjajahan kolonial Inggris yang sangat tamak. Situasi politik yang sangat kacau itu, agaknya telah membentuk diri Jamaluddin kelak menjadi tokoh pembaharu politik dunia Islam dan sekaligus pembaharu ajaran Islam. Setelah ia menguasai ilmu pengetahuan agama dan umum di suatu perguruan di India, Jamaluddin bergerak dan berusaha

membangunkan aspirasi politik ummat Islam yang sedang lelap melalui pemurnian ajaran Islam.

Pokok-pokok ajaran Jamaluddin tidak banyak berbeda dengan ajaran Wahabi. Ia juga menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist, pintu ijtihad masih terbuka lebar, persatuan ummat Islam masih mutlak perlu, semangat jihad bisa tumbuh bila tauhid dibersihkan dari *takhayul, syirik, khurafat* dan sebangsanya, koloni Barat merupakan bahaya laten bagi negara-negara Islam, dan masih banyak lagi doktrindoktrin yang membakar semangat juang umat Islam.

Dengan ajarannya itu, Jamaluddin tidak henti-hentinya menyerukan kebangkitan Islam untuk melawan Barat. Begitu pula kerikata menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Kairo selalu dekat dengan penguasa Mesir. Ia selalu mendorong bangsa Mesir untuk bangkit melawan Barat. Tapi karena penguasa Inggris selalu mengawasi gerakgerik Jamaluddin, maka (Inggris) segera menghasut boneka Mesir agar mengusir Jamaluddin dari Kairo. Dan benar. Jamaluddin akhirnya menjadi musafir berkelana ke berbagai negara, sampai kemudian ia memilih tempat pembuangan di Paris. Pikirnya, Paris merupakan saraf politik berskala internasional dan global.

Di Paris inilah Jamaluddin bertemu muridnya sewaktu mengajar di Al-Azhar tempo dulu. Dialah **Muhammad Abduh** (1849-1905), lahir di desa Mahilat Nasier termasuk wilayah Mesir. Bersama murid pengagumnya ini, Jamaluddin kemudian menyusun gagasan untuk menerbitkan sebuah mingguan bernama **'Urwat al-Wutsqa**' (hubungan yang tidak dapat

dipecahkan). Ciri utama dari majalah mingguan itu adalah: memberikan informasi kepada ummat Islam mengenai tipu daya kaum imperialis Eropa, dengan maksud menggugah umat Islam untuk segera guna memukul Barat. Namun sayang, majalah ini tidak berumur panjang, hanya sekitar 8 bulan dan baru 18 kali terbit, sudah dibredel penguasa Barat.

Tidak berbeda dengan gurunya, Muhammad Abduh juga mengadakan pembaharuan di segala bidang. Tapi tekanannya bukan pada soal politik, melainkan "pemurnian tauhid". Gerakan Abduh mula-mula mendapat tempat di kalangan kaum muda Mesir. Tapi kemudian dianggap membahayakan pihak penguasa, maka Abduh disingkirkan ke Beirut selama tiga tahun. Kemudian ke Paris bertemu dengan sang guru tadi.

Namun, nasib Muhammad Abduh masih lebih baik dibanding gurunya. Setelah majalahnya dibredel pemerintah Perancis, Abduh diperbolehkan pulang kembali ke Mesir. Sedangkan Jamaluddin pergi mengembara ke Eropa dan terus ke Moskow. Di Mesir, Muhammad Abduh diangkat sebagai 'Mufti Mesir' (jabatan tinggi keagamaan). Ia juga pernah diangkat menjadi anggota Majelis Perwakilan, selain juga berusaha memajukan Al-Azhar. Dengan jabatan itu, Abduh kemudian lebih leluasa bergerak. Tekadnya untuk memurnikan tauhid segera diwujudkan dalam bentuk-bentuk tulisan di majalah ***'Al-Manar'***, yang kemudian dibukukan menjadi ***'Tafsir Al-Manar'***. Selain itu, buah karyanya yang paling menggemparkan dunia Islam adalah ***'Risalatut Tauhid'*.**

Gerak pembaharuan Muhammad Abduh tidak berhenti begitu saja, kendati pada tahun 1905 M ia memenuhi panggilan Tuhan. Muhammad Rasyid Ridla (1865-1935), lahir di desa Kalmun termasuk wilayah Syiria, adalah murid setia Muhammad Abduh. Rasyid berusaha sekuat tenaga menyebarkan pikiran-pikiran Abduh, antara lain dengan cara meningkatkan oplah majalah Al-Manar yang pernah dirintis oleh gurunya. Sebagai penanggung jawab Al-Manar, Rasyid berhasil menyebarkan majalahnya hingga ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri, pada 1905 muncul sebuah organisasi sosial keagamaan dan pendidikan '**Al-Jam'iyat Al Khairiyah**' atau yang lebih dikenal **'Jam'iyat Khair'**, berkedudukan di Jakarta. Meskipun para pendiri organisasi ini terdiri orang-orang Arab di Indonesia, para anggotanya tidak melulu harus keturunan Arab. Siapa saja boleh masuk menjadi anggota asalkan mempunyai kemauan untuk maju dan (tentu saja) beragama Islam. Selain organisasi ini membuka sekolah tingkat dasar dengan kurikulum pengetahuan agama dan umum serta berusaha mengirimkan pemuda-pemuda yang hendak melanjutkan belajar ke Turki, Jamiat Khair juga berusaha mendatangkan buku-buku bacaan, majalah dan tentunya juga surat kabar dari luar negeri khususnya Timur Tengah. Dengan demikian, pengaruh Timur Tengah yang masuk ke Indonesia tidak saja melalui jalur para pelajar atau jama'ah haji saja, tetapi juga melalui jalur organisasi 'Jamiat Khair yang, menurut istilah sekarang, mirip sepeti agen.

Melalui 'Jamiat Khair' inilah seorang tokoh pembaharu kelahiran Yogyakarta, Darwis, atau yang kemudian dikenal dengan nama Kyai Haji Achmad Dachlan (1868-1923), secara teratur mengikuti dan mempelajari buah pikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Sayid Jumaluddin Al-Afghani dan terutama Tafsir Al-Manar Muhammad Abduh. Sungguh pun ia sebenarnya telah mempelajari buah pikiran para reformis itu dalam waktu relatif cukup, terutama saat kepergiannya yang kedua kali (terakhir) ke Makkah pada sekitar 1902, yang memang dimanfaatkan untuk keperluan itu, tetapi KH A Dachlan (tercatat sebagai anggota 'Jamiat Khair' nomor 770) masih juga memeluk dan menimang-nimang Al-Manar secara teratur melalui organisasi 'Jamiat Khair' tersebut.

Agaknya, keikut-sertaan KH A Dachlan dalam Jamiat Khair, cukup brarti bagi usahanya dikemudian hari. Sebab, selain ia bisa mengikuti perkembangan dunia Islam melalui bahan bacaan yang didatangkan Jamiat Khair, juga kemauannya yang keras untuk mengadakan pembaharuan ajaran Islam di Indonesia dapat dengan mudah diketahui oleh seorang guru terkemuka dari Sudan yang, pada Oktober 1911, juga bergabung dengan Jamiat Khair. Dialah Syaikh Ahmad Soorkatti, yang kelak menjadi kawan seperjuangan KH A Dachlan dalam rangka melancarkan faham pembaharuannya. Ahmad Soorkarti sendiri akhirnya teipaksa berpisah dengan Jamiat Khair, hanya karena sebab perselisihan soal **'sayyid'** dan bukan **'sayiyid'** (orang yang harus dihormati karena Jalar keturunannya sampai pada Nabi Muhammad

SAW). Ahmad Soortkatti menentang pembedaan semacam itu. Karena pada dasarnya islam tidak mau membeda-bedakan, kecuali hanya dalam hal taqwa. Syaikh Ahmad Soorkarti (1872-1943) kemudian bergabung ke 'Al-Irsyad' (Jum'iyat al-Islam wal Ersyad an Arabia) sebuah organisasi yang tujuannya lebih menekankan pada kemajuan pendidikan masyarakat keturunan Arab.

Penampilan KH A Dachlan dan Syaikh Ahmad Soorkatti dalam urusan ini, dirasakan amat penting oleh karena keduanya merupakan tokoh utama pembaharuan Islam di Indonesia, yang nantinya akan berhadapan dengan para ulama pesantren pembela paham 'Ahlussunah waljama'ah'. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, para ulama pro mazhab tidak hanya berhadapan dengan KH A Dachlan, Soorkatti dan pengikutnya saja, akan tetapi juga berhadapan dengan tokoh-tokoh dari Persis (Persatuan Islam) sebuah organisasi keagamaan modern sepaham dengan Dachlan dan Soorkatti yang didirikan KH Zam-zam pada September 1923 M, di Bandung. Tokoh **"Persis"** terkemuka adalah A. Hassan yang lebih dikenal Hassan Bandung karena ia merupakan pengasuh utama pesantren "Persis" Bandung sebelum merdeka. '"

Seperti telah dikemukakan, bahwa setelah KH. A. Dachlan mempelajari buah pikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan terutama Tafsir Al-Manar Muhammad Abduh yang kemudian dibukukan oleh Muhammad Ridla, ia berkemauan keras untuk segera bisa mewujudkan dan

melakukan pembaharuan ajaran Islam secara murni di Indonesia. Ia ingin segera mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan Hadist, dan membersihkan praktek-praktek keagamaan yang penuh pelukan *bid'ah, takhayul, khurafat* dan sebangsanya.

Tekad itu kemudian terwujud dalam bentuk organisasi keagamaan "Muhammadiyah" di tahun 1912 M. Sebagai gerakan keagamaan yang diilhami buah pikiran pembaharuan dari Timur Tengah, langkah dan gerak Muhammadiyah tidak banyak berbeda dengan yang terjadi di Semenanjung Arabia. Muhammadiyah ingin secara radikal mengembalikan ajaran Islam pada reel yang sebenarnya, kembali kepada Al-Quran dan Hadist, mengikis habis *bid'ah dan khurafat, takhayul* maupun klenik. Membuka lebar-lebar pintu ijtihad dan membunuh taqlid yang membabi buta dalam kegelapan nalar. Dengan jalan itu, berarti Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan untuk maksud itu, ditempuhlah melalui jalan pendidikan, sosial kemasyarakatan dan dakwah.

Tampilnya Muhammadiyah segera mendapat dukungan dari masyarakat luas. Bahkan beberapa organisasi Islam yang bersifat lokal, segera bersedia melebur diri masuk ke dalam Muhammadiyah.

Perkumpulan-perkumpulan kecil yang melebur diri, antara lain: **Nurul Islam** di Pekalongan, **Al Munir** dan **Siratul Mustaqim** di Makasar, **Al-Hidayah** di Garut, **Sidiq Amanah Tabligh Fathanah** di Sala. Sedangkan perkumpulan lainnya yang berada di

Yogyakarta, seperti **Ihwanul Muslimin, Cahaya Muda, Taqwimuddin, Hambudi Suci, Ghayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Aba', Ta'aawunu 'alalbirri, Wal Fajri, Wal "Ashri,** dalam waktu singkat menjelma menjadi cabang-cabang Muhammadiyah.

Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik, beberapa tokoh utamanya terlibat dalam partai politik Syarikat Islam (SI) pimpinan Tjokroaminoto. Mereka itu, antara lain: KH A Dachlan, KH. Mas Mansur, KH Fachruddin dan masih banyak lagi. Dengan demikian, tokoh-tokoh pembaharu ini akan bertemu dengan ulama tradisi seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. R. Asnawi dan KH. M. Dachlan (Kertosono) dan lain-lain, yang juga aktivis SI. Bisa jadi SI merupakan arena pertarungan antara ulama tradisi berhadapan dengan kelompok pembaharu yang, kala itu, sedang bergairah mengadakan pembaharuan ajaran Islam. .

Perdebatan memang tidak bisa lagi dihindari. Begitu kedua kelompok itu berada di forum pertemuan pengurus SI, sindir menyindir mulai dilancarkan. Sehingga forum rapat atau pertemuan pengurus yang sedianya dipergunakan membahas soal-soal politik, mendadak berubah menjadi perdebatan masalah 'khilafiyah'. Masing-masing kubu saling mengemukakan argumentasinya. Kyai Abdul Wahab Hasbullah sebagai tokoh utama kubu ulama tradisi berhadapan dengan KH. A. Dachlan sebagai tokoh kelompok pembaharu. Sehingga, perkembangan dan perjalanan SI berikutnya, selain diwarnai semangat membangun nasionalisme

bangsa, juga diliputi semangat bertengkar seputar masalah 'khilafiyah furu'iyah'.

Pertengkaran kedua kubu semakin hari semakin bertambah panas. Tidak lagi terbatas hanya dalam forum pertemuan SI saja, tetapi telah berkembang jauh sampai ke berbagai acara di daerah. Malahan, ada yang membentuk panitia khusus untuk menangani acara perdebatan semalam suntuk, dengan menampilkan tokoh-tokoh dari kedua kubu yang saling serang. Dan uniknya, perdebatan itu senantiasa digelar terbuka untuk umum, dengan istilah khas **"Openbaar Debat'** atau **"Openbaar Vergadering".**

Contoh menarik dari perdebatan antara ulama tradisi dan kelompok pembaharu, adalah peristiwa "OpenbaarV ergadering" yang terjadi pada 31 Mei 1936 di Gebang, Jawa Barat. Kelompok pembaharu diwakili tokoh-tokoh dari "Persis dan Al-Irsyad kontra ulama tradisi dari Nahdlatul Ulama. Pihak "Persis dan Al-Irsyad" diwakili tokoh utama A. Hassan, sedangkan pihak NU Ciledug diwakili Masduqi, H. Abul Khair dan Awad Basir. Perdebatan ini dibuka pada pukul 09.00 pagi hingga sore hari. Hadir dalam perdebatan itu, para tokoh dari kedua belah pihak serta para pendukungnya. Dan tidak ketinggalan para petugas keamanan, pejabat agama serta pembesar setempat. Perdebaran ini pun kemudian dilanjutkan lagi dengan penuh fanatisme, seperti yang terjadi di Cirebon, 27-28 Juni 1936.

Masalah-masalah yang diperdebatkan dalam "Openbaar Vergadering" — yang juga diperdebatkan di berbagai daerah — tiada lain adalah masalah "khilafiyah",

seperti soal taqlid, haram tidaknya makan dirumah orang yang sedang tertimpa kematian, sedekah untuk mayit, ushalli (bacaan pengantar sebelum melakukan shalat), talqin untuk mayit dan lain sebagainya. Meski masalah yang diperdebatkan bukan masalah pokok, dan kedua pihak pun mempertahankan argumentasinya berdasar Al-Qur'an dan Hadist, tetapi karena kedua pihak saling mau menangnya sendiri, maka, tidak jarang suasana perdebatan diwarnai perasaan emosional pendukung kedua belah pihak. Sehingga tidak heran, bila dalam kasus perdebatan di tempat diberitakan berubah menjadi arena pertarungan fisik.

Perdebatan semakin hari bertambah meledak bak dua kekuatan yang saling siap menyerang. Tentu saja, bila suasana macam itu dibiarkan, tentu akan merugikan kekuatan Islam itu sendiri. Sebenarnya usaha untuk mengurangi ketegangan sudah dilakukan sejak seorang pemuka SI Cirebon, Bratanata membentuk "Al-Islam Kongres". Forum berskala nasional ini sengaja diproyeksikan bagi mengurangi ketegangan dan bahaya perselisihan masalah khilafiyah, serta mengusahakan tercapainya persatuan aliran dalam Islam.

Untuk keperluan itu, maka diadakan "Kongres Al-Islam" pertama pada 1921 di Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini dipimpin langsung oleh H.O.S Tjokroaminoto dan dibantu H. Agus Salim. Namun, ternyata, suasana Kongres pun semakin panas karena terjadi perdebatan sengit antara Muhammadiyah dengan Al-Irsyad diwakili Ahmad Soorkatti dan ulama tradisi yang diwakili KH. Wahab Hasbulah serta KH. R. Asnawi

dari Kudus. Baik Muhammadiyah maupun Al-Irsyad mengecam mazhab sebagai penyebab lumpuh dan bekunya ummat Islam, tetapi kemudian KH. Wahab menuduh Muhammadiyah dan Al-Irsyad mau bikin mazhab sendiri dengan cara menafsirkan Al-Qur'an sesuka akalnya. Kongres Al-Islam pertama ini kurang bermanfaat bagi menunjang maksud diadakannya kongres itu sendiri, yakni mempersatukan aliran dalam Islam dan mengurangi ketegangan perselisihan masalah khilafiyah.

Namun demikian, Kongres masih juga berhasil membuat keputusan penting, yakni membentuk "Centraal Comite Al-Islam" (CCI) — suatu penitia khusus untuk menangani soal khilafiyah yang anggotanya terdiri dari berbagai kelompok. Kemudian dipilih seorang ketua untuk menangani soal itu adalah "Soeroso", pemuka SI Garut. Bisa dimengerti, karena SI memang punya kepentingan dalam pembentukan "Kongres Al-Islam" —juga kemudian CCI — karena organisasi ini sedang mencari iklim baru setelah mengalami kemunduran akibat kekacauan dalam tubuhnya.

Selanjutnya, "Kongres Al-Islam" yang kedua digelar di Garut, Jawa Barat (1922). Kongres bertujuan membahas aturan main (anggaran dasar) CCI. Pimpinan Kongres dipegang H. Agus Salim dan seorang - lagi dari Muhammadiyah. Namun, dalam Kongres kedua ini, pihak tradisi yang biasanya diwakili KH. Wahab Hasbullah, tidak hadir. Sehingga kelompok pembaharu lebih bisa bergerak leluasa dan semakin mendapat pengaruhkhususnya dalam forum kongres tersebut.

Tidak hadirnya kelompok tradisi dalam Kongres Al-Islam kedua, bukan berarti menurunkan ketegangan di antara kedua belah pihak. Perdebatan terus saja berlangsung dan bahkan meningkat dengan segala fanatismenya. Bisa dimengerti, karena pada saat itu, berbagai macam berita dari Timur Tengah, baik mengenai perkembangan politik kekhilafahan maupun pembaharuan ajaran Islam, tidak henti-hentinya masuk dan membakar semangat kedua kelompok yang saling "bermusuhan" itu. Sehingga, meski sudah dibentuk "Al-Islam" Kongres dan dilengkapi pula dengan CCI, suasana perdebatan masih saja meruncing. Ini menandakan bahwa "Al-Islam Kongres" maupun CCI gagal membawakan misinya.

Sementara itu, suasana politik di Timur Tengah mulai memanas, dipicu oleh peristiwa diusirnya Andul Majid dari ke-Khalifahan Turki. Seperti ditulis Amelz dalam bukunya berjudul: "H.O.S Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya", bahwa pada 1922 setelah kedudukan Mustafa Kemal Pasya di Angora mantap, maka Khalifah Wahiduddin (Muhammad VI) diusir dari Istambul dan diganti Khalifah baru, Abdul Majid. Tapi Abdul Majid tidak ubahnya hanya sebagai boneka Mustafa. Cuma ia rajin mengadakan hubungan rahasia dengan tokoh dam negarawan di luar negeri. Hubungan rahasia itu kemudian diketahui oleh Mustafa, maka diusirlah Abdul Majid dari kekhalifahan Turki itu. Peristiwa pengusiran Khalifah inilah yang kemudian menggemparkan dunia Islam, karena masih banyak negara-negara Islam lainnya yang memandang perlu

adanya Khalifah sekalipun hanya sebagai simbol atau boneka seperti yang dialami Abdul Majid tadi.

Dalam kondisi krisis semacam itu, Syarief Husen, Raja Hijaz kelihatan sangat ambisius untuk menjadikan dirinya sebagai Khalifah. Husen yang penguasa Hijaz (Makkah) itu memang sejak Perang Dunia I menghendaki terciptanya sebuah kerajaan Arab modern dan melepaskan hubungan dengan kesultanan Turki. Ia sangat mengharapkan timbulnya kembali Khalifah berpusat di Makkah, dan ia sendiri yang menjadi Sultannya. Karena itu, pada 1920 setelah ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Khalifah kaum muslimin dan setelah putranya, Faisal, diangkat menjadi Raja mula-mula di Syria dan kemudian di Irak, serta puteranya yang lain, Abdullah, diangkat menjadi Raja di Transyordania, kelihatannya memang lebih berhasil dibanding dengan usaha yang sama dari raja-raja Mesir sebelumnya.

Namun, perkembangan usaha Husen berikutnya terlihat seperti untuk menbicarakan soal kekhalifahan dengan beranggotakan beberapa organisasi Islam. SI menunjuk W. Wondosoedirjo (W. Wondoamiseno) mewakili SI dalam rapat pembentukan "Central Comite Chilafar" (CCC) tersebut. Dan ternyata W. Wondoamiseno terpilih sebagai ketua CCC itu.

Segera setelah CCC terbentuk, pada 24-26 Desember 1924 diadakan "Kongres Al-Islam" di Surabaya. Kongres, selain membicarakan soal utusan yang akan dikirim ke "Muktamar Dunia Islam" di Kairo, juga memutuskan dua hal penting, pertama, masalah Khilafat harus dipegang "Majelis Ulama" dan berpusat di

Makkah. Kedua, utusan yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam adalah KH. Fabhruddin (Muhammdiyah), Surjopranoto (Syarikat Islam) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (Ketua Perkumpulan agama di Surabaya). Selain itu, ada dua nama lagi yang disebut sebagai utusan, yakni Tjokroaminoto dan Ahmad Soorkatti.

Tetapi, karena situasi sosial politik di Mesir mendadak berubah, karena Sudan tidak mau dipisah dengan Mesir, dan kemudian lebih memburuk lagi dengan terbunuhnya Gubernur Inggris untuk Sudan serta pengunduran diri Perdana Menteri Sa'ad Zaglul Pasja, maka "Mukramar Dunia Islam" yang sedianya dilangsungkan pada Maret 1925, terpaksa ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan demikian, para utusan yang diputuskan dalam kongres CCC batal berangkat.

Meski gagal berangkat, pembicaraan mengenai soal "khilafat' semakin bertambah gencar. Berita pergolakan Timur Tengah antara Ibnu Saud melawan Syarief Husen, senantiasa menjadi bahan diskusi para tokoh Islam di dalam CCC maupun SI dan juga Muhammdiyah. Kemenangan Ibnu Sa'ud telah banyak mereka duga bahwa tidak lama lagi akan dipermaklumkan. Dan itu berarti datangnya masa kejayaan paham Wahabi.

Ternyata, memang, Syarief Husen tidak lebih unggul dari Ibnu Saud. Pertahannya-semakin hari semakin mengendor, hingga satu persatu kota-kota perlindungannya jatuh ke tangan lascar Wahabi. Akhirnya, pada 1924 Syarief Husen dengan perasaan kesal meninggalkan Hijaz terlalu dini. Sebab, ketika itu

Libanon dan Syria masih berada dalam mandat Perancis, sedangkan Palestina dan Irak berada dalam kekuasaan Inggris. Kondisi seperti itu agaknya tidak dipertimbangkan oleh Husen. Ja hanya tngin secepatnya menyatakan diri sebagai Khalifah kaum muslim atau raja dari orang Arab.

Di pihak lain, Ibnu Sa'ud penguasa Najed memandang Husen tidak beres dan terlalu congkak. Dia dinilai hanya mementingkan diri sendiri tetapi tidak mementingkan kemerdekaan dan persatuan Arab. Selain itu, Syarief Husen, juga dianggap sebagai penghalang gerakan pembaharuan Wahabi dan raja yang justru membiarkan ajaran Islam dipeluk oleh keburukan bid'ah. Maka niat dan tekad Ibnu Saud — pendukung setia Wahabi yang sangat konservatif dan taat beragama untuk menyerang Syarief Husen, tumbuh dan berkobar seketika. Keinginannya untuk mengusir Syarief Husen dari tahta Kerajaan Makkah begitu kuat, hingga terjadi pertempuran sengit antara tentara Ibnu Sa'ud melawan tentara Syarief Husen.

Di saat berkecamuknya perang antara Najed dan Hijaz itu, para ulama Al-Azhar pun tidak tinggal diam. Mereka juga menginginkan kembalinya zaman kemegahan Khalifah bani Abbas tempo dulu. Keinginann para ulama ini disambut baik oleh Perdana Menteri Saad ZaglulPasja, hingga kemudian ia menghadap Raja Mesir, Fuad, untuk menawarkan rencana ulama Azhar dan meminta kesediaan Fu'ad sebagai. Khalifah. Tetapi Fu'ad bukan seperti Husen yang ambisius. Tawaran itu ditanggapinya secara dingin. Kemudian Fu'ad

memberikan saran agar mengadakan "Muktamar Dunia Islam' untuk membicarakan soal Khilafatsistem pemerintahan yang dipegang seorang Khalifah. Saran itu dirasakan cukup bijaksana sehingga perlu segera mengundang pemimpin-pemimpin. Islam seluruh dunia guna membicarakn soal Khilafat tersebut. Maka direncanakan pula "Muktamar Dunia Islam' ini pada Maret 1925 di Kairo. Dan undangan untuk itu segera dikirim ke seluruh dunia, termasuk juga ke CCI di Indonesia.

Namun, karena kondisi CCI yang dari semula belum mantap akibat pertikaian khilafiyah, maka, atas prakarsa SI, pada 1924 di Surabaya, dibentuk **"Central Comite Chilafat"** — semacam panitia khusus untuk menbicarakan soal kekhalifahan dengan beranggotakan beberapa organisasi Islam. SI menunjuk W. Wondosoedirjo (W. Wondoamiseno) mewakili SI dalam rapat pembentukan "Central Comite Chilafat" (CCC) tersebut. Dan ternyata W, Wondoamiseno terpilih sebagai ketua CCC Itu.

Segera setelah CCC terbentuk, pada 24-26 Desember 1924 diadakan "Kongres Al-Islam" di Surabaya. Kongres, selain membicarakan Soal utusan yang akan dikirim ke "Muktamar Dunia Islam" di Kairo, juga memutuskan dua hal penting, pertama, masalah Khilafat harus dipegang "Majelis Ulama" dan berpusat di Makkah. Kedua, utusan yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam adalah KH. Fabhruddin (Muhammdiyah), Surjopranoto (Syarikat Islam) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (Ketua Perkumpulan agama di Surabaya).

Selain itu, ada dua nama lagi yang disebut sebagai utusan, yakni Tjokroaminoto dan Ahmad Soorkatti.

Tetapi, karena situasi sosial politik di Mesir mendadak berubah, karena Sudan tidak mau dipisah dengan Mesir, dan kemudian lebih memburuk lagi dengan terbunuhnya Gubernur Inggris untuk Sudan serta pengunduran diri Perdana Menteri Sa'adZaglulPasja, maka "Muktamar Dunia Islam' yang sedianya dilangsungkan pada Maret 1925, terpaksa ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan demikian, para utusan yang diputuskan dalam kongres CCC batal berangkat.

Meski gagal berangkat, pembigaraan mengenai soal "khilafar semakin bertambah gencar. Berita pergolakan Timur Tengah antara Ibnu Saud melawan Syarief Husen, senantiasa menjadi bahan diskusi para tokoh Islam di dalam CCC maupun SI dan juga Muhammdjyah. Kemenangan Ibnu Saud telah banyak mereka duga bahwa tidak lama Jagi akan dipermaklumkan. Dan itu berarti datangnya masa kejayaan paham Wahabi.

Ternyata, memang, Syarief Husen tidak lebih unggul dari Ibnu Sa'ud. Pertahannya semakin hari semakin mengendor, hingga satu persatu kota-kota perlindungannya jatuh ke tangan lasykarWahabi. Akhirnya, pada 1924 Syarief Husen dengan perasaan kesal meninggalkan Hijazmenuju kepulauan Cyprus. Mengasingkan diri.

Syarief Ali (putera Syarief Husen) mencoba menggantikan ayahnya bertahan. Ia segera menyusun kekuatari-dan membentuk kota-kota pertahanan baru.

Tapi lasykarWahabi tidak kalah cerdiknya. Semua kota pertahanan, mereka kepung hingga tinggal satu-satunya pertahanan di pelabuhan Jeddah. Dan pelabuhan Jeddah pun akhirnya terkepung juga. Tidak ada jalan lain bagi Syarief Ali, kecuali menyerah kalah. Dan pada 1925 Syarief Ali menyerah tanpa syarat. Tercapailah ambisi Ibnu Saud. untuk mempersatukan Jazirah Arab di bawah satu kekuasaannya.

Sebetulnya, Ibnu Sa'ud sudah optimistis akan menang ketika Husen mulai meinggalkanHijaz. Karena itu, sebelum Syarief Ali jatuh, Ibnu Sa'ud telah mempermaklumkan rencananya ke seluruh dunia Islam, bahwa ia akan mengadakan "Muktamar Dunia Isalam guna membicarakan tanah Hijaz yang sedang direbut itu, pada sekitar Juni 1926. Undangan untuk muktamar itu pun kemudian disebar ke seluruh dunia Islamtermasuk CCC di Indonesia, menjelang detik-detik terakhir jatuhnya Syarief Ali.

Bersamaan dengan berita kemenangan Ibnu Saud, datang pula berita mencemaskan bagi para ulama tradisi terutama KH. Abdul Wahab Hasbullah. Berita-berita tentang perombakan total praktek-praktek keagamaan, larangan bermazhab, larangan ziarah ke makam-makam pahlawan Islam, larangan merokok dan melarang cara beribadah haji berdasarkan mazhab dan sebagainya. Berita ini terdengar begitu santer di kalangan ulama mazhab. Terlebih lagi tentang tanah Hijaz yang diberitakan hanya aman bagi para pendukung paham Wahabi, dan sebaliknya mengancam keselamatan jiwa pengikut mazhab, benar-benar membuat merah telinga

para ulama pesantren yang, ketika itu, diwakili KH. Abdul Wahab Hasbullah.

Sebagai contoh, misalnya, berita yang dimuat di surat kabar Pewarta Surabaya, edisi 28 Juli 1927, memberitakan bahwa KH. Muhtar di Makkah, pada suatu hari mengadakan perkumpulan (pertemuan) dengan para jama'ahnya. Dalam pertemuan itu, ternyata, ada seorang anggota Al-Irsyad bernama Ahmad Syukri asal Betawi. Syukri kemudian bertanya kepada KH. Muhtar mengenai hukumnya 'talaffudz binniyat' (baca ushalli menjelang shalat). KH. Muhtar kemudian menjawab Sunnah seperti halnya diterangkan di berbagai kitab para mazhab, antara lain, "kitab Tuhfah". Atas jawaban itu, Syukri kemudian melapor ke pihak yang berwajib (penguasa baru Hijaz). Akhirnya KH. Muhtar diadili dan Mahkamah Makkah memutuskan KH. Muhtar dijatuhi hukuman mati atau boleh pilih hukuman 'persona non grata' diusir dari tanah Makkah (Hijaz). Namun, berkat usaha KH. Mas Bakir — seorang ulama asal Yogyakarta yang berpengaruh besar baik di kalangan ulama Makkah maupun di kalangan kerajaan, dengan cara meminta ampunan kepada . Raja Sa'ud, maka kesalahan KH. Muhtar diampuni dan hukuman - dibatalkan.

Tetapi lain lagi dengan berita yang dimuar di "Swara Nahdlatoel Oelama", edisi no.2 tahun 1 Shafar 1346 H, memberitakan tentang keadaan tanah Hijaz berdasarkan surat yang dikirim oleh KH. Raden Adnan di Makkah kepada KH. Raden Muhammad Ridwan di Sala. Surat itu tertanggal 7 Syawal 1345 H. yang berbunyi, antara lain, sebagai berikut: Keadaan perjalanan jama'ah

di Makkah, aman. Empat mazhab tetap berjalan hanya pengaturan jama'ah di Masjidil haram mengalami perubahan: Subuh untuk Iman yang mengikuti mazhab Imam Hambali, Dzuhur Imam Hanafi, "Ashar Imam Syafi'i, dan Maghrib Imam Maliki. Sedangkan shalat Isya dan Tarwih (shalat sunnah di malam bulan puasa) bergantian imam. Shalat Tarwih di Masjidil haram tetap 20 raka'at dengan 10 salam, Wirit juga tetap 3 raka'at. Bacaan tadzkir, tarhim dan taslim tidak ada. Bacaan Al-Qur'an menjelang shalat Jum'at tidak ada. Demikian pula bacaan Shalawat Nabi di antara dua khutbah ditiadakan. Ziarah kubur, boleh, asal jangan berdo'a dengan mengangkat tangan. Membaca dala-il khairat juga masih diperbolehkan.

Lain pula dengan berita yang dimuat surat kabar "Bintang Timoer'", terbitan 23 Juli 1927, memberitahukan: Bahwa tanah Makkah aman hanya bagi pengikut dan pendukung paham Ibnu Saud (Wahabi). Sebaliknya, tidak aman dan senantiasa mengancam keselamatan jiwa bagi para penganut mazhab. Pernah ada seorang dipukul popor bedil hanya karena melagukan 'yalail-yalail'. Pernah ada orang dipukuli gara-gara merokok. Tidak sedikit orang dihajar polisi karena berdo'a sambil mengangkat tangan di kuburan (makam). Sedangkan, mengenai rusaknya kubah-kubah masjid dan kuburan-kuburan (makam) di Mala di Jabal Gabais dan di tempat-tempat lain, tidak perlu diceritakan lagi. Semuanya rusak dan hancur.

Meski berita-berita itu belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan barangkali masih perlu

dilihat dengan mata kepala sendiri, tetapi bila dilihat dari pribadi Ibnu S2'ud yang pendukung setia Wahabi, maka berita-berita tersebut bisa diterima oleh para ulama pemegang teguh mazhab yang diwakili KH. Wahab Hasbullah.

Oleh sebab itu, ketika CCC yang dipimpin W. Wondoamiseno menyelenggarakan "Kongres Al-Islam" yang keempat pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta—Kongres ini bersamaan waktu dan tempatnya . dengan Kongres SI — KH Abdul Wahab Hasbullah buru-buru menyampaikan pendapatnya mengenai rencana diadakannya "Muktamar Alam Islami" (Muktamar Dunia Islam) di Makkah. Meski Kongres CCC belum menyinggung persoalan tersebut, karena memang belum tahu persis kapan Muktamar itu dilangsungkan. KH. Abdul Wahab Hasbullah meinta agar usulnya menjadi catatan kongres. Usul Kyai Wahab, antara lain, delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Sa'ud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetapedipertahankan dan diberikan kebebasan.

Beberapa saat setelah Kongres, datanglah maklumat (undangan) Raja Ibnu Saud untuk mengikuti Muktamar Alam Islami di Makkah yang rencananya dilangsungkan pada bulan Juni 1926. Segera CCC berbenah lagi guna membahas utusan maupun konsep yang hendak dibawa ke Muktamar tersebut. Tidak lama setelah menerima undangan, CCC kemudian sepakat

mengadakan "Kongres Al-Islam kelima, Pebruari 1926, di Bandung.

Jauh sebelum Kongres Bandung, Kyai Wahab kembali menyampaikan pendapatnyasebagaimana pernah disampaikan ketika Kongres di Yogyakarta. Kepada para tokoh CCC di Surabaya seperti W. Wondoamiseno, KH. Mas Mansur maupun H.O.S Tjokroaminoto, Kyai Wahab meminta agar delegasi nanti betul-betul mau mendesak Raja Ibnu Sa'ud untuk memberlakukan kebebasan bermazhab di tanah Hijaz.

Para pemuka CCC, agaknya, tidak begitu menghiraukan usul Kyai Wahab. Malah mungkin, mereka telah bersepakat untuk mendukung paham Wahabi berlaku di Hijaz. Kesan ini dirasakan oleh Kyai Wahab, beberapa waktu, sebelum Kongres Bandung. Karena itu, mudah dimengerti apabila Kyai Wahab kemudian bersiap-siap untuk membentuk panitia tersendiri guna memperjuangkan missinya, yakni mempertahankan paham Ahlussunahwaljama'ah tetap berlaku di tanah Hijaz.

Kyai Wahab telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan para tokoh CCC, guna membicarakan pendiriannya itu. Tetapi, setiap setiap usaha pendekatan selalu berakhir dengan kekecewaan. Karena itu, wajar jika kemudian Kyai Wahab membentuk panitia terseniri yang kemudian dikenal dengan "Komite Hijaz. Pembentukan Komite Hijaz (Januari 1926) ini, tentu saja setelah medapat izin dari KH. Hasyim 'Asy'ari. Adapun komposisinya, sbb:

Penasehat : KH. Abdul Wahab Hasbullah

KH. Masyhuri (Lasem)
KH. Khalil (Lasem)

Ketua : KH. Hasan Gipo
Wakil Ketua : H. Shaleh Syamil
Sekretaris : Muhammad Shadig
Pembantu : KH. Abdul Halim.

Tugas utama panitia ini adalah mempersiapkan pengiriman delegasi ke Muktamar di Makkah, dan menghubungi para ulama terkemuka di seluruh Jawa dan Madura. Meski telah membentuk Komite Hijaz, Kyai Wahab masih berkeinginan untuk bisa mengikuti Kongres Al-Islam di Bandung, awal Pebruari 1926.

Tetapi, karena takdir telah menentukan lain, Kyai Wahab tidak bisa hadir. Kyai Wahab pun menyerah apa kata takdir. Sebab beberapa hari menjelang Kongres, Kyai Hasbullah (ayah Kyai Wahab) tiba-tiba sakit keras. Kyai Wahab terpaksa memutuskan untuk tidak mengikuti Kongres, tapi mengirim surat kepada ketua CCC yang isinya: meminta Apar pendiriannya tentang perlunya mendesak Raja Ibnu Sa'ud agar m lindungi dan memberikan kebebasan bermazhab, dimasukkan dalam keputusan Kongres. Dan seperti kata takdir, ketika Kongres kelima di Bandung dimulai, Kyai Haji Hasbullah pulang ke rahmatullah.

Tentu saja, dengan tidak hadirnya Kyai Wahab Hasbullah dalam Kongres di Bandung, perjalanan Kongres semakin mulus dan tidak lagi ada perdebatan soal mazhab maupun khilafiyah. Atau, mungkin juga ada, tetapi tidak seberat yang dikemukakan Kyai Wahab. Sehingga, para tokoh CCC seperti W. Wondoamiseno,

Tjokroaminoto, KH. Man Mansur dan lain-lain, yang sejak semula memang lebih condong kepada Ibnu Sa'ud, merasa lebih mudah untuk merumuskan konsep yang hendak dibawa ke Muktamar Makkah.

Amelz dalam "H.O.S. Tjokroaminoto hidup dan Perjuangannya", juga tidak menjelaskan menganai konsep yang akan dibawa delegasi CCC yang telah diputuskan dalam Kongres Al-Islam Bandung. Tetapi 11 menulis panjang lebar tentang perutusan yang akan dikirim sebagai mandat Kongres. Bisa diperkirakan bahwa konsep yang hendak dibawa kc Muktamar tidak begitu penting, kecuali hanya dukungan kepada Raja Ibnu Saud dan pemberian informasi mengenai perkembangan gerakan keagamaan maupun politik di Indonesia di mata dunia Islam. Soal mazhab, ziarah kubur, tarawih dan lain sebagainya tidak perlu dibicarakan. Sebab, menurut mereka, soal-soal khilafiyah seperti itu adalah urusan intern Raja Sa'ud. Bukan urusan CCC.

Kongres memilih HS Jokroaminoto dan KH. Mas Mansur sebagai wakil presiden. Dua delegasi itu harus berangkat ke Makkah pada 2 Maret 1926 dengan kapal "Rondo" dari pelabuhan Tanjung Merak Surabaya. Namun, H.M. Soedja' dari Muhammadiyah, H. Abdullah Ahmad dari Sumatera Barat, dan H. Abdul Karim Amrullah dari PGAI: Persatuan Guru Agama Islam juga ikut berangkat. Kongres Al Islam ke enam diadakan segera di Surabaya, September 1926, setelah mereka kembali ke tanah air. Laporan delegasi dan pembagian kesan selama Muktamar Dunia Islam adalah acara utamanya. Salah satu keputusan penting yang dibuat oleh

Kongres keenam adalah perubahan Centraal Comite Chilafat (CCC) menjadi MAIHS (Muktamar Alam Islami Far'ul Hindis Syarqiyah), sebuah cabang dari Mukramar Alam Islami di Makkah.

Hubungan KH. Wahab Hasbullah dengan CCC secara resmi sudah pudar, semenjak beliau tidak hadir di Kongres Bandung. Tetapi, jauh sebelum Kongres, Kyai Wahab sudah merencanakan membentuk panitia tersediri: "Komite Hijaz". Ini berarti, tindakan Kyai Wahab sudah diperhitungkan segala aspeknya, semenjak usul-usulnya kurang mendapat perhatian para tokoh di CCC. Seperti telah disinggung, Kyai Wahab mengusulkan agar delegasi mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi dan memberi kebebasan bermazhab.

Perhitungan telah selesai dan izin dari KH. Hasyim Asy'ari telah diterima. Pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang para ulama terkenal (nama-namanya dapat ditemukan di catatan kaki no. 1 bab ini) untuk berbicara tentang utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Makkah. Para ulama ini datang ke Kertopaten-Surabaya, tempat pertemuan, dan bersepakat untuk menunjuk KH. Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Setelah KH. Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa dan institusi mana yang berhak mengirimkannya. Jam'iyyah Nahdlatul Ulama didirikan atas usul KH. Mas Alwi pada 16 Rajab 1344 H, 31 Januari 1926 M.

Setelah lembaga pemberi mandat terbentuk, agenda pembicaraan diteruskan pada soal materi permasalahan yang hendak dimandatkan kepada delegasi.

Materi pokok yang hendak disampaikan langsung ke hadapan Raja Ibnu Saud (tanpa melalui forum Muktamar, karena delegasi Indonesia di Muktamar Dunia Islam sudah diwakili tokoh-tokoh dari CCC) adalah sebagai berikut: 1) Meminta kepada Raja Ibnu Sa'ud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, 2) Memohon tetap diramaikannya tempat tempat bersejarah karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid #cperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizuran dan lainlain. 3) Mohon agar disebar luaskan ke seluruh duniz setiap tahun scbelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihawal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Makkah maupun tentang Syekh: 4) Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut, dan 5) Jam'iyyah NU mohon jiwaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Sa'ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut.

Uraian di atas memberikan kesan kuat bahwa lahirnya NU adalah karena dorongan untuk mempertahankan kebebasan menganut salah satu dari empat mazhab, yakni Imam Muhammad bin Isris Asy-Syaf'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu hanifah An Nu'man dan Imam Ahmad bin Hambali. Keempat mazhab itu lebih dikenal sebagai mazhab Ahlussunah waljama'ah. Dengan demikian, motivasi lahirnya NU, selain membangun nasionalisme adalah juga untuk mempertahankan mazhab Ahlussunah waljama'ah. Sudah

tentu, sejauh pengertian Ahlussunah waljama'ah yang berlaku di kalangan NU.

Selain itu, sikap mempertahankan mazhab Ahlussunah waljama'ah tersebut, ternyara, tidak diperuntukkan bagi Muhammadiyah, Al-Irsyad maupun "Persis". Tetapi justru ditujukan kepada Raja Ibnu Sa'ud, penguasa baru Hijaz, yang terkenal sebagai pendukung setia paham wahabi. Ini berarti, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa lahirnya NU merupakan 'reaksi' dari orgnanisasi modern Muhammadiyah, Al Irsyad apalagi "Persis". Sebab , sampai saat ini belum diketemukan suatu bukti yang mampu menjelaskan bahwa NU telah melihat ketiga organisasi keagamaan yang lebih dikenal sebagai kelompok pembaharu itu, telah melakukan 'aksi'.

Juga tidak beralasan untuk mengatakan, bahwa lahirnya NU disebabkan karena ditolaknya usul KH. Abdul Wahab Hasbullah oleh Kongres Al-Islam kelima di Bandung. Sebab, Kongres itu sendiri tidak diikuti oleh Kyai Wahab. Lagi pula, sebelum Kongres kelima di Bandung, Pebruari 1926, NU sudah lahir.

Jadi, untuk mengetahui kapan tepatnya organisasi ulama itu akan didirikan, tampaknya kita harus mendengarkan pernyataan Kyai Wahab Hasbullah, yang diucapkan beberapa saat sebelum pendirian NU, sebagai berikut: "Saya sudah sepuluh tahun memikirkan membela para ulama (mazhab) yang diejek sana-sini dan amnaliyahnya diserang sana-sini." Jika ini tidak berhasil, saya akan memilih untuk pergi ke kampung halaman dan menjaga pondok secara khusus atau bergabung dengan organisasi bentrokan.

Penegasan Kyai Wahab itu menunjukkan bahwa rencana untuk mendirikan organisasi pembela mazhab Ahlussunahwaljama'ah, sebetulnya sudah lama ada dicetuskan. Setidaknya sejak pengaruh pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab mulai masuk ke Indonesia —sekitar awal abad XX. Tetapi, karena rencana itu belum mendapat persetujuan KH. Hasyim Asy'ari, selama itu pula belum bisa diwujudkan.

Dan begitu mendapat izin, Kyai Wahab langsung membentuk Komite Hijaz, dan selanjutnya mengumpulkan para ulama untuk melahirkan NU. Ini berarti, kemenangan Ibnu Saud atas tanah Hijaz, juga merupakan faktor pemercepat lahirnya NU, yang sejak semula memang bermaksud mempertahankan paham Ahlussunahwaljama'ah dari serangan Wahabi (Hamdi, 2021).

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KOMISARIAT SEPULUH NOPEMBER

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA – JAWA TIMUR – INDONESIA

https://pmii1011.github.io/

BAB V
EKSISTENSI NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sejak Nahdlatul Ulama bediri hingga zaman reformasi ini selalu tetap mempunyai tekad untuk menjaga keutuhan kesatuan negara republik Indonesia. Berikut ini eksistensi Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuha negara Indonesia:

A. Masa Perintisan Nahdlatul Ulama

Masa perintisan jam'iyyah NU pada mulanya adalah Komite Hijaz. Ketika komite ini sepakat untuk mengirimkan utusan ke Muktamar Islam di Makkah, sehingga timbul sebuah pemikiran untuk membentuk jam'iyyah sebagai insitusi yang berhak mengutus delegasi tersebut. Maka atas usulan KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz, jam'iyyah tersebut diberi nama "Nahdlatul Ulama.

Pada saat itu juga konsep "Anggaran Dasar" yang sudah disiapkan dan disetujui bersama. Tahap berikutnya, membentuk pengurus lengkap terdiri dari Syuriyah (Dewan Ulama semacam Legislatif) dan Tanfidziyah (Badan Pelaksana semacam Eksekurif). Adapun susunan lengkap pengurus NU periode 1926, sebagai berikut:

SYURIYAH:

RaisAkbar	:	KH. Hasyim Asyaari Jombang
Wakil Rais	:	KH. A. Dachlan Achyat Kebondalem Surabaya
Katib:	:	KH. Abdul Wahab Hasbullah Kertopaten Surabaya
Naibul Katib	:	KH. Abdul Halim Surabaya
Awan	:	KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya
		KH. Ridwan Abdullah Surabaya
		KH. Amin Abdus Syukur Surabaya
		KH. Amin (Praban) Surabaya
		KH. Sa'id Surabaya
		KH. Nahrawi Thahir Surabaya
		KH. Hasbullah (Plampitan) Surabaya
		KH. Syarif Surabaya
		KH. Yasin Surabaya
		KH. Nawawi Amin Surabaya
		KH. Bishri Syansuri Jombang
		KH. Abdul Hamid Jombang
		KH. Abdullah Ubaid Surabaya
		KH. Dahlan Abdul Kahar Mojokerto
		K. Abdul Majid Surabaya
		KH. Masyhuri Lasem

MUSTASYAR:

KH. Moh. Zubair Gresik

KH. Raden Munthaha Madura
KH. Mas Nawawi Pasuruan
KH. Ridwan Mujahid Semarang
KH. R. Asnawi Kudus
KH. Hambali Kudus
Syekh Ahmad Ghanaim Surabaya (asal Mesir)

TANFIDZIYAH:

Ketua	:	KH. Hasan Gipo Surabaya
Wakil Ketua	:	H. Saleh Syamil Surabaya
Sekretaris	:	Moh. Shadig (Sugeng) Surabaya
Wakil Sekretaris	:	H. Nawawi Surabaya
Bendahara	:	H. Muhammad Burhan Surabaya H. Jafar Surabaya

KOMISARIS:
K. Nahrawi Surabaya
K.-Ahzab Surabaya
K. Usman Surabaya
M. Saleh Surabaya
Abdul Hakim Surabaya
Usman (Ampel) Surabaya
K. Zein Surabaya
H. Dahlan (Bubutan) Surabaya
H. Ghazali Surabaya
H. Sidik Surabaya
Muhammad Mangun Surabaya
H. Abdul Kahar (Penasehat Tanfidziyah) Surabaya
H. Ibrahim (PenasehatTanfidziyah) Surabaya
Sumber: Antologi NU

Setalah pengurus lengkap terbetuk, giliran selanjutnya masalah lambang (simbol). Masalah simbol ini dipercayakan kepada KH. Ridwan Abdullah. Lambang NU bergambar 'bola dunia' dilingkari seutas tampar dan sembilan bintang, diciptakan oleh Kyai Ridwan berdasarkan 'mimpi' sehabis melakukan shalat 'istikharah' menjelang muktamar pertama NU di tahun 1926. Tulisan 'Nahdlatul Ulama' dengan huruf Arab, adalah tambahan dari Kyai Ridwan sendiri, tidak termasuk dalam 'mimpi'.

Kemudian, memasuki bulan-bulan sibuk, yakni bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadlan, maka kegiatan NU untuk sementara di hentikan. Seluruh perharian dikonsentrasikan bagi melakukan kegiatan di bulan sibuk itu. Di bulan Rajab, misalnya, warga NU mengadakan isra' mi'raj — memperingati peristiwa perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, kemudian naik ke langit hingga 'Sidratul Muntaha', untuk menerima perintah shalat lima waktu dalam schari semalam.

Dan pada bulan Sya'ban, mereka mengadakan upacara nisfu sya'ban (pertengahan bulan sya'ban) bertujuan untuk lebih meningkatkan amal kebaikan. Sebab pada pertengahan bulan itu, catatan tahunan amal perbuatan manusia diserahkan kepada Tuhan, untuk kemudian diganti dengan lembaran baru. Sedangkan pada bulan Ramadlan, mereka berpuasa sebulan penuh, malam harinya melakukan shalat tarwih, tadarrus (baca Al-Quran) dan bentuk-bentuk ibadah lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Meski kegiatan NU dihentikan sementara, aktivitas pencarian dana untuk membiayai delegasi ke Muktamar Islam di Makkah tetap dilakukan. Tiga orang yang ditugasi mencari dana, Kyai Wahab Hasbullah, H. Hasan Gipo dan H. Burhan, tidak henti-hentinya mengumpulkan bantuan dari para dermawan Surabaya maupun luar kota Surabaya. Dengan menyebar 'list' dan pos wesel, akhirnya terkumpul dana sejumlah f. 1500.28,5.

Setelah dana terkumpul dan bulan-bulan sibuk terlewati, kegiatan diaktifkan kembali. Ketika itu, bulan Syawal (pertengahan April 1926), tiga orang yang bertanggung jawab dalam masalah dana, kembali diutus untuk menghubungi KH. R. Asnawi di Kudus guna membicarakan soal keberangkatannya ke Muktamar di Makkah. Semua tugas berhasil dilaksanakan dengan mulus. KH. R. Asnawi pun telah siap untuk bertolak ke Makkah.

Segera setelah itu, Kyai Wahab menghubungi sebuah perusahaan pelayaran kapal di Pelabuhan Tanjung Perak. Tetapi, hasilnya cukup mengejutkan. Kapal baru saja berangkat menuju Saudi Arabia. Kyai Wahab segera memutar otak, menghubungi pelabuhan Singapura dengan mengirim telegram. Tapi juga gagal. Jawaban dari Singapura: kapal baru saja bertolak menuju Makkah. Terakhir, diadakan musyawarah kilat dipimpin Kyai Wahab sendiri dan memutuskan: Mengirim mosi ke Muktamar di Makkah melalui telegram. Meskipun telah dua kali sudah telegram dikirim, dan telah menghabiskan sekitar f. 740.13 (uang Hindia-Belanda), namun jawaban dari Raja Ibnu Sa'ud tak juga kunjung tiba. Pada akhirnya, Kyai Haji Raden Asnawi batal menghadiri Muktamar Islam yang bersejarah itu.

Kegagalan kali ini, bukan berarti menutup kesemparan yang lain. Rencana menghadap Raja Ibnu Sa'ud harus tetap berhasil. Terlebih lagi, berita mengenai keadaan tanah Hijaz (kala itu) masih simpang siur, Saru pihak memberitakan mazhab empat masih tetap berjalan sebagaimana biasa, tetapi pihak yang lain memberitakan tanah Hijaz hanya aman untuk pendukung paham Wahabi.

Atas dasar itu, NU kemudian memutuskan mengirim delegasi untuk menghadap langsung kepada Raja Ibnu Saud. Meskipun materi (permasalahan) yang akan disampaikan sama seperti semula, delegasi yang akan diberangkatkan mengalami perubahan. Kali ini yang berangkat bukan lagi KH. R. Asnawi, melainkan Kyai Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Al-Amiri Al-Mishri. Kyai Wahab Hasbullah bertolak dari Tanjung Perak Surabaya pada hari Kamis, 7 Syawal 1346 H bertepatan dengan 29 Maret 1928 dan singgah beberapa hari di Singapura. Seminggu setelah keberangkatan Kyai Wahab, Ahmad Ghanaim menyusul ke tempat yang sama.

Selama 15 hari berada di Singapura, Kyai Wahab sempat mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Singapura, seperti Syekh Ahmad Hakim, Fadlullah Suhaimi, Ancik Mas'ud, dr. Munsyi dan lain-lainnya, guna menjelaskan maksud dan tujuan NU menghadap Raja Ibnu Sa'ud. Setelah para tokoh agama Singapura paham betul mengenai tujuan utama NU, yakni mendesak Ibnu Sa'ud agar memberikan kebebasan bermazhab Ahlussunah waljama'ah di tanah Hijaz, maka mereka bersedia mendukung dan bahkan kemudian mendirikan cabang NU di Singapura.

Setelah berhasil mengadakan propaganda di Singapura, kedua delegasi meneruskan perjalannya menuju Jeddah. Setelah hampir satu bulan mengarungi lautan Teduh, sampailah mereka dengan selamat di Hijaz pada 17 Dzilqa'dah 1346 H (7 Mei 1928). Kedatangan kedua delegasi NU, ternyata, bersamaan dengan datangnya utusan Kerajaan Inggris, Sir Gilbert Clayton. Tiga hari setelah menginjakkan kaki di tanah haram, persisinya pada Kamis 20 Dzilqa'dah 1346 H (10 Mei 1928 M), Kyai Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim diterima Raja Ibnu Sa'ud. Keduanya kemudian menjelaskan maksud dan tujuan menghadap Raja, yakni untuk menyampaikan amanat dari NU mengenai berbagai masalah keagamaan, antara lain, NU minta tetap diberlakukannya kebebasan bermazhab di tanah Hijaz (rentang ini periksa kembali bab motivasi berdirinya NU dan baca juga lampiran dalam buku ini). Permintaan itu pun diterima baik dan bahkan sang Raja yang dituduh fanatik terhadap Paham Wahabi itu, menyanggupi akan tetap memberlakukan praktek-praktek keagamaan di tanah Hijaz seperti yang juga diminta oleh NU.

Setelah menghadap Raja, Kyai Wahab kemudian memanfaatkan sisa waktunya untuk menunaikan ibadah haji, dan kemudian seterusnya beliau kembali ke tanah air. Sedangkan Ahmad Ghanaim terus pulang ke kampung halamannya, Mesir. Kyai Wahab Hasbullah sampai di Tanjung Priok, Jakarta, pada 8 Muharram 1346 H (27 Juni 1928), dijemput KH. Bishri Syansuri dan Kyai Ridwan Abdullah Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Kyai Wahab mengadakan 'rapat umum' di Masjid Ampel Surabaya guna menjelaskan hasil kunjungannya ke Hijaz tersebut. Ribuan

warga NU Surabaya, Gresik, Porong, Sidoarjo dan lain-lain datang mendengarkan cerita Kyai Wahab.

Itulah awal perjalanan NU sebagai organisasi sosial keagamaan di masa sebelum dan sesudah Muktamar yang pertama dan kedua. Dalam Muktamar pertama, 14-16 Rabiul Awwal 1345 H (21-23 September 1926 M), di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya, tampak sekali keinginan NU untuk kembali memantapkan dirinya sebagai pembela paham Ahlussunah waljam'ah 'ala madzahibilarba'ah.

Muktamar pertama yang dihadiri 93 orang kyai dari Jawa dan Madura, juga tiga orang kyai masing-masing Kyai Abdullah dari Palembang, Kyai Abu Bakar dari Kalimantan dan Kyai Abdul Kadir dari Martapura, itu telah berhasil memutuskan 21 masalah penting. Namun, di antara dua puluh satu masalah itu, yang dianggap paling menonjol oleh peserta muktamar saat itu, adalah masalah madzhab.

Persoalan mazhab empat: Hanafi (80-150 H), Maliki (93-179 H), Syafi'i (150-204 H) dan Hambali (164-241 H), dikupas demikian jauh dalam muktamar baik mengenai riwayat hidup, jalur keturunan, kwalitas keilmuan, kecerdasan akal, keabsahannya sebagai mujtahid mutlak, kwantitas muslim yang menganut maupun kemasyhurannya yang hingga kini belum tertandingi. Atas dasar itu, muktamar kembali menegaskan: mengharuskan bagi ummat Islam zaman kini untuk mengikuti salah satu dari mazhab empat dalam rangka menjalankan ajaran Islam *Ahlussunah waljamaah*.

Bahkan Kyai Wahab Hasbullah dalam sebuah keterangannya di Swara Nahdlatoel Oelma', menegaskan: apabila orang muslim di zaman sekarang ini menjalankan

ajaran Islam tanpa mengikuti salah satu dari empat mazhab, berdosalah dia. Tapi bukan berarti murtad (keluar dari Islam) selagi orang itu masih bersembahyang dan tidak mengkafirkan yang Islam lainnya serta tidak pula menghalalkan darah harta orang dengan cara merampok.

Di samping itu, muktamar pertama juga melaporkan kemajuan yang dicapai oleh madrasah 'Nahdlatul Wathan'. Selain telah membuka beberapa cabang di daerah, Nahdlatul Wathan juga telah membentuk cabang baru bernama 'Jam'iyyatun Nashihin' — semacam perkumpulan muballigh. Perkumpulan ini khusus bagi kaum muda berusia 15 tahun ke atas untuk dididik sebagi guru dan muballigh. Setiap lima hari sekali mereka diberi pelajaran ilmu pengetahuan agama meliputi: ilmu hukum (fiqih), theologi (ketauhidan) dan tafsir, yang kesemuanya bersumber pida kitab-kitab kuno seperti ***'fathul qarib', 'tafsir jalalin', 'kifayatul awam', 'tanwirul qulub'*** dan lain-lain. Aktivitas belajarnya tidak ditentukan tempatnya, tetapi ditempuh dengan cara bergiliran dari rumah anggota satu ke anggota yang lain dan seterusnya. Dalam muktamar pertama, diinformasikan juga bahwa 'Jam'iyyatun Nashihin' telah berhasil mendidik 25 kader muballigh muda yang siap untuk diterjunkan sebagai guru maupun muballigh.

Dari sini bisa dilihat bahwa mukatamar pertama NU, ketika itu baru berumur 8 bulan, merupakan arena pemantapan eksistensi NU sebagai pembela paham Ahlussunah waljama'ah ala madzhibilarbaah. Selain itu, sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di bidang sosial, dakwah dan pendidikan, NU terlihat mulai merintis jalan ke bidangbidang itu.

Perkembangan NU semakin hari semakin bertambah pesat. Ini bisa dilihat dalam Muktamar kedua yang juga dipusatkan di Hotel Muslimin Peneleh-Surabaya, pada 14-16 Rabiul Isani 1346 H (9-11 Oktober 1927 M). Bila muktamar pertama hanya dihadiri 93 orang kyai, muktamar kedua dihadiri 146 kyai dari Jawa dan Madura serta 242 orang terdiri dari kelompok pengusaha, petani dan buruh. Hadir juga dr. Soetomo (pnediri Indonesische Studieclub) dan beberapa pejabat pemerintah Surabaya serta wakil dari Inladshe Zaken, VanderPlas.

Seperti halnya muktamar pertama, muktamar kedua pun berhasil memutuskan beberapa masalah penting. Namun, tekanannya bukan lagi pada persoalan mazhab, melainkan telah berkembang pada persoalan kemasyarakatan. Misalnya, masalah perkawinan di bawah umur yang ditangani pemerintah Hindia-Belanda, dinilai banyak menyimmpang dari hukum fiqih. NU meminta kepada pemerintah agar masalah tersebut benar-benar diawasi dan terutama mengenai walinya. Juga tentang Penghulu atau Naib. Dalam hal ini, NU meminta kepada pemerintah agar orang yang akan dijadikan Penghulu atau Naib itu terlebih dulu mendapat persetujuan dari para ulama setempat. Dan syarat seseorang yang akan diangkat menjadi Penghulu, harus berpegang pada salah satu dari mazhab empat.

Muktamar kedua juga meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan kurikulum agama Islam pada setiap sekolah umum di Jawa dan Madura. Dalam hal ini, muktamar berpegang pada mayoritas penduduk Jawa dan Madura serta para pelajar di sekolah umum yang

beragama Islam. Bila di negara mayoritas muslim tidak diajarkan pelajaran agama Islam, menurut pandangan NU, sama artinya dengan berusaha mendangkalkan dan menanggalkan Islam.

Juga dibahas dan diputuskan mengenai hukumnya menyerupai orang Belanda dalam hal berpakaian, misalnya pakai celana, dasi, topi dan sepatu. Muktamar memutuskan hukumnya haram, apabila niat menyerupai itu dimaksudkan untuk seluruhnya termasuk kesombongannya, kekafirannya dan kegagahannya. Tapi kalau sekedar mode, boleh saja asal tidak melanggar batas aurat yang sudah ditentukan Islam. Masih di Hotel Muslimin, di Jalan Peneleh Surabaya. Muktamar NU ketiga digelar pada 23-25 Rabius Tsani 1347 (28-30 September 1928 M). Muktamar kala ini terlihat lebih maju dibanding mukatamar sebelumnya. Bila dalam muktamar kedua dihadiri 146 kyai, muktamar ketiga ini lebih meningkat lagi sampai 260 kyai dari 35 cabang NU di Jawa dan Madura. Itu pun belum terhitung peserta yang bukan kyai pengurus Tanfidziyah), pengusaha, kaum buruh dan juga pemuda-pemuda NU. Sehingga muktamar ketiga, terlihat cukup berhasil terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengikut. Tidak berbeda dengan muktamar pertama dan kedua, teknis pelaksanaan muktamar ketiga ini pun dibagi dalam tujuh majelis (komisi). Setiap majelis dipimpin seorang kyai senior didampingi dua orang penulis: seorang menuliskannya di papan tulis dan satunya lagi bertugas sebagai notulen. Materi atau permasalahan yang hendak dibahas, biasanya, sudah dikelompokkan terlebih dulu menurut bidang permasalahannya masing-masing. Sedangkan kumpulan permasalahannya berasal dari berbagai

daerah yang, jauh sebelumnya, sudah dikirim ke kantor Hoofd Bestuur NU, sebagai bahan muktamar.

Gambar 6. 3 Gedung Hoofd Bestuur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan, Surabaya

Selain membahas berbagai masalah keagamaan, muktamar ketiga: juga memutuskan beberapa masalah penting yang tidak terjadi pada muktamar pertama maupun kedua. Misalnya, pemilihan pengurus baru justru baru diadakan di dalam muktamar ketiga ini. Meski muktamar diputuskan setiap tahun sekali, perubahan pengurus tidak dilakukan pida muktamar tahun pertama maupun kedua. Baru pada muktamar tahun keriga inilah diadakan pemilihan pengurus baru dengan menggunakan sistem pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Dan hasilnya seperti berikut ini:

SYURIYAH:

Rais	KH. Hasyim Asyari Tebuireng-Jombang
Wakil Rais	KH. Sa'id Peneleh-Surabaya
Katib Awwal	KH. Mas Alwi Kawatan-Surabaya
Katib Tsani	KH. Amin Kemayoran-Surabaya
Katib Tsalis	KH. Ghufron-Surabaya
Awan	KH. Amin Praban-Surabaya
	KH. Ridwan-Surabaya
	KH. Abdullah-Surabaya
	KH. Anwar Rangah -Surabaya
	KH. Abdul Majid-Surabaya
	KH. Bishri-Surabaya
	KH. Abdul Halim Pacarkeling-Surabaya
	KH. Ridwan-Semarang
	KH. Khalil-Lasem
	KH. Raden Asnawi-Kudus
	KH. Raden Hambali-Kudus
	KH. Mashum-Jombang
	KH. Bishri Syansuri-Jombang
	KH. Amir-Pekalongan

MUSTASYAR:

Syekh Abdul "Alim Ash-Shiddiqi-India(sejak muktamar kedua ia aktif mengikutinya)
Syekh Ahmad Ghanaim Al Amir-Mesir
KH. Abdul Wahab Hasbullah-Surabaya

KH. Maruf-Kediri
KH. Shaleh-Juwono
KH. Syamsuddin-Banyuwangi
KH. Nahrawi-Malang
KH. Yasin-Malang
KH. Zuhdi-Pekalongan
KH. Abbas-Pekalongan
KH. Abdurrahman-Banten

TANFIDZIYAH (Bukan Ulama)

President : H. Hasan Gipo Ampel-Surabaya
VicePresident : H. AhzabPeneleh-Surabaya
Kassier I : H. Ihsan Ampel -Surabaya
Kassier II : H. Abdul Fatah Bubutan-Surabaya
Secretaris I : Muhammad Shadiq Kawatan-Surabaya
Secretarus II : Muhammad Hadi Shadiq Tembok – Surabaya
Secretaris III : Badrun-Surabaya

KOMISARIS:

H. Shaleh Syamil Ampel-Surabaya
H. Nawawi Jagalan-Surabaya
H. Burhan Pasarbesar-Surabaya
H. Siraj Gemblongan-Surabaya
H. Dahlan Bubutan-Surabaya
H. Abdul Manan Bubutan-Surabaya
H. Jafar Pasarbesar-Surabaya
H. Abdullah Hakim Perukangan-Surabaya
H. Ihsan Kepuhsari-Surabaya
H. Dahlan Lawangseketeng -Sby

H. Yasin Kawatan-Surabaya
H. Shaleh Sukodono -Surabaya
H. Nahrawi Bubutan-Surabaya
H. Abdus Syukur Petukangan-Surabaya

Pemilihan pengurus baru, agaknya, memang perlu dilakukan, bukan karena beberapa anggota pengurus lama tidak lagi aktif, melainkan juga karena perlunya persyaratan administratif dan penanganan khusus bagi permohonan 'rechtspersoon' kepada pemerintah Hindia-Belanda, Guna mendapatkan pengakuan secara hukum. Ketika itu, tiga orang pengurus terpilih, masing-masing: KH. Sa'id bin Shaleh (Wakil Rais), Hasan Gipo (President Tanfidziyah) dan Muhammad Sugeng alias Muhammad Shadiq Yudhadhiwiryo (Secretaris I), diberi kuasa penuh untuk mengurus permohonan "rechtspersoon' tersebut.

Surat permohonan tertanggal 5 September 1929 diajukan kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Betawi. Dan lima bulan kemudian, persisnya pada 6 Pebruari 1930, permohonan dikabulkan. Ini berarti, sejak dikabulkannya permohonan itu, NU diakui sebagai organisasi berbadan hukum, yang kemudian secara resmi ditulis dalam 'Besluit Rechtspersoon' No. IX buat lamanya 29 tahun.

Masih di dalam muktamar ketiga. Seperti muktamar pertama dan kedua, muktamar ketiga juga diakhiri dengan rapat akbar di Masjid Ampel. Seluruh keputusan muktamar dibacakan di depan umum, sekedar untuk memberitahukan hasil yang telah dicapai oleh muktamar. Tradisi 'rapat umum' ini memang perlu dipertahankan, oleh karena selain bermanfaat bagi menarik massa NU, juga secara tidak

langsung memberikan laporan pertanggung jawaban kepada ummat NU yang ikut memikul biaya muktamar.

Keputusan yang paling penting di dalam muktamar ketiga, terutama dalam hubungannya dengan usaha pengembangan NU, adalah sebuah keputusan yang dihasilkan oleh 'majelis khamis' (komisi lima), yang dipimpin Kyai Shaleh Banyuwangi dengan anggota Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Ridwan, Kyai Asnawi Kudus, dan Kyai Muharram Kediri. Majelis kelima ini memutuskan : membentuk 'Lajnatun Nashihin' — semacam komisi propaganda untuk menyiarkan NU ke berbagai daerah.

Anggota 'Lajnah Nashihin' ini terdiri dari sembilan orang: KH. Hasyim Asy'ari, KH. Bishri Syansuri, KH. Raden Asnawi, KH. Mashum, KH. Mas Alwi, KH. Musta'in, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Abdul Halim dan Ustadz Abdullah Ubaid. Tugas komisi ini mendatangi berbagai daerah (terutama Jawa dan Madura) guna menjelaskan maksud dan tujuan NU, untuk kemudian mendirikan cabang di tempat-tempat tersebut. Dan dalam pelaksanaan tugasnya terdapat pembagian wilayah tertentu. Misalnya, Kyai Wahab, Kyai Bishri dan Kyai Abdul Halim lebih mengutamakan daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Mas Alwi dan beberapa anggota lainnya lebih terfokus di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Tapi, bukan berarti pembagian secara ketat. Dalam pelaksanannya, ternyata, seringkali terjadi tukar menukar.

Kerja 'Lajnah Nashihin' (komisi propaganda) ini ternyata cukup ampuh. Buktinya, dalam waktu singkat, di berbagai daerah di seluruh Jawa dan Madura, bermunculan cabang-cabang NU bak cendawan di musim hujan.

Sehingga, muktamar berikutnya tidak perlu lagi dipusatkan di Surabaya, tetapi diadakan secara berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya.

Ternyata benar. Muktamar keempat dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah, pada 12-15 Rabius Tsani 1348 H (17-20 September 1929 M). Muktamar ini menyedot perhatian masyarakat luas, dan dihadiri tidak kurang 1450 peserta muktamar, terdiri dari 350 orang kyai, 900 orang pendamping (pengiring kyai) dan 200 orang pimpinan Tanfidziyah (bukan kyai). Sedangkan cabang NU yang sudah terbentuk, tercarat 63 cabang, dengan rincian 13 cabang di Jawa Barat, 27 cabang di Jawa Tengah dan 23 cabang berada di Jawa Timur, termasuk Madura.

Persidangan muktamar keempat dibagi menjadi tujuh majelis dan setiap majelis dipimpin seorang kyai, didampingi dua orang penulis yang bertugas sebagai pencatat hasil musyawarah majelis. Demikian pula, materi permasalahannya diambil dari dari berbagai daerah yang, jauh sebelumnya, sudah dikirimkan ke Hoofdbestuur NU. Permasalahankeagamaan (masail diniyyah) yang dibahas dari muktamar ke muktamar juga tidak selalu sama. Bahkan lebih tepat jika dikatakan selalu aktual, mengikuti perkembangan dan kejadian di masyarakat. Namun, dari sekian banyak masalah yang dibahas, secara umum bisa dikelompokkan dalam tiga masalah: masalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia sebagai rakyat dengan pemerintah.

Juga, apabila muktamar sebelumnya selalu dipusatkan di Hotel, muktamar keempat di Semarang berpusat di Hotel 'Arabistan' Kampung Melayu. Sedangkan acara

penutupannya (dengan rapat akbar), dilangsungkan di Masjid Jami kota Semarang.

Di hadapan sekitar 10.000 pengunjung terdiri dari warga dan simpatisan NU Jawa Tengah, hasil keputusan muktamar keempat dibacakan secara tertib dan ditutup dengan pengajian umum.

Muktamar Semarang merupakan langkah awal bagi keberhasilan NU memperkenalkan diri ke berbagai daerah. Bukan hanya berhasil memperkenalkan diri dan membentuk cabang baru saja, melainkan juga sukses menggugah para ulama terkemuka untuk memberikan dukungannya terhadap NU. Sebab, ternyata, kehadiran KH Hasyim Asy'ari disetiap muktamar, khususnya muktamar Semarang, cukup menggugah semangat para kyai khususnya kyai terkemuka dari Sukamiskin (Kyai Haji Abbas), untuk datang ke Semarang: guna menyatakan dukungannya terhadap NU.

Kejadian serupa terulang lagi untuk yang kedua kalinya, ketika dilangsungkan muktamar kelima di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 1316 Rabius Tsani 1349 H (7-10 September 1930 M). Muktamar inipun tidak kalah hebatnya dengan muktamar Semarang. Selain terdapat penambahan cabang baru, muktamar Pekalongan juga mengumumkan terbentuknya cabang NU di luar Jawa, yaitu di Kalimantan (Banjar Martapura). Sealin itu, kehadiran KH Hasyim Asy'ari di dalam muktamar Pekalongan ini ternyata tidak hanya menggugah semangat pengusaha batik setempat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan muktamar, melainkan juga membangunkan semangat para kyai khususnya kyai ternama dari Termas, Kyai Haji Dimyati. Kyai yang belum pernah mengikuti muktamar ini, seketika

itu datang ke Pekalongan dan menyatakan dukungannya terhadap NU. Usaha memperkenalkan NU ke luar daerah terus diitingkatkan. Pada 12 Rabius Tsani 1350 H (29 Agustus 1930 M) dilangsungkan muktamar keenam di Cirebon, Jawa Barat. Dan tahun berikutnya, 13 Rabius Tsani 1351 H (9 Agustus 1932 M) diselenggarakan muktamar ketujuh di Bandung, Jawa Barat. Sejak muktamar ketujuh inilah, terjadi perubahan waktu muktamar untuk periode berikutnya. Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak lagi menentukan bulan Rabius Tsani sebagai bulan muktamar, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada peserta muktamar untuk memilih sendiri bulan (waktu) apa yang disukai. Karena itu, muktamar kedelapan yang berlangsung di Jakarta tidak lagi jatuh pada Rabius Tsani, tetapi 12 Muharram 1352 H (7 Mei 1933 M). Hingga disini kita bisa melihat perjalanan NU semenjak muktamar pertama sampai kedelapan (1926-1933) yang pada dasarnya merupakan masa perintisan. Titik berat kegiatannya terarah pada usaha pemantapan dan memperkenalkan NU ke luar daerah. Ini tercermin dalam komisi — propaganda yang dibentuk dengan missi khusus: menarik simpatri masyarakat luas terhadap NU. Dan tugas komisi ini mulai terlihat hasilnya ketika NU berhasil mengadakan muktamar di Semarang. Kemudian muktamar Pekalongan, diteruskan muktamar Cirebon, Bandung dan Jakarta. Semua itu merupakan bukti kemampuan Lajnatun nashihin yang dipimpin langsung KH Hasyim Asy'ari, untuk mengakhiri masa perintisan menuju masa pengembangan NU.

Bukan berarti masa perintisan itu dihabiskan hanya untuk mengadakan propaganda atau perhubungan di antara

para ulama. Sebab, prioritas penting yang harus diusahakan untuk mencapai maksud dan tujuan NU di awal berdirinya, bukanlah hanya mengadakan hubungan di antara para ulama bermadzhab dan memeriksa kitab-kitab sebelum dipergunakan sebagai rujukan dalam muktamar: apakah benar kitab itu dari Ahlussunnah Wal Jama'ah ataukah kitab-kitab 'Ahli Bid'ah', melainkan juga berusaha menyiarkan agama Islam berazazkan pada mazhab empat, memperbanyak madrasah, memperhatikan hal Ihwal masjid, surau-surau, pondok-pondok serta mengurusi anak yatim dan fakir miskin, mendirikan badan-badan untuk memajukan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syara agama Islam.

Oleh sebab itu, didalam masa perintisan tersebut, selain mengadakan perhubungan diantara para ulama bermazhab untuk mendirikan cabang-cabang NU, generasi pendiri organisasi ini juga berusaha memperhatikan masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan juga dakwah.

Di bidang pendidikan misalnya, berusaha memperbanyak madrasah di berbagai daerah. Seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa menjelang berdirinya NU, Kyai Abdul Wahab Hasbullah telah mendirikan dua buah madrasah: 'Nahdaltul Wathan' 'Taswirul Afkar'. Dan kedua madrasah ini sejak didirikan telah menggunakan sistim klasikal dengan kurikulum seratus persen agama.

Pada tahun 1929 misalnya, Nahdlatul Wathan dan Taswirul Afkar, membuka enam jenjang kelas. Kelas pertama dan kedua dinamakan sifir awwal (Nol A) dan sifir

tsani (Nol B). Para Murid sifirawwal dididik untuk bisa menulis Arab, menyusun kalimat Arab dan membaca Qur'an. Dan untuk tahun berikutnya mereka bisa menjadi murid siftrtsani, dengan mata pelajaran sama dengan sifir awwal tapi lebih mendalam.

Sedangkan murid sifirtsani dipersiapkan untuk memasuki madrasah empat tahun berikutnya, mulai dari kelas satu sampai dengan kelas empat (tamat). Sedangkan mata pelajaran kelas I: menulis halus (Arab), menyusun kalimat dan membaca Al-Qur'an, tajwid (aturan membaca Al-Our-an) dan menghafal tuntunan agama dalam bahasa Jawa. Kelas II mata pelajaran sama seperti kelas I tapi lebih mendalam dan ditambah mata pelajaran Nahwu-Sharaf (gramatika), Tauhid (theologi), Hisab (ilmu hitung) dan membaca kitab. Sedangkan kelas III, sama seperti kelas II tapi lebih mendalam lagi. Kelas IV sama seperti kelas III ditambah mata pelajaran ilmu bumi (geografi).

Selain madrasah dengan enam jenjang kelas tersebut, madrasah Nahdlatul Wathan dan Taswirul Afkar juga membuka kelas yang sama, tetapi aktifitasnya pada sore hari. Dan madrasah sore ini khusus untuk anak-anak orang miskin dan anak yatim.

Madrasah Nahdlatul Wathan berkembang ke berbagai daerah dengan cara pengajaran dan sistim belajar yang sama. Madrasah Nahdlatul Wathan daerah merupakan cabang dari Nahdlatul Wathan Surabaya. Di cabang Surabaya sendiri terdapat 18 buah sekolah yang afiliasinya kepada Nahdlatul Wathan. Dalam perhitungan akhir tahun 1939, delapan belas sekolah itu mempunyai murid lelaki 924 anak, murid perempuan 474 anak, guru lelaki 35 orang, guru wanita 14

orang, 7 buah gedung berstatus wakaf, 2 buah gedung berstatus pinjam dan 8 gedung status sewa. Diantara delapan belas sekolah itu adalah, Hidayatul Wathan Jagalan, Nahdlatul Wathan Pacar Keling, Nahdlatul WathanPetukangan, Akhul Wathan Wonokromo.

Contoh lain di cabang Malang. Nahdlatul Wathan di cabang ini berkembang pesat dan muridnya melimpah ruah. Pada 1929 tercarat jumlah murid dalam enam jenjang kelas sebanyak 250 anak. Pada tahun itu juga dibangun sebuah gedung bertingkat senilai Rp 7000,(tujuh ribu rupiah). Tingkat atas berisi empat kelas, sedangkan bagian bawah lima kelas, termasuk sebuah ruang guru dan kantor. Pada malam hari dibuka kelas khusus bagi orang-orang tua yang berkeinginan mendalami pengetahuan agama. Kurikulum kitab-kitab kuno buah pikiran ahli mazhab. Dan ketika itu tercatat jumlah murid tua sebanyak 70 orang.

Selain itu, cabang Malang juga berhasil mengembangkan Nahdlatul Wathan ditingkat kecamatan. Misalnya di kecamatan Pujon jumlah murid sebanyak 190 anak, di Pakis 150 anak, di Batu 170 anak, di Kacuk 90, di Kecamatan Karanglo 110 anak, di Bululawang 160 anak, dan di posari jumlah murid Nahdlatul Wathan sebanyak 200 anak.

Madrasah Nahdlatul Wathan berkembang terus hampir disetiap cabang NU. Misalnya, di Jawa Barat berpusat di madrasah Mathla'ul Awwar Menes-Banten. Di Jawa Tengah berpusat di madrasah Nahdlatul wathan Jomblangan Kidul Semarang. Sedangkan di Jawa Timur berpusat di Surabaya dengan cabang-cabangnya yang

tersebar luas di Jombang, Gresik, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang dan sebagainya.

Di bidang dakwah juga diusahakan mendidik para da'i atau muballigh, menerbitkan brosur, majalah dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Seperti telah disinggung, mengenai Jamiyyatun Nashihin yang khusus menangani pemuda berusia 15 tahun ke atas dididik untuk menjadi guru dan muballigh.

Selain Jam'iyyatun Nashihin, ada lagi Syubbanul Wathan — Kumpulan pemuda NU yang telah berorientasi pada gerakan kebangsaan dan Da'watus Syubban (kelompok pemuda NU yang berorientasi pada pelaksanaan dakwah). Pada tahun 1928 Da'watus Syubban surabaya mempunyai anggota tidak kurang dari 120 orang. Dan jumlah anggota sebesar itu dididik untuk menjadi muballigh-muballigh yang tangguh.

Sedangkan sistem pendidikannya dibagi dalam tiga kelompok: kelompok dasar, kelompok menengah dan kelompok atas. Aktivitas belajar dilakukan pada malam hari, tiga kali dalam seminggu: Sabtu malam, Rabo malam dan Kamis malam. Untuk kelompok dasar dan menengah belum diajarkan praktek berpidato atau ceramah didepan umum. Pelajaran praktek berpidato hanya diajarkan bagi mereka yang udah memasuki kelompok atas.

Mata pelajaran kitab kuning yang harus dikuasai para pemuda di k lompok dasar antara lain: Jurumiyah, Safinah, Buchori-Muslim, Tauhid (theologi) dan Tajwid (aturan pembacaan al-Qur-an). Sedangkan bagi mereka yang dikelompok menengah harus juga menguasai pelajaran perti di kelompok dasar, tetapi ditambah lagi dengan kitab-kitab

lain perti: Kailani, Sullamut Taufig dan Mutammimah Jurumiyah. Dan untuk kelompok atas harus menguasai pelajaran dikelompok dasar dan menengah, ditambah dengan kitab-kitab lain seperti, misalnya: Taqrib, Ilmu Falak (astronomi), Jughrafi (geografi), Maksud, Hisab (hitung), Matan Alfiyah dan praktek berpidato arau berceramah di depan umum.

Selain dakwah lewat podium, NU juga menerbitkan brosur-brosur dan majalah. Dalam masa perintisan (1926-1933) kita kenal nama-nama majalah NU, misalnya: Swara Nahdlatoel Oelama, Oetoesan Nahdlatoel Oelama, Berita Nahdlatoel Oelama dan lain sebagainya. Majalah tersebut terbit secara teratur sebulan sekali dan tersebar luas di Jawa dan Madura. Penanggungjawab majalah tersebut adalah KH Hasyim Asy'ari, dibantu redaktur pelaksana KH Abdul Wahab Hasbullah dan penulis penulis kaliber seperti KH Dahlan Ahyad, KH Mas Alwi bin Abdul Aziz dan KH Ridwan Abdullah. Isi majalah itu, selain mengenai berita-berita intern NU, juga berita-berita mengenai perkembangan dunia Islam, pemerintahan dan juga artikel ilmu pengetahuan. Sedangkan direktur penerbitannya dipimpin oleh K. Mas Abdul Kahar dan alamat kantor pusat di Kawatan Gang Onderling Belang No 9 Surabaya.

Di bidang sosial kemasyarakatan, NU berusaha memepererat hubungan antar warga NU, baik yang ada di kampung, desa maupun kota, dengan cara mengadakan pertemuan setiap hari Jum'at atau seminggu sekali. Pertemuan semacam itu diadakan disemua tingkat jajaran NU, dari sejak Hoofdbestuur sampai dengan pengurus ranting (kring). Isi pertemuan itu sendiri, biasanya, berupa

pengajian keagamaan yang dipimpin oleh seorang kyai, kemudian diteruskan dengan tahlilan untuk arwah warga NU setempat yang telah meninggal. Setiap tanggal 15 bulan qomariyah (tahun hijriyah) juga diadakan pertemuan antar kampung guna mendengarkan pembacaan brosur LINU (Lailatul Ijtima'). Dalam brosur LINU tertulis nama-nama warga NU yang telah meninggal dunia dari berbagai daerah. Brosur itu sendiri dikeluarkan oleh Hoofdbestuur NU secara rutin dan teratur.

Sehabis pembacaan nama-nama almarhum, seorang kyai tampil memimpin shalat ghaib buat si mayyit. Dan setelah itu dilangsungkan tahlilan seperti biasa. Juga tidak jarang dalam pertemuan itu diselipkan pengumuman mengenai hasil-hasil muktamar NU. Dengan demikian hubungan sosial antara pengurus dan warga NU menjadi erat dan tak terpisahkan.

Di bidang sosial ekonomi, NU berusaha mendirikan koperasi serba ada. Misalnya, pada 1929 di Surabaya (berpusat di Pacarkeling) didirikan Cooperatie Kaum Muslimin (CKM) perkumpulan usaha. Pelopor pendiri Syirkah Tijariyah (CKM) ini adalah KH Abdul Halim, salah seorang pengurus Hoofdbestuur NU. Barang-barang yang mulai diperjual belikan ketika itu berupa kebutuhan primer (keperluan sehari-hari) seperti: beras, gula, kopi, rokok, pasta gigi, sabun kacang, minyak dan sebagainya. Namun yang menarik dari usaha ini adalah peraturan dasar CKM yang, kala itu, sudah disahkan sebagai model koperasi NU ditampat-tempat lain. Ini pertanda langkah awal menuju sosial ekonomi sudah mulai terlihat di tahun 1929 itu.

Peraturan CKM mengenai pembagian keuntungan, misalnya, dibagi lima bagian: 40 persen untuk pegawai (penjual), 15 persen untuk pemilik modal, 25 persen untuk menambah kapital (berarti pemilik modall mendapat bagian 40 prosen), 5 persen untuk juru komisi (juru tulis) dan 15 persen untuk jam'iyyah Nahdlatul Ulama.

Apa yang terurai diatas, baik itu mengenai pendidikan, masalah sosial maupun dakwah, adalah sekedar contoh bagi usaha-usaha yang ditempuh NU dimasa perintisannya. Dengan kata lain, pada awal sejarah pertumbuhannya, NU telah membuktikan pengabdiannya kepada agama dan masyarakat baik dibidang pendidikan, sosial maupun dakwah. Selain juga berhasil mengemban tugas sebagai pemelihara kelestarian paham Ahlussunnah waljamaah ala mazahibilarbaah.

Sedangkan faktor yang paling dominan dalam menunjang keberhasilan NU dimasa perintisan tersebut, adalah tampilnya Kyai Haji Muhammad Hasyim Asyari sebagai pimpinan tertinggi NU. Sebab dengan tampilnya Kyai Hasyim, tumbuhlah faktor-faktor penunjang lainnya berupa ketundukan dan ketaatan para pengikut, kesetiaan para pendamping, keikutsertaan masyarakat dalam membesarkan NU serta dukungan kebanyakan ulama yang wawasan keagamaannya pernah dibentuk oleh KH Hasyim Asyari.

B. Masa Perkembangan

Masa perkembangan NU dimulai sejak muktamar IX (kesembilan) di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 21-26 April 1934. Ada beberapa sebab yang bisa dijadikan alasan

memilih muktamar Banyuwangi ini sebagai titik awal sejarah perkembangan NU.

Pertama, karena di muktamar Banyuwangi inilah mulai diberlakukan mekanisme tata kerja persidangan baru yaitu pemisahan sidang antara Syuriah dan Tanfidziyah di dalam muktamar. Sejak itu Tanfidziyah mengadakan sidang sendiri dengan materi permasalahan sendiri pula. Dan begitu juga Syuriah, mengurus majelisnya sendiri dengan berbagai permasalahan yang tentunya lebih berkait dengan persoalan agama.

Sebelum itu, sidang-sidang dalam muktamar dipimpin langsung oleh Syuriah. Pengurus Tanfidziyah boleh ikut dalam sidang — yang biasanya dibagi ke dalam tujuh majelis, tetapi tidak berhak memutuskan suatu persoalan terutama yang berhubungan dengan hukum agama. Mereka 'boleh ikut' memutuskan hanya terhadap perkara yang tidak memerlukan keterangan hukum agama. Hak kekuasaan seperti itu memang sudah diatur dalam Statuen NU 1926 sebagai berikur:

"Kekoeasaan jang tertinggi dari perkoempoelan ini jaitoe oleh kongres dari oetoesan-oetoesan. Sekalian poetoesan didalam kongres jang perloe dengan keterangan hoekoem agama hanja boleh dipoetoes oleh oetoesan-oetoesan dari golongan goeroe agama (oelama). Lain-lain oeroesan jang tiada begitoe perloe dengan keterangan hoekoem agama, oetoesan jang boekan goeroe agama (oelama) boleh toeroet memoetoesnja". Oleh sebab itu, apabila didalam uraian terdahulu (masa perintisan) nama H. Hasan Gipo, selaku ketua Tanfidziyah tidak banyak disinggung, bukan berarti ia tidak banyak berperan. Melainkan, karena aturan permainan yang telah disepakati tidak mengizinkan seorang Hasan Gipo

untuk memimpin sidang dalam muktamar. Lagi pula, ketika itu, belum ada pemisahan sidang antara Syuriyah dan Tanfidziyah seperti yang baru diberlakukan di Banyuwangi. Tugas Hasan Gipo (Tanfidziyah) ketika itu, adalah bertanggungjawab terhadap suksesnya pelaksanaan muktamar (mungkin saja semacam panitia) dan menjalankan roda organisasi yang telah diputuskan oleh Syuriyah. Tugas seperti ini telah diatur dalam peraturan rumah tangga (Huihoudclijk Reglement) sebagai berikut:

"President atau VicePresident djoega mempoenjai koewadjiban sebagai Rois oentoek mendjalankan pekerdjaan perkoempoelan jang telah dipoetoes oleh persidangan goeroe agama (Oelama)".

Meski muktamar Banyuwangi ini tidak juga mengubah peraturan dasar (AD/ART), bisa dipastikan pengalaman Hasan Gipo selama masa perintisan tak bakal terulang di masa berikutnya (masa perkembangan). Sebab, otonomi Tanfidziyah sudah mulai mengembang, dan bahkan kemudian bergerak maju membawa nama NU hingga menjadi masyhur. Namun, sejarah telah mencatat, bahwa ditengah pasang-naiknya, kemasyhuran itu nanti, akan tersandung pula oleh batu-batu pertengkaran yang cukup keras antara Syuriah dan Tanfidziyah.

Kedua, karena semenjak muktamar Banyuwangi inilah tatacara persidangan mulai diperbaharui. Apabila pada beberapa kali muktamar sebelumnya sidang cukup dilakukan dengan duduk melantai diatas tikar atau permadani sambil membawa tumpukan kitab-kitab mazhab, kebiasaan seperti itu tidak lagi dijumpai di muktamar Banyuwangi. Bentuk persidangan sudah diatur rapi dan agak berbau formal,

peserta sidang dipersilahkan duduk dikursi menghadap pimpinan sidang.

Ketiga, karena dalam muktamar kesembilan ini mulai tampak peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti misalnya, Mahfudz Shiddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid dan lain sebagainya. Lebih dari itu, titik berat aktivitas NU semenjak muktamar Banyuwangi ini, mulai tertuju kepada usaha melibatkan diri dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya.

Dalam masa perkembangan ini, NU mulai bersungguh-sungguh memperhatikan masalah kepemudaan. Berbagai organisasi pemuda yang pada dasarnya seaspirasi dengan NU, dikumpulkan dalam satu wadah sebagai benteng pertahanan. Sehingga, dalam muktamar kesembilan ini lahir sebuah keputusan: membentuk wadah pemuda yang diberi nama Anshor Nahdlatoel Oelama (ANO). Dan organisasi pemuda ini kemudian menjadi lebih penting artinya bagi menopang induk organisasi, setelah peraturan dasar dan peraturan rumah tanggnya (PD/PRT) disahkan dalam muktamar NU berikutnya di Sala, Jawa Tengah.

Gambar 6. 4 Logo Organisasi Badan Otonom Gerakan Pemuda Ansor

Selain membentuk ANO, muktamar Banyuwangi juga memutuskan beberapa masalah keagamaan (masail diniyah) antara lain: masalah perselisihan paham tentang sembahyang Jurrrat, masalah perlunya memudahkan perkawinan buat orang Kristen yang telah masuk Islam dan hukuman berat bagi orang yang menghina Al-Qur-an.

Tentu saja keputusan seperti itu erat hubungannya dengan perkembangan situasi dimasa itu. Lahirnya keputusan senantiasa merupakan akibat dari sebab yang terjadi. Misalnya, karena pada saat itu ummat Islam sedang terpukul oleh tulisan-tulisan yang dimuat diberbagai surat kabar dan majalah, yang nadanya menghina Al-Qur'an dan (terutama) Nabi Muhammad SAW. Seorang pengarang Cina, Oei **Bee Thai**, misalnya, menulis artikel di majalah **HoaKiao** (1932) yang isi pokoknya menghina habis Nabi Muhammad SAW. Dalam bagian tulisannya, Oei menyatakan, peraturan perkawinan dalam Al-Qur'an mulanya hanya untuk melampiaskan nafsu nabi. Tulisan ini membuat geger ummat Islam termasuk NU. Sehingga, wajar jika kemudian NU membuat keputusan 'masail diniyah' seperti yang baru saja disinggung.

Semakin banyak tulisan yang memojokkan ajaran Islam (suatu kondisi yang memang diciptakan oleh politik Belanda guna mengaburkan ajaran Islam), semakin rapat pula hubungan NU dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, khususnya kelompok pembaharu. Mungkin, inilah memeng ciri ummat Islam yang, apabila diserang kelompok luar Islam, segera melupakan segala bentuk pertengkaran internal Islam, untuk kemudian merapat dalam satu barisan menghadapi serangan dari luar.

Itu terbukti, ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan statuta baru yang disebut 'Ordonansi Guru' di tahun 1923, yang. kemudian ditegaskan lagi pada 1925, dan diperluas lagi ke sekolah-sekolah swasta yang bermunculan di tahun 1932, maka pertentangan soal khilafiyah antara kelompok pembaharu dan NU mendadak mereda dengan sendirinya.

Terlebih lagi ketika kemudian diketahui bahwa, Ordonansi Guru itu tidak hanya berlaku bagi pembatasan tugas para guru agama atau muballigh saja, tetapi juga berlaku bagi penempatan Bupati beserta bawahannya di Jawa, dan kepala adat dimana saja berwenang mengatur urusan agama Islam. Padabal mereka itu kurang paham bahkan buta terhadap hukum-hukum Islam. Karena itu, kelompok-kelompok Islam semakin tidak tertarik dengan pertengkaran didalam tubuhnya sendiri, tetapi lebih tertarik pada pemusatan perhatian guna menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial yang kafir itu.

Sikap menghindari terjadinya pertengkaran di antara kelompok Islam sendiri dan mengutamakan perhatiannya terhadap keselamatan agama, telah dibuktikan kembali dalam muktamar NU kesepuluh pada 13-18 April 1935, di Sala, Jawa Tengah. Muktamar secara terang-terangan menentang kebijaksanaan Belanda tentang pengangkatan pejabat yang berwenang mengurusi soal agama Islam. Apabila pemerintah kolonial tidak mengadakan syarat-syarat kemampuan ilmu agama Islam bagi pejabat yang hendak mengurusi soal keagamaan, NU akan membentuk badan tersendiri bagi kepentingan penyelesaian masalah-agama seperti perselisihan soal waris dan sebagainya. Dengan

demikian, NU semakin terlihat taringnya sebagai organisasi sosial keagamaan, yang secara keras menentang politik pemerintahan kolonial.

Tentu saja, sikap NU semacam itu semakin membuat ketakutan pemerintah Hindia Belanda akan kegagalan politiknya. Lebih-lebih ketika muktamar kesepuluh itu, jumlah anggota NU yang sudah terdaftar sekitar 67.000 orang, tersebar di 68 cabang di seluruh Indonesia. Ini berarti, NU sebagai ormas keagamaan tidak bisa dianggap remeh.

Bahkan pada muktamar kesebelas (8-12 Juli 1935): sebuah organisasi lokal di Kalimantan, Hidayatul Islamiyah, menyatakan bergabung ke dalam NU. Sedangkan pada muktamar keduabelas, 20-24 Juni 1937 di Malang, jumlah cabang-melonjak menjadi 84 dan tiga cabang baru di Sumbawa Besar dan Palembang. Kemudian pada saat Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942, jumlah cabang NU naik menjadi 120 cabang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, potensi ulama bermazhab di Indonesia telah terorganisasi, dan tinggal meningkatkan peranannya lebih luas lagi. Oleh karena merasa telah memiliki kekuatan, maka tidaklah heran jika kemudian sikap NU terlihat semakin keras terhadap politik pemerintahan Hindia-Belanda, terutama yang menyangkut urusan agama Islam. Misalnya, dalam muktamar kesebelas di Banjarmasin, NU kembali mengajukan mosi agar supaya pemerintah membatalkan niatnya mengadakan pencatatan sukarela perkawinan orang-orang yang hak perkawinannya belum ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, niat mengadakan pencatatan semacam itu, menurut NU, justru akan membuka

kemungkinan penyelewengan hukum Islam bagi para pemeluknya.

Begitu pula muktamar keduabelas di Malang, NU masih tetap mempersoalkan penyerahan kekuasaan urusan waris dari *Raad* agama kepada pengadilan negeri. Ini berarti perselisihan urusan waris tidak lagi diselesaikan berdasarkan hukum agama, tetapi justru hukum adat yang menjadi pegangannya. Selain itu, NU juga mempersoalkan niat pemerintah Belanda mengenai rencana penerapan undang-undang perkawinan. Baik masalah waris yang diserahkan ke pengadilan negeri maupun rencana pencatatan perkawinan, keduanya ditolak NU dalam muktamar keduabelas di Malang.

Seperti telah disinggung, semenjak pemerintah Belanda terlalu jauh mencampuri urusan agama, dan mulai tersebarnya tulisan-tulisan yang menghina Islam, maka, pertengkaran diantara kelompok pro mazhab dan bebas mazhab semakin menciut. Terlebih ketika KH. Hasyim Asy'ari dalam muktamar di Banjarmasin menyampaikan amanat cukup keras ditujukan kepada peserta muktamar, dan ummar Islam pada umumnya baik dari golongan ulama maupun awam.

Dalam amanatnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerukan terjalinnya persatuan umat Islam, dan membuang jauh pertengkaran soal khilafiyah, guna menghadapi siapa saja yang sengaja memusuhi Islam, Selanjutnya beliau mengatakan:

> *"Telah sampai kepadaku sebuah berita, bahwa diantara kalian sampai saat ini masih mengobarkan api fitnah dan perselishan, kalian masih saling unggul mengungguli lalu saling bermusuhan, Wahai sekalian ulama yang bertaassub kepada*

sebagian mazhab atau qoul ulama! Tinggalkanlah taassub kalian terhadap perkara perkara furu' (cabang). Tentang ini ada dua pendapat: pertama, bahwa setiap mujtahid itu benar, kedua, bahwa yang benar hanyalah satu, tetapi yang salah tetap mendapatkan pahala. Maka tinggalkanlah taassub kalian, tinggalkanlah keinginan nafsu tercela: pertahankan agama Islam dan berjuanglah menolak orang orang yang sengaja meremehkan Al-Qur'an dan Allah, serta orang-orang yang menyebarkan ilmu-ilmu bathil dan aqidah sesat. Adapun taassub kalian terhadap masalah furu' agama dan kegiatan kalian membawa orang hanya kepada satu mazhab saja dan qoul ulama saja, maka hal itu Allah tidak menerimakan dan Rosulullah tidak meridhainya. Apabila kalian melihat seseorang mengerjakan amalan atas dasar fatwa seseorang yang memang boleh ditaqlidi (diikuti) diantara imam-imam mazhab yang mu'tabar, maka apabila kalian tidak menyetujuinya janganlah kalian lantas bersikap keras. Berikanlah petunjuk dengan lemah lembut! dan apabila ternyata mereka tidak mau mengikuti pendapat kalian jangan lalu kalian musuhi. Sebab sikap seperti itu sama ibaratnya dengan orang yang membangun kota tetapi merobohkan istananya".

Mudah dipahami apabila KH. Hasyim Asy'ari menyerukan kepada ummat Islam, terutama kepada peserta muktamar NU di Banjarmasin, agar menjauhkan diri dari pertengkaran masalah-masalah furu'iyah. Sebab, betapapun besarnya kepentingan kelompok (dalam hal ini NU), apabila persoalannya sudah menyangkut nasib agama Islam, maka segala kepentingan kelompok itu harus segera ditinggalkan. Tugas pertama dan yang paling utama dalam kondisi semacam itu adalah merapatkan barisan, guna membela kebenaran Islam dan kemuliaan Rosulullah SAW dari caci-maki orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Caci maki yang dilancarkan oleh Siti Soemandari, misalnya, yang dimuat di majalah Bangun 15 Oktober 1937, cukup membangunkan kembali semangat persatuan kelompok-kelompok Islam. Soemandari dalam tulisannya, menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang 'pencemburu'. Tidak hanya itu. Siti juga "menuduh" peraturan perkawinan dalam Islam pada mulanya dimaksudkan hanya untuk membenarkan 'Nafsu Nabi' Penghinaan Soemandari itu bukan sekedar kebetulan dimuat di majalah 'Bangun', melainkan majalah milik Parindra (Partai Indonesia Raya) itu sengaja menyebar-luaskan tulisan Siti sebagai pembelaan terhadap rencana undang-undang perkawinan yang telah dimajukan pemerintah.

Jadi, persoalannya, semakin gawat karena menyangkut prospek ummat Islam Indonesia. Sehingga, kelompok-kelompok Islam mau tak mau harus bersatu padu menghadapi serangan dari luar tersebut. Barangkali karena itulah KH. Hasyim kembali menyerukan:

> *"Jangan kalian jadikan perdebatan itu menjadi sebab perpecahan, pertengkaran dan bermusuh-musuhan ataukah kita teruskan perpecahan, saling menghina dan menjatuhkan, saling mendengki kembali kepada kesesatan lama? Padahal agama kita satu: Islam. Mazhab kita satu: Syafi'i. Daerah kita juga satu: Indonesia (Ketika itu sebutannya Jawa). Dan kita semua ini juga serumpun Ahlussunnah wal jama'ah. Demi Allah, hal semacam itu merupakan musibah dan kerugian yang amat besar".*

Seruan keras Kyai Hasyim Asy'ari ini memang diperlukan sekali untuk mengetuk kesadaran ummat Islam yang (ketika itu) sedang suka-sukanya bertengkar. Pada sekitar tahun 1936 pertengkaran antara NU disatu pihak dan Muhammadiyah, Persis serta Al-Irsyad dipihak lain,

berlangsung cukup sengit. Setidaknya, itu terlihat dalam perdebatan di Ciledug, Gebang, Cirebon, Jawa Barat, Mei 1936. Kedua pihak seperti telah kesurupan fanatisme kelompok. Sehingga, masing-masing berusaha keras untuk saling menjatuhkan. Mereka baru terlihat bangga apabila celah berhasil menyerang dan atau menjatuhkan lawan. Mereka tampak bergairah bila berhasil mempertahankan 'khilafiyah furu'iyah' dengan dalil naqly maupun aqly-nya Namun mereka sepertinya lupa bahwa talqin mayit, selamatan, ziarah kubur, baca "ushalli" dan masalah masalah kecil lainnya itu, bukan prinsip agama, bukan pokok agama. Sementara itu, masalah besar yang mengancam nasib agama dan ummat Islam, tak pernah terlintas dalam perhatiannya dan dibiarkan begitu saja berlalu. Sampai pun sempat muncul kesans seolah tujuan dibentuknya perkumpulan Islam itu justru untuk meningkatkan pertengkaran di antara kita sendiri atau antar saudara sendiri.

Karena itulah, menjelang muktamar keduabelas di Malang 1937, Kyai Hasyim Asyari mengajak golongan Islam manapun untuk ikut hadir dalam muktamar tersebut. Ajakan itu tertulis dalam sebuah . undangan sebagai berikut:

> *"…….kemarilah tuan-tuan yang mulia, kemarilah. Kunjungilah permusyawaratan kami, marilah kita bermusyawarah tentang apa-apa yang terjadi baiknya Agama dan ummat; baikpun urusan agamanya dan dunianya sebab dunia ini tempat mengusahakan akhirat dan kebajikan tergantung pula atas beresnya perikeduniaan....."*

Seruan dan ajakan Kyai Hasyim Asy'ari selaku pimpinan tertinggi , NU itu, cukup mengetuk kesadaran seluruh pemimpin perkumpulan Islam. Bila semenjak 1927-1936 tidak lagi terdengar kegiatan 'Kongres Al-Islam' (yang

setelah muktamar dunia Islam di Makkah 1926 diubah namanya menjads MAIHS (Muktamar 'Alam Islami far'ul Hindis Syarqiyah), yang biasanya diprakarsai Syarikat Islam dan Muhammadiyah, maka sejak adanya seruan Kyai Hasyim itulah usaha untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa persatuan dan melepaskan tali-tali pertengkaran, mulai rampak dirintis kembali. Para pemimpin perkumpulan Islam mulai menyadari kembali akan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi kejayaan Islam dan umat Islam.

C. Masa Perlawanan Penjajahan Belanda

Di tengah penjajahan Belanda saat itu, kaum muslim pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia serentak menggalang kekuatan di daerah masing-masing. Gerakan yang tidak efektif dan tidak terarah sehihingga mudah di patahkan perlawanan itu. Politik kolonial Belanda saat itu berusaha melestarikan kekuasaannya dengan berbagai cara, baik melalui jalur politik, jalur sosial maupun jalur Agama. Belanda saat itu gencar melalui jalur agama dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dimana dalam sejarah bangsa ini perlawanan raja-raja di Indonesia terhadap Belanda sebagian besar juga berasal dari raja-raja muslim dan para ulama.

Gelar dan sebutan yang diberikan kepada ulama, di beberapa daerah bermacam – macam. Misalnya di daerah Jawa Barat (sunda) di sebut 'Ajengan', di wilayah Sumatera Barat dipanggil 'Buya'. Adapun di daerah Aceh disebut 'Teungku', kemudian di daerah Madura dipanggil 'Nun', 'Bindereh' atau 'Lora', sedangkan di Lombok dan sekitarnya (Nusa Tenggara) di sebut 'Tuan Guru'. Khusus masyarakat

Jawa diperuntukkan bagi ulama yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa disebut 'Wali'. Sering pula para wali ini juga dipanggil 'Sunan' (Susuhanan), seperti halnya para Raja.

Gelar lainnya adalah 'Panembahan' yang diberikan kepada ulama yang lebih ditekankan pada aspek spiritual juga menyangkut segi kesenioran, baik dalam segi usia maupun keturunan sebagai tanda bahwa ulama tersebut mempunyai kekuatan dan keajaiban spiritual yang tinggi. Dalam konteks Jawa juga terdapat sebutan 'Kiai' atau 'Kiai Haji' disingkat 'K.H' yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Oleh karena itu, sering dijumpai dipedesaan Jawa dipanggil 'Kiai Ageng' atau Ki Ageng/Ki Gede.

Perlawanan Islam kepada penjajah berlangsung hampir sepanjang massa. Mulai dari Sabang sampai Marauke. Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo misalnya melawan Belanda selama 5 tahun (1825 – 1830). Peristiwa lainnya juga dilakukan Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Maulana Hasanuddin Banten, Sultan Khairun dan Babullah di Ternate. Peristiwa lokal di tingkat desa dapat dilihat misalnya di Cianjur Sukabumi (1885), di Cilegon Banten (1888), dan di Garut (1919). Bukti dan fakta bahwa perjuangan umat Islam dan ulama dalam melawan penjajah Belanda seharusnya dipenuhi dengan lembaran – lembaran kisah sejarah pengorbanan umat Islam dan ulama. Dalam berjuang peranan ulama disamping memimpin perlawanan secara langsung di medan perang juga sebagai penggembleng semangat rakyat. Para pondok pesantren ketika itu juga dijadikan markas untuk menggembleng semangat para pejuang dan prajurit, dimana pada malam harinya pondok

pesantren berfungsi sebagai markas para gerilyawan, sedangkan pada siang harinya berfungsi sebagai tempat pendidikan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengaruh Ulama pesantren yang tidak kooperatif membuat pemerintah penjajah kalang kabut menghadapinya. Kenyataan seperti inilah melahirkan bermacam – macam kebijaksanaan dengan tujuan akhir membendung pengaruh ulama terhadap umat Islam di Indonesia. Misalnya kebijakan tentang dikeluarkannya ordonansi guru tahun 1905 mewajibkan setiap guru Islam (Ulama) harus meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu pemerintah Hindia Belanda, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Pada tahun 1925 ada perubahan ordonansi guru yang bersifat lebih melunak, karena hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri.

Selain kebijakan tentang ordonansi guru, terdapat juga ordonansi sekolah liar (yang dikelola Muhammadiyah dan Serikat Islam). Mulai sejak Tahun 1923, setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan harus memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala daerah setempat dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat pengajarannya.

Ordinansi tahun 1923 ini mewajibkan penyelenggara pendidikan untuk melapor, sementara itu kalangan luas pejabat Belanda menghendaki pengawasan lebih ketat. Pada tanggal 17 Oktober 1929, Schrieke (selaku direktur pendidikan) diperintah sekretaris negara untuk meninjau kemungkinan ditindaknya sekolah liar. Akan tetapi Schrieke

belum perlu untuk mengambil tindakan terhadap sekolah liar.

Dalam bidang sosial keagamaan terdapat Penghulu (Ulama pejabat – Ulama birokrat) adalah ulama yang kedudukannya dan peranan sosia keagamaannya berada di jalur *At-tasyri' wal qadla* yakni aktifitas sosial keagamaan yang menonjol sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum (syariat) Islam. Secara Historis Ulama – birokrat ini sudah ada sejak zaman kerajaan – kerajaan Islam di Jawa. Pada zaman mataram dengan rajanya Sultan Agung Hanyakrakusuma, para ulama juga ditempatkan pada posisi yang terhormat yaitu sebagai pejabat anggota dewan Parampara (Penasehat Tinggi kerajaan). Selain itu pula di dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga mahkamah agama Islam. Para pejabat yang menduduki posisi tersebut adalah ulama yang kemudian menjadi abdi dalem (pegawai keraton) dalam urusan keagamaan dan diketuai oleh penghulu.

Penghulu (ulama pejabat) juga terdapat di bebeapa daerah di tanah air, yaitu terdapat di daerah kabupaten – kabupaten yang menjadi bawahan wilayah kekuasaan kesultanan atau kasunanan atau mangkunegaran dan pakualaman. Hal yang demikian inilah sampai pada tanah Jawa yang di kuasai oleh orang – orang eropa (Belanda) dan kemudian kekuasaan tersebut di beri nama daerah gubernemen. Kenyataan ini juga tidak mengubah keadaan lembaga – lembaga yang sudah ada sejak sebelumnya. Oleh karena itulah sejak abad ke-17 orang – orang Eropa sudah menjumpai apa yang disebut dengan penghulu, dimana mereka menyebut penghulu dengan *"Opper-Priester"* dan

"Chiefs Priest". Namun orang – orang di daerah sunda menyebut penghulu, di daerah Jawa disebut pengulu, di daerah Madura disebut pengoloh dan di daerah Melayu di sebut Penghulu.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda (semasa Deandles) penghulu kabupaten di wilayah kekuasaan gubernemen mulai ditarik ke dalam lingkungan Pengadilan Negeri (disebut *Landraad*). Jabatan penghulu yang disandang dalam lingkungan Pengadilan Negeri adalah penasehat hukum adat, karenanya mereka disebut Kanjeng Penghulu *Landraad*. Dalam hal ini hanya kepala penghulu yang boleh merangkap jabatan ini. Jabatan ini berlangsung sampai masa akhir kekuasaan Hindia Belanda.

Adapun hirarki jabatan penghulu di Jawa adalah sebagai berikut:

- Tingkat pusat : Penghulu Ageng.
- Tingkat Kabupaten: Penghulu kepala / Hofd penghulu/ Hooge Priester/Penghulu Landraad/Khalifah.
- Wakilnya: Ajung Penghulu / Ajung Khalifah.
- Tingkat Kawedanan: Penghulu / Naib, dan wakilnya Ajung Penghulu.
- Tingkat Kecamatan: Penghulu / Naib.
- Tingkat Desa: Modin / Kaum / Kayim / Lebe / Amil.

D. Perjuangan NU Melawan Penjajah Belanda

Mengamati sejarah NU dari sudut pandang perjuangan politik, tak ubahnya menyaksikan kekuatan sosial kultural-politik yang mampu bertahab dalam setiap arus zaman dan dalam setiap perubahan, Kemampuan 'kaum sarungan' ini untuk selalu dapat bertahan tersebut berkaitan

dengan pola perilaku politik NU yang reaktif. Dan yang lebih terpenting lagi adalah upaya pemupukan semangat nasionalisme di tengah iklim penjajahan kaum Kolonialisme saat itu.

Sebagai Organisasi massa yang bersifat sosial keagamaan, ternyata Nahdlatul Ulama dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penjajah Belanda. Disini Nahdlatul Ulama menggunakan strategi sentuhan siraman rohani untuk melancarkan pengikatan propaganda masyarakat. Sebagai suatu bentuk Organisasi, maka apapun yang dilakukan daerah maka akan ada sebuah intruksi dari pusat, Dengan demikian hakekatnya apa yang dilakukan atau yang terjadi di suatu pengurus cabang ataupun sampai pengurus ranting (pengurus tingkata desa) harus tunduk dengan semua instruksi pengurus pusat dalam hal ini adalah HBNO (Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama). Sekarang menjadi PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Hoofd Bestuur adalah kata bahasa Belanda dalam artian Pengurus Pusat.

Salah satu pemikiran KH Mahfudz Shiddiq yang terkenal pada tahun 1935. Salah satu prestasi besar K.H. Mahfudz Siddiq pada waktu itu dengan mengusung sebuah konsep Mabadi' Khaira Ummah, sebuah konsep yang meletakkan dasar dan strategi untuk mengembangkan kehidupan ekonomi warga NU.

Konsep ini sampai sekarang masih berlaku di kalangan NU, meskipun dimensi dan sasarannya sudah dikembangkan. Konsep ini semula dipaparkan di arena Kongres NU ke-10 pada tahun (1935) di Solo. Kemudian Muktamirin menerima usulan K.H. Mahfudz Siddiq tentang Mabadi Khaira Ummah.

Mabadi Khaira Ummah, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengupayakan terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal dan terbaik, yaitu masyarakat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar.

Sebagaimana maksud firman Allah dalam QS Al-Imron 110 sbb:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Jadilah engkau sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Dan beriman kepada Allah.

Mabadi Khaira Ummah dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai:

1. *Ash-Shidqu*, Prinsip ini mengandung kejujuran /kebenaran kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran /kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan dan perbuatan sehingga ada korelasi ide, konsep dan implementasi. Kejujuran/kebenaran akan mengikis sikap inkonsistensi, oportunis, distorsi dan manipulasi. Setiap orang dituntut jujur kepada diri sendiri, kepada sesama dan kepada Allah. Kesungguhan maksudnya untuk mendorong keseriusan, profesional dan bertanggung-jawab. Keterbukaan adalah untuk kebaikan bersama sehingga perlu terbuka kepada orang lain.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar (QS Al-Taubah 119).

Merekalah itulah orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang yang bertaqwa.

2. *Al-'Amanah Al-Wafa'u bil `Ahdi* yaitu dapat dipercaya, setia dan dapat memenui komitmen yang telah dibuat yang berkaitan dengan pribadi, agama dan sosial. Manusia dituntut berkepribadian setia, patuh dan taat kepada Allah, Rosulullah SAW dan Penguasa yang baik dan adil. Kepercayaan membutuhkan konsistensi tanggung-jawab. Tepat janji merupakan komitmen atas kesepakatan dan kesungguhan melaksanakannya.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS An Nisa' 58)

3. *At-Ta'awun*, yaitu tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam mewujudkan kebaikan dan ketaqwaan. At Ta'awan bukanlah prinsip menopang destruktif yang dapat memperburuk kondisi sosial budaya. Mengembangkan sikap Ta'awun juga berarti mengupayakan konsolidasi interaksi sosial yang dapat disumbangkan menuju solidaritas sosial.

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS Al Maidah 2)

Dan pada Munas Alim Ulama NU di Lampung 21-25 Januari 1992, para Ulama menyempurnakannya dgn 2 nilai yaitu:

4. *Al-Istiqomah* yaitu kesinambungan, keberlanjutan dan kontinuitas sehingga mendorong manusia kukuh pada ketentuan Allah, Rosul, Salafus Shalih dan aturan kesepakatan bersama.
5. *Al-'adalah* yaitu obyektif, proporsional dan taat asas sehingga mendorong manusia kepada kebenaran obyektif dan bertindak proporsional. Prinsip adil otomatis mencita-citakan kebaikan dimuka bumi, termasuk berjuang untuk terwujudnya supremasi hukum

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An Nahl 90).

Resep sukses kyai dalam mengelola da'wah NU tsb sehingga NU kuat dan solid kedalam karena didukung anggota serta pengurusnya, bahkan juga dihormati oleh diluar NU diantaranya adalah istiqomah gerakan ngaji dengan sentuhan bisnis sehingga warga NU merasa butuh NU untuk didandani agar lebih benar islamnya. Hikmahnya adalah gerakan politik yang dilakukan pimpinan NU mendapat dukungan kuat dari warga NU serta simpati diluar NU karena kepentingan politiknya dapat dirasakan manfaatnya.

KH Mahfudz Shiddiq yang diberi amanah menjadi Presiden Tanfidziah HBNO sejak mandat dari kongres Muktamar ke-12 di Malang tahun 1937 – Tahun 1944, kemudian sempat merintis "Gerakan Mu'awanah", suatu gerakan tolong-menolong. Gerakan ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan dan menopang gerakan Mabadi' Khaira Ummah, lepas landas menuju tergalangnya umat pilihan.

KH Mahfudz Shiddiq yang berusaha melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda, juga berusaha melakukan kegiatan sosial keagamaan. Dalam hal ini mempelopori kegiatan Lailatul Ijtimak yaitu pertemuan secara rutin segenap anggota dan pengurus pada setiap tanggal 15 Qomariah kalender hijriah, guna melaksanakan sholat ghoib diteruskan kegiatan *tahlil* untuk anggota serta keluarganya yang meninggal pada bulan silam dan kemudian dilakukan kegiatan ceramah agama. Sebagai akhir dari acara lailatul ijtimak tersebut dilakukan pembacaan siaran pengurus HBNO (pengurus pusat), kadang kalanya pengurus HBNO mengedarkan teks doa ataupun pemberian

wirid yang harus dibaca oleh para warga nahdliyin. Selain itu pula disiapkan juga strategi perlawanan kepada Belanda oleh para pengurus NU.

Acara Lailatul Ijtimak tersebut dilaksanakan pada tiap langgar kampung sehingga strategi perlawanan melawan penjajah bisa terorganisir dari pusat bukan lagi melalui perlawanan kedaerahan. Ternyata acara pertemuan setiap tanggal lima belasan ini besar sekali dalam pengaruhya kepada anggota, seakan menciptakan kerukunan hidup hingga turun temurun dan sekaligus kesadaran berkeluarga besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama juga terpupuk. Lailatul Ijtimak ini sangat berarti bagi kelangsungan gerakan melawan penjajah pada waktu itu karena dilakukan dalam kegiatan keagamaan sehingga tidak menimbulkan kecurigaaan oleh kaum penjajah waktu itu.

Isi pertemuan tersebut biasanya dimulai dengan pengajian yang dipimpin oleh seorang kiai, kemudian diteruskan dengan *Tahlilan* untuk arwah warga NU setempat yang telah meninggal dunia. Dalam pertemuan itu juga untuk mendengarkan pembacaan brosur LINU (*Lailatul Ijtimak NU*). Pada brosur tersebut terdapat daftar orang NU yang telah meninggal dunia di berbagai daerah yang telah dicatat dengan benar oleh HBNO dan dikeluarkan secara rutin serta disebar luaskan keseluruh cabang NU setiap tanggal 15 bulan Qomariah tersebut. Setelah pembacaan nama – nama Almarhum, seorang Kiai tampil memimpin sholat gaib untuk si *amwat*. Sering pula dalam forum LINU tersebut diselipkan pemberitahuan mengenai perkembangan *Jam'iah Nahdlatul Ulama* baik di tingkat cabang, majelis anak cabang

maupun ranting dengan demikian hubungan sosial antara pengurus dan warga NU semakin erat dan kokoh.

Adapun selanjutnya untuk bulan Ramadhan tidak dilakukan pertemuan sepeti itu. Hal ini dikarenakan pada waktu bulan Ramadhan ini diharapkan pada seluruh anggota organisasi untuk melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran di rumah masing-masing ataupun di langgar yang ada di dekat rumah anggota masing-masing. Ketaatan mereka sejak dahulu sampai dengan sekarang dilakukan acara Lailatul Ijtimak ini didorong oleh faktor Karisma sang Presiden Tanfidziah HBNO KH Mahfudz Shiddiq yang turun langsung ke daerah – daerah dan tentu pula berkat karomah Hadratussyeh Hasyim Asyari. Selain itu pula mungkin ada juga rasa gotong royong kepentingan akherat dan terikatnya batin mereka dengan leluhurnya yang merupakan bentuk rasa kasih sayang pada yang telah tiada. Serta di dorong anggapan bahwa mereka semua akan berkumpul dan akan diselenggarakan semua usaha peringan tanggungan terhadap keluarga yang telah mendahuluinya.

Ketokohan K.H. Mahfudz Siddiq juga dikenal sebagai simbol modernitas di kalangan NU waktu itu. Sebagai kiai muda yang disegani masyarakat, beliau tak merasa canggung bila harus tampil di depan umum tanpa kopiah. Bahkan, konon, beliaulah tokoh di kalangan NU yang pertama kali berani tampil mengenakan dasi. Sebuah pilihan yang ketika itu oleh ulama NU sendiri diharamkan karena termasuk tasyabuh (menyerupai) kebiasaan kaum penjajah. Toh beliau mampu memberikan argumentasi di hadapan para kiai mengenai dasi sehingga dasi tidak lagi menjadi barang yang diharamkan untuk dipakai.

Suatu ketika ditanya oleh para kiai tentang Tasyabuh (menyerupai) kebiasaan kaum penjajah; " Kiai Mahfudz, *sampeyan* itu pemimpin organisasi islam terbesar yaitu kaum pesantren Indonesia, mengapa *sampeyan* senang memakai jas dan dasi serta tidak memakai kopiah? beliau menjawab: " bagi *kulo* Kiai, pesantren selalu ada di hati. Soal pakaian hanya untuk menutup aurat. Yang terpenting adalah akal pikiran dan perilaku kaum pesantren bisa untuk maju dan modern, bukan untuk meniru tradisi orang – orang kafir ini (Belanda dan Jepang).

K.H. Wahid Hasyim menyatakan bahwa tidak ada masalah besar yang tidak dapat diselesaikan oleh KH. Mahfudz selama jabatannya sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama. Gus Wahid jelas melihat K.H. Mahfudz sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah. Beliau tidak hanya dianggap sebagai organisator yang hebat, tetapi juga dianggap sebagai motor penggerak organisasi. Banyak masyarakat 1uar pesantren menyokong NU. karena ia menggunakan media NU, yaitu koran dan majalah, dan berani menampilkan tokoh-tokoh muda dari organisasi untuk berkontribusi pada kemajuan organisasi.

Pada tahun 1937, empat tokoh pergerakan Islam berkumpul di Surabaya, Jawa Timur untuk mendirikan federasi organisasi Islam. Mereka itu adalah KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Dahlan Ahyad (keduanya dari NU), KH Mas Mansyur (Muhammadiyah), dan Wondoamiseno (Syarikat Islam). Pertemuan para Kiai tersebut menyepakati berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI.

K.H. Mahfudz selaku Presiden HBNO menampilkan Kiai Wahid Hasyim (tokoh muda putra Hadratus Syech KH Hasyim Asy'ari) untuk menjadi ketua MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia) yaitu badan federasi partai dan organisasi Islam, PII (Partai Islam Indonesia), POII (Persatoean Oemmat Islam Indonesia), Al Irsyad, dan lain-lain. Ketika Kiai Wahid Hasyim mengundurkan diri, posisinya digantikan oleh KH M.Dahlan, yang juga tokoh NU. Peranan tokoh NU sangat dominan dan mewarnai dalam menentukan perjalanan MIAI.

Kiai Mahfud-pun duduk juga dalam kepengurusan MIAI sebagai komisi luar negeri MIAI, dan pada suatu moment MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia) bersama GAPI (Gabungan Politik lndonesia) berjuang dengan menuntut kepada Pemerintah Kolonial Belanda tentang Indonesia Berparlemen. Sebelumnya, hak-hak dasar bangsa Indonesia tidak mendapat tempat didalam pemerintahan Kolonial, sehingga kiai aktif menyuarakan gugatan kepada Pemerintah Belanda tentang penting adanyanya parlemen untuk menampung keluhan bangsa Indonesia.

Bahkan MIAI dan GAPI juga kompak menolak kewajiban milisi atau kewajiban membela pertahanan negara yang dibebankan bangsa Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Saat itu 18 Desember 1941, bersamaan dengan Pemerintah Kolonial Belanda memaklumkan perang terhadap Jepang sehingga Belanda terlibat dalam Perang Pasifik. Bangsa Indonesia yang berada dalam kolonial/jajahan Belanda, tentu saja berada dalam suasana tertekan karena aturan hukum perang tsb. Pemuda-pemuda

Indonesia dipaksa agar menjadi suka-relawan membantu Belanda untuk menghadapi Jepang.

Dalam Kongres Rakyat Indonesia pertama yang diselenggarakan oleh MIAI dan GAPI di Yogjakarta, Kiai Mahfud mengutus KH. Muhammad Ilyas dan Kiai Muhammad Dahlan dari PBNU untuk menghadirinya dan menyampaikan 2 hal yang substansial terkait kewajiban perang tsb. Kyai Ilyas ditugasi menjelaskan hukum Islam tentang ikut sertanya bangsa Indonesia dalam perang Pasifik dan KH. Muhammad Dahlan menjelaskan Hukum Islam mengenai transfusi darah guna keperluan Perang Pasifik. Pada forum kongres tsb, NU memutuskan, bahwa:

1. Yang berperang melawan Jepang adalah Pemerintah Belanda, bukan rakyat Indonesia.
2. Sehingga rakyat Indonesia tidak terikat oleh kewajiban perang tersebut.
3. Dan bila rakyat Indonesia nantinya mati dalam peperangan untuk kepentingan penjajah Belanda tsb maka hukumnya adalah mati sia-sia.

Sikap politik NU tsb adalah implementasi dari dalil-dalil fiqih (hukum islam) yang menjadi pedoman bagi para kyai dalam kehidupan sehari-harinya dan yang diajarkan kepada para santrinya. Rujukan fiqih tsb selalu dijadikan dalil pada setiap bahsul masail diniah yaitu membahas setiap masalah kemasyarakatan dari tinjauan agama.

Dalam kongres pertama MIAI ini juga membahas berbagai masalah penting untuk memajukan Islam dan Ummat Islam. Beberapa masalah yang dianggap penting, antara lain: meminta kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk mengusut pelaku penghinaan terhadap agama Islam,

Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. menolak pemindahan urusan waris dari "*Raad*" Agama ke tangan *'Hakim Land raad'* oleh pemerintah Hindia-Belanda; mengusahakan perbaikan masalah perjalanan haji; mengadakan propaganda Islam pada '*kolonisten'* dan berusaha membantu meringankan beban ummat Islam Palestina. Keputusan kongres pertama ini kemudian dikuatkan lagi dalam kongres kedua pada 2-7 Mei 1939 di Sala. Bahkan ditambah dengan masalah lain, yakni permintaan kepada pemerintah untuk membatalkan niatnya mencabut artikel 177 dan 178 Indische Staatsregeling. Artikel 177 mengatur pembatasan penyiaran agama Kristen di Indonesia, sedangkan artikel 178 mempersempit gerak penyiaran-agama Islam. MIAI meminta pemerintah agar mencabut artikel 178 karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, kongres kedua juga memutuskan: mewajibkan kepada ummat Islam untuk melakukan do'a *'qunut nazilah*' untuk keselamatan ummat Islam Palestina yang diserbu Israel.

Kiai Mahfudz Shiddiq yang juga seorang pemimpin NU hasil Muktamar ke 12 di Malang yang dikenal secara internasional, apalagi terkait gerakan NU pada tiap 27 Rajab sebagai Pekan Rajabiah dalam peringatan Isro' Mi'roj Nabi yang sekaligus untuk menggalang aksi solidaritas ummat Islam sedunia terhadap masalah Palestina. Tradisi Pekan Rajabiyah NU dalam bentuk Do'a Qunut Nazilah dan pengajian para kiai untuk mengobarkan motivasi solidaritas ummat Islam Indonesia terhadap perjuangan bangsa Arab dan Palestina, khususnya cita-cita meraih kemerdekaan

menghadapi penjajahan Inggris dan aksi-aksi Yahudi Internasional.

Dalam kegiatan aksi solidaritas terhadap kemerdekaan Palestina menghadapi aksi – aksi Yahudi bukan hanya dilakukan oleh kelompok yang mengaku paling peduli terhadap kemerdekaan Palestina akhir – akhir ini saja, melainkan sudah dilakukan aksi solidaritas terhadap kemerdekaan Palestina oleh kaum Nahdliyin ketika zaman Hadratussyeh Hasyim Asyari dan Presiden Tanfidziah HBNO KH Mahfudz Shiddiq.

Peranan NU didalam MIAI semakin menonjol. Terutama ketika diadakan rapat pleno anggota MIAI pada 14-15 September 1940 di Surabaya, KH Wahid Hasyim (wakil ketua HB NU) telah banyak mengajukan perubahan-perubahan mendasar, guna kemajuan MIAl dimasa mendatang. Perubahan pun terjadi pada Anggaran Dasar dan Tetangga MIAI serta struktur kepengurusannya.

Struktur kepengurusan tidak lagi berbentuk badan sekretariat, tetapi menjadi 'Dewan MIAI' dan 'Sekretariat'. Dewan MIAI terdiri dari 5 orang wakil dari perhimpunan anggota MIAI yang tergolong besar. Sedangkan untuk sekretariat terdiri dari tiga orang: Ketua, Penulis dan Bendahara yang ketiganya dipilih oleh dewan MIAI.

Dalam pleno tersebut, KH. Wahid Hasyim (Wakil Ketua HB NU) terpilih sebagai Ketua Dewan MIAI, W. Wondoamiseni (Wakil HB. SI) sebagai Wakil Ketua, S. Oemar Hoobeis (Al-Irsyad), KH. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan Dr. Soekiman (PII) masing-masing sebagai anggota Dewan. Sedangkan H. Faqih Usman (Muhammadiyah) sebagai ketua sekretariat, Abdul Kadir

Bahalwan (SI) sebagai penulis dan Sastradiwirja (Persis) sebagai bendahara.

Selain itu, perubahan Anggaran Dasar dan Tetangga MIAI disetujui dengan menampilkan tujuan badan federasi tersebur sebagai berikut.

> *1) Menggaboengkan segala perhimpoenan-perhimpoenan oemmat Islam Indonesia oentoek bekerdja bersama-sama, 2) Beroesaha mengadakan perdamaian apabila timboel pertikaian diantara golongan oemmat Islam Indonesia, baik jang telah tergaboeng dalam MIAI maoepoen jang beloem, 3) Merapatkan perhoeboengan diantara oemmat Islam dengan Oemmat Islam di loear Indonesia, 4) Berdaja oepaja oentoek kemaslahatan Islam dan oemmatnja, 5) Membangoen Kongres Moeslimin Indonesia (KMI).*

Dengan. terumuskannya. tujuan singkat, maka, MIAI telah menempatkan diri sebagai satu-satunya wadah yang bertugas memperjuangkan Islam dan ummat Islam Indonesia. Gerak dan langkah MIAI tidak lagi terbatas pada perjuangan Islam dan ke Islaman, akan tetapi juga melebar pada perjuangan kepentingan ummat Islam sebagai warga negara. Oleh sebab itu, apabila kemudian diketahui MIAI membicarakan soal tata-negara maupun politik, bukan berarti federasi tersebut terlalu masuk ke gelanggang politik. Melainkan karena keadaan yang menyangkut soal nasib ummat Islam Indonesia berada dalam tanggungjawab MIAI.

Menjelang Kongres Muslimin Indonesia ketiga di Sala pada 7-8 Juli 1941, Dewan MIAI seringkali mengadakan sidang. Dalam beberapa kali sidang yang sering bertempat di Jombang (mungkin sekali di Tebuireng), berbagai masalah baik politik, sosial maupun keagamaan telah dibahas secara panjang lebar. Di bidang agama, misalnya, sidang Dewan

MIAI di Jombang telah memutuskan membentuk "Komisi Pemberantas Penghinaan Islam'. Dibidang sosial, MIAI telah berusaha dan berhasil memulangkan ribuan ummat Islam Indonesia yang terlantar di Makkah.. Sampai pada Juli 1941 (juga direncanakan bulan berikutnya bertambah besar jumlahnya) tercatat 914 jiwa yang berhasil pulang kembali ke Indonnesia. Selain itu, juga berusaha dan berhasil meminta pada "Consul Belanda" di Kairo, membantu keuangan bagi pelajar Indonesia yang terlantar di Mesir Ketika itu, Consul tersebut telah memberikan bantuan sebagai pinjaman sebesar @ f 6.50 per bulannya.

Di bidang perhubungan antar ummat Islam, MIAI berhasil mengirimkan delegasi ke Jepang menghadiri undangan perkumpulan Nippon guna mengunjungi "The Islamic Exhibition di Tokyo dan Osaka". Sedangkan dibidang politik, MIAI telah memberikan dukungan. sepenuhnya terhadap tuntutan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) terhadap cita-cita Indonesia Berpalemen. Bahkan kemudian hubungan antara GAPI dan MIAI itu ditingkatkan dalam bentuk penandatanganan pernyataan bersama dalam menuntut Indonesia Berpalemen.

Puncak perjuangan MIAI agaknya berada pada "Kongres Muslimin Indonesia" ketiga (5-8 Juli 1941) di Sala. Kongres ini didahului sidang pleno Dewan MIAI yang betul-betul pelik mengenai tiga masalah penting: Perubahan tata-negara, soal milisi dan Bloodtransfoesie (pemindahan darah). Tentang perubahan tatanegara, sidang memberikan kesempatan pada kedua pembicara utama masing: masing: A. Goffar Ismail (wakil PB PII) dan Abikoesno Tjokrosoejoso (PSIT). Sedangkan mengenai masalah 'milisi-

dienstplitchr', sidang mempersilahkan kepada wakil HB NU KH. Ahmad Ilyas untuk membuat pertimbangan (konsiderannya). Dan untuk soal 'Bloodtransfoesie' terjadi perang pendapat yang cukup sengit antara Persis dan PB PII dan HB NU.

Dalam hal ini, Persis memperbolehkan 'Bloodiransfoesie' oleh karena hal tersebut (sama halnya dengan) ikhtiar menolong atau mengobati orang sakit, terutama yang kekurangan darah dengan cara memindahkan darah dari orang yang sehat kepada si sakit. Namun PB PIL dan HB NU memberikan dua alternatif, pertama, pemindahan darah ke lain tubuh yang kekurangan darah guna pengobatan, maka hukumnya seperti pemberian. Kedua, jika karena pemberian itu akan terjadi suatu perkara terlarang, misalnya untuk peperangan yang tidak diridloi Allah SWT, maka hukumnya terlarang.

Namun demikian, Kongres Muslimin ketiga itu berakhir dengan keputusan bulat: melarang atau mengharamkan 'Bloodtransfoesie' untuk kepentingan membantu peperangan Belanda, mengharamkan milisi 'dienstplicht' karena perbuatan itu berarti membela pemerintah yang kafir. Sedangkan mengenai perubahan tata negara: menuntut Indonesia Berpalemen berdasarkan Islam.

Dari sini bisa kita lihat bahwa MIAI telah menempatkan diri sebagai satu-satunya badan federasi ummat Islam yang utuh. Dan ia betul-betul bergerak maju membawa aspirasi ummat Islam dalam segala hal, terutama dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang hakiki.

Tentu saja sangat tidak beralasan untuk memisahkan peranan MIAI dari kerangka sejarah perkembangan NU. Sebab baik dilihat dari sudut historis maupun dari semangat yang membentuk diri MIAI menjadi besar, tidak pernah lepas dari peranan NU. Menjelang berdirinya MIAI, KH. Hasyim Asy'ari terlebih dulu menyerukan persatuan ummat Islam untuk menghadapi golongan luar, yang mulai melancarkan aksi menyerang Islam. Setelah itu, KH Ahmad Dahlan, tokoh NU yang paling dekat dan pernah menjadi wakil KH. Hasyim Asy'ari dalam kepengurusan NU 1926, bersama KH. Abdul Wahab Hasbullah yang juga pelopor NU, dibantu KH. Mas Mansur Pimpinan Muhammadiyah dan W. Wondoamiseno dari Syarikat Islam, menseponsori berdirinya MIAI. Ini berarti, ide mendirikan-MIAI tidak bisa lepas dari kerangka usaha pengembangan NU dalam perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Dan karena itu, tampak benar usaha NU untuk membersihkan MIAI dari percikan pertikaian masa lalu, dengan cara mengubah nama 'Kongres Al-Islam' menjadi 'Kongres Muslimin Indonesia'.

Terlebih lagi dilihat dari perkembangan MIAI berikutnya yang ternyata berada dalam kepemimpinan KH. A. Wahid Hasyim, seorang tokoh muda NU yang berpandangan luas dan bercita-cita luhur, berusaha keras mempersatukan ummat Islam demi perjuangan bangsa dan agama. Dalam beberapa pidatonya sebagai Ketua Dewan MIAI, KH. A. Wahid Hasyim pernah mengatakan:

> "Sepandjang perdjalanan riwajat, sedjak doenia berkembang hingga kini, beloem pernah bertemoe soeatoe oemmat. menempati kedoedoekan jang berarti, soatoe oemmat dihoemati oleh doenia,

> ketjoeali djika oemmat itoe bertjita-tjita jang tinggi, oemmat itoe bertoedjoean jang loehoer berkeinginan jang agoeng. Soatoe oemmat jang peoas dengan angan-angan jang remeh, pocas dengan pikiran jang tidak ada artinja akan tetap: selama-lamanya didalam kedoedoekannja jang remeh poela, didalami tempat jang tidak berarti sebagaimana fikirannja itoe. Tjita-tjita jang tinggi dan angan-angan jang loehoer bagi tiap-tiap oemmat adalah seoempama sinar matahari bagi toemboehnja badan. Sebagaimana telah makloem, soeatu toeboeh jang tidak mendapat sinar matahari jang coekoep, besar kemoengkinannja. Akan dihinggapi 'Engelshe Ziekte', loempoeh dan lemah badan. demikianpoen socatoe oemmat jang tidak bertjita-tjita loehoer jang tjoekoep besar kemoengkinannja berpenjakitan loempoeh, lemah dan: tidak berdaja menghadapi 1001 matjam soeal gama hidoep.

Tidak ada oetjapan jang amat moedah dikeloearkan semoedah mengatakan sembojan jang oemoem dikeloearkan orang jaitoe: Bersatoe menjebabkan tegoeh dan bertjerai menjebabkan djatoeh. Soenggoeh moedah benar mengoetjapkan hal itoe, akan tetapi memperboeatnja adalah jang paling soekar dan paling roemit. Persatoean tidaklah dapat berwoedjoed, ketjoeali apabila sekalian-bagian jang akan dipersatoekan soeka dan maoe akan bersatoe, sekalian tjabang-tjabang jang akan dipersatoekan rela hati dan ingin akan bersatoe. Organisatie sesoeatoe oemmat, djika ingin tegoeh, jika ingin kokoh dan koeat, haroeslah didasarkan atas anggapan tadi. Seseorang jang diletakkan dimoeka oleh organisatie, haroeslah berada ditempat jang dioentoekkan dia itoe, akan tetapi djikalau organisatie menghendaki supaja

jang dimoeka itoe memberikan tempat kepada oranglain oentoek bertempat dimoeka, haroeslah ia berboeat sebagai kemaoean organisatic, Begitoepoen orang jang ditentoekan dibelakang, haroeslah ia berboeat sebagaimana jang ditentoekan organisatie itoe, haroeslah ia bekerdja seperti jang ditetapkan kepadanja. Dalam pada itoe, baik jang dimoeka maoepoen jang dibelakang, sama sadja harganja, sama sadja kedoedoekannja, sama sadja artinja: Satoe oentoek semoea dan semoea oentoek satoe. Bersediakah kiranja oemmat Islam Indonesia oentoek itoe? Sedjarah dimasa jang akan datang akan memboektikan sendiri. Djikalaoe oemmat Islam insaf soenggoeh-soenggoeh akan hal ini, tentoelah ia akan bersatoe, akan berhimpoen mendjasi satoe, akan berkoempoel mandjadi satoe. Marilah kita berdjalan bersama-sama. Allah ada pada sisi kita."

Tampilnya KH.A. Wahid Hasyim sebagai Ketua Dewan MIAI, jelas merupakan usaha mengibarkan bendera NU sebagai penggerak persatuan ummat Islam Indonesia. Dan kemudian menempatkan posisi ummat Islam diperhitungkan oleh pihak lain, terutama pihak pemerintah Hindia-Belanda pada masa itu. Terlebih lagi-penampilan KH. A. Wahid Hasyim di arena percaturan politik yang cukup gemilang, baik dimasa pra-kemerdekaan, revolusi maupun masa kemerdekaan. Semua itu telah memaksa kita mengakui keterlibatan NU dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.

Sejalan dengan kemajuan MIAI, NU mengadakan peningkatan dan perbaikan di segala bidang. Seperti telah diketahui bahwa pada muktamar NU kelima di Pekalongan (1930), telah memutuskan untuk mendirikan badan wakaf

'Lajnah Waqfiyah' di setiap cabang NU. Badan tersebut bertugas mengurus harta wakaf maupun harta lain yang bukan berasal dari wakaf, guna keperluan sosial NU, Badan ini kemudian pada 1937 ditingkatkan lagi sebagai Badan Waqfiyah NU yang tidak hanya bertugas memelihara harta wakaf dan bukan wakaf, tetapi boleh membeli, mempunyai atau menguasai (menjadi nadzir) tanah-tanah wakaf, berdasar atas asas Islam bermazhab salah satu dari empat imam.

Selain itu, atas prakarsa ketua NU KH. Mahfudz Shiddig, pada masa itu juga didirikan badan-badan koperasi disebut 'Syirkah Mu'awamah' di cabang-cabang NU. Koperasi kemudian berkembang diberbagai tempat, tetapi yang terlihat berhasil dan berkembang adalah di Surabaya, Singosari-Malang, Bangilan dan Gresik. Ketika itu direncanakan mengimpor sepeda dari Singapura, tetapi gagal. Namun bisa dicatat kemajuan dalam mengimpor barang pecah belah dari Jepang yang diberi tanda (cap) simbol Nahdlatul Ulama.

Di bidang pendidikan, melalui muktamar ketigabelas di Menes, Banten, 11-16 Juni 1938, NU memutuskan membentuk badan otonom yang bertugas mengembangkan pendidikan NU dan badan tersebut diberi nama 'Ma'arif NU' yang dalam perkembangan berikutnya lebih dikenal dengan nama "LP Ma'arif" (Lembaga Pendidikan Ma'arif). Badan otonom tersebut dipimpin langsung KH. A. Wahid Hasyim, yang memang sebelumnya (12 Pebruari 1938) ia telah mengadakan konferensi khusus bagian pendidikan NU Jawa Timur di Singosari-Malang. Apa yang dihasilkan oleh konferensi . Malang itu, oleh KH. A. Wahid Hasyim dibawa

ke muktamar Menes dan berhasil disetujui untuk meningkatkan pendidikan dikalangan sekolah NU.

Tentang konsep strategi pengembangan sekolan NU ini antara lain: membagi madrasah NU menjadi madrasah 'umum' dan madrasah "ikhtisasiayah" (kejuruan) seperti, pertukangan, pertanian, hukum maupun perdagangan dan sebagainya. Sedangkan madrasah "umum" dibedakan menurut jenjang: Madrasah Awwaliyah (semacam TK) dengan masa pendidikan dua tahun, Madrasah Ibtida'iyah (semacam SD) selama tiga tahun: Madrasah Tsanawiyah (semacam SMP) selama tiga tahun, Madrasah Mu'allimin Al Wustha dan Al-Ulya (semacam Pendidikan Guru Agama (PGA) menengah dan atas) selama tiga tahun. Sedangkan kurikulum dipergunakan campuran agama dam umum. Dan nama madrasah diharuskan mencantumkan nama NU.

Namun perubahan mendasar seperti itu tidak berarti bersih dari hambatan maupun rintangan. Pada mulanya, para pendidik di kalangan NU belum tertarik bahkan menolak-kurikulum pelajaran umum. Bisa dimengerti, karena pada saat itu semangat anti Belanda telih memasuki sendi kehidupan masyarakat NU yang amat dalam. Sehingga segala apa yang dilakukan Belanda dianggapnya membahayakan ummat Islam. Namun, karena kegigihan KH. A Wahid Hasyim didalam memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada para pendidik NU, akhirnya berbagai sekolah NU berkembang menjadi bentuk sekolah moderen yang mengajarkan kurikulum campuran agama dan umum.

Keinginan NU untuk memajukan pendidikan semakin terlihat ketika muktamar keempatbelas di Magelang, pada 15-21 Juli 1939. Selain muktamar ini memutuskan berbagai

masalah yang juga dimajukan dalam MIAI, seperti masalah pencabutan artikel 117 Indisehe Staatsregeling (Undang Undang Dasar), masalah pemindahan *Raad* agama ke Hakim Landraad, masalah hukuman berat bagi penghina Islam dan lain sebagainya, juga menuntuk kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk mencabut "Ordonansi Guru" 1925 guna melepas ikatan pengajaran Islam dari penyempitan peraturan pemerintah, Selain itu, muktamar juga mendesak pemerintah untuk tidak memberi subsidi kepada usaha atau sekolah manapun, oleh karena pemberian subsidi itu sendiri justeru menyalahi prinsip netral terhadap agama.

Sikap penolakan NU terhadap pemberian subsidi itu didasarkan pada kenyataan yang tidak mencerminkan keadilan. Perbandingan antara dana yang diberikan atau diperbantukan kepada Katholik dan Protestan dengan yang diberikan kepada organisasi-organisasi Islam betul-betul tidak berimbang.

Perbandingan dana bantuan subsidi itu lengkapnya seperti dibawah ini:

Tabel 6. 2 Bantuan subsidi untuk umat islam di masa penjajahan Belanda

Tahoen	Oentok Protestan & Katholik	Oentok Islam
1920	f 1.010.100	f 5.900
1921	f 1.110.100	f 5.900
1922	f 1.077.100	f 5.900
1923	f 1.095.100	f 5.900
1924	f 1.116.100	f 5.900
1925	f 1.115.000	f 4.000
1926	f 1.108.000	f 4.000

1927	f 1.417.000	f 4.000
1928	f 1.748.000	f 4.000
1929	f 1.728.000	f 4.000
1930	f 1.641.000	f 4.000
1931	f 1.612.000	f 4.700
1932	f 1.862.300	f 7.700
1933	f 1.601.300	f 7.700
1934	f 1.511.500	f 7.700
1935	f 1.761.500	f 7.700
1936	f 1.007.500	f 7.700
1937	f 1.004.500	f 7.700
1938	f 1.022.500	f 7.700
1939	f 1.197.500	f 7.700
1940	f 1.304.400	f 4.600

Sumber: Dari Majalah 'Berita Nahdlatul Oelama' (Th.9, 11/37)

Dibidang kewanitaan, pada muktamar ketigabelas di Menes, Banten, 1938, NU membentuk organisasi wanita yang diberi nama **'Nahdlatoel Oelama Bahagian Moeslimat'** (NOM). Organisasi ini diawal berdirinya bertujuan: mendidik dan mengajar kaum muslimat, agar supaya menjadi isteri dan ibu yang utama dari "Ahlussunnah Wal Jamaah" mengadakan pengajaran dan pendidikan; kursus dan dakwah; mendirikan dan mengurus madrasah bagian banat (perempuan) dan mengusahakan kerajinan dan jalan mendapat rezeki yang halal. Organisasi wanita NU ini kemudian berkembang pesat dengan nama "Muslimat NU", terutama setelah mendapat pengesahan dan persetujuan muktamar NU kelimabelas di Surabaya.

Muktamar kelimabelas pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, merupakan muktamar terakhir bagi NU di masa penjajahan Belanda. Tentu saja, penting untuk dikemukakan disini berbagai hal yang dibahas dalam muktamar tersebut. Sebab, seperti telah disinggung, semenjak berdirinya MIAI, keterlibatan NU didalam perjuangan kemerdekaan semakin menonjol. Sampai pun ketika MIAI berada dalam front kesatuan bersama GAPI menuntut Indonesia Berpalemen, NU tidak henti-hentinya memberikan dukungan. Dan bahkan sejak semula, ketika GAPI mengadakan "Kongres Rakyat Indonesia" (KORINDO) di Batavia (Jakarta), 23-25 Desember 1939 untuk menuntut Indonesia Berparlemen, NU mengutus KH Mahfudz Shiddig untuk mengikuti kongres tersebut sebagai manifestasi kesepakatan dan persetujuan NU terhadap tuntutan GAPI.

Namun, sejauh tuntutan GAPI yang memerlukan bentuk aksi, NU memberikan keleluasaan kepada beberapa tokoh yang dianggap representatif untuk melakukan hal itu melalui MIAI. Karena itu, tokoh-tokoh NU yang berada di MIAI selalu tampil bersama GAPI dalam setiap aksi menuntut Indonesia Berparlemen. Sebagai contoh, misalnya front kesatuan antara GAPI dan MIAI yang melahirkan aksi bernama KORINDO (Kongres Rakyat Indonesia). Duduk dalam kepemimpinan KORINDO (kepengurusannya menggunakan sistem presidium secara bergiliran) adalah: Mr. Sartono, Dr. AK. Gani (Gerindo), KH. A. Wahid Hasyim (NU), Abikoesno Tjokrosoejoso (PSII), Soekardjo Wirjopranoto (Parindra), Wirjoningrat (Parindra), KH. Mahfudz Shiddiq (NU), Atiek Soewardi (Pasundan), KH.

Muhammad Ilyas (NU), Kasimo (Katholik) dan Ds. Leimena (Kristen).

Karena itu, perlu dikemukakan disini mengenai berbagai hal yang diputuskan dalam muktanmar NU menjelang runtuhnya pemerintahan Hindia-Belanda. Seperti keterlibatan NU dalam perjuangan bangsa sebagaimana terurai diatas, maka muktamar kelimabelas ini pun selain memutuskan berbagai masalah keagamaan, juga mendesak pemerintah. Hindia-Belanda untuk segera mengadakan perbaikan dan tindakan terhadap beberapa hal, seperti misalnya: memberikan pertolongan kepada jamaah haji Indonesia yang menderita di Makkah akibat pecahnya perang antara Jerman dan Belanda; mencabut "Goeroe Ordonantie 1925"; memberikan kebebasan kepada muballigh dan guru agama untuk mengajarkan Islam; memberikan kuasa penuh kepada pengurus masjid untuk mempergunakan kas-kas masjid bagi kepentingan kemaslahatan Islam; menindak tegas para penghina Islam dan memindahkan pelanggar makam Islam ke tampat lain, membatalkan niat mencabut artikel 117, tetapi pemerintah harus mencabut artikel 178 dan meniadakan pemberian subsidi karena menyalahi prinsip netral terhadap agama.

Keputusan lain, mengadakan aksi pengembalian pelajar Indonesia dari Saudi Arabia semata-mata karena pecahnya Perang Dunia II melarang pemuda Indonesia, khususnya pemuda Islam untuk memasuki milisi Belanda, mengharamkan pemberian sumbangan darah bagi kepentingan militer Belanda, dan lain sebagainya.

Namun, keputusan yang paling penting dalam muktamar kelimabelas, adalah mengenai sikap NU terhadap

calon kepemimpinan nasional. Dalam muktamar ini NU telah yakin bahwa kemerdekaan akan segera tercapai. Sehingga perlu mengadakan rapat tertutup guna membicarakan siapa. calon yang pantas untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan 11 orang tokoh NU dipimpin KH. Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama: Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Rapat berakhir dengan kesepakatan: Ir, Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Muhammad Hatta (ketika itu) hanya mendapat dukungan satu suara, sebagai wakilnya.

Beberapa uraian diatas memberikan kesan bahwa, semasa penjajahan Belanda, selain NU tetap berikhtiar memajukan bidang pendidikan, dakwah maupun sosial, juga peka terhadap masalahmasalah kemasyarakatan terutama masalah perjuangan menuju tercapainya kemerdekaan yang hakiki. Pembahasan calon presiden pertama dalam muktamar kelimabelas tersebut, menunjukkan kematangan NU didalam mengkaji masalah-masalah sosial-politik masa itu, dan juga merupakan bukti keterlibatan dirinya pada setiap tahapan perjuangan bangsa. Kesan lain, dapat pula dikemukakan bahwa kontinyuitas muktamar selama masa penjajahan Belanda berjalan tertib setiap tahun. Ini berarti, semangat pengorbanan guna memajukan organisasi baik di kalangan pemimpin, warga dan anggota NU maupun pendukungnya terbina dengan baik. Sehingga, dana dan tenaga bisa tercurah dengan mudah guna mensukseskan muktamar setiap tahun.

E. Diundang Pemerintah Jepang

Disaat NU dipimpin KH Mahfudz Shiddiq sebagai Presiden HBNO dan Hadratus Syaikh Hasyim Asyari memimin NU, NU berhubungan dengan ummat Islam dinegara lainnya. Terbukti kemudian kyai meresmikan NU cabang khusus Mesir. Keberhasilan KH Mahfudz Shiddiq dan Hadratussyaih Hasyim Asyari memimpin NU menarik perhatian luar negeri. Bahkan pada oktober tahun 1935, Jepang berusaha menarik simpati dari tokoh – tokoh muslim untuk diundang ke negara Jepang. Acara ini diadakan oleh *Dai Nippon Kaiyokai* (Perkumpulan umat Islam Jepang) mengadakan pekan Islam yang diadakan di Tokyo dan Osaka selama 3 minggu.

Acara itu sendiri sebenarnya diadakan oleh Angkatan Darat Jepang guna bertujuan melancarkan jalan bagi rencana ekspansi mereka ke negara – negara yang berpenduduk muslim. Dalam acara tersebut salah satunya Kiai Mahfud (NU) bersama tokoh muslim Indonesia lainnya yaitu: Mr. R. Kasmat dari PII/Persatuan Islam Indonesia, KH. Abdul Kahar Muzaqqir dan KH. Farid Ma'ruf dari Muhammadiyah diundang ke Jepang selain acara pekan Islam juga untuk menghadiri peresmian Masjid di kota Kobe. Karena sesungguhnya yang menyelenggarakan acara pekan islam tersebut adalah angkatan darat Jepang maka data pribadi keempat tokoh itu telah terekam jejaknya oleh badan intelijen Jepang

Kunjungan ke Jepang itu dimanfaatkan kiai untuk mempelajari resep kemajuan ekonomi Jepang sehingga dapat tumbuh cepat. Setibanya dari Jepang, kiai menggalang program ekonomi didalam NU yaitu al-Mu'awanah alias

ekonomi gotong royong, suatu koperasi berdasar swasembada di kalangan pribumi.

Program Ekonomi kerakyatan inilah yang diberikan kesemua daerah – daerah basis NU. Bahkan di NU Jember, Syirkah Mu'awanah yang dirintis oleh kyai bersama Kiai Dhofir dan Kiai Amirudin, berkembang pesat.

Kiai Dhofir sebagai Ro'is Syuriah NU Cabang Jember yang juga merangkap sebagai pimpinan Syirkah bersama Kiai Amirudin selaku Ketua Tanfidziah-nya dan tokoh penting didalam syirkah, mengelola syirkah menempati kantor yang representative diperempatan muka pasar Tanjung.

Usaha syirkah yang utama adalah pengelolaan sembako, minyak dan kain yang amat dibutuhkan warga NU saat itu. Maklum era penjajahan menjadikan kemiskinan yang melanda warga NU. Melalui syirkah, warga NU dapat terbantu untuk pemenuhan sembakonya dan kain untuk kebutuhan sandangnya.

Gambar 6. 5 Peresmian masjid Kobe, Jepang

Hasil kunjungan dari Jepang selain mempelajari perekonomian, Kiai Mahfudz pernah bercerita kepada keluarganya bahwa negara Jepang memang negara besar yang mempunyai pertahanan dan pasukan tentara yang kuat dengan kecanggihan peralatan perangnya. Semua modal itu belum cukup karena negara Jepang tidak mempunyai sumber daya alam (SDA) yang cukup untuk menjadi negara adikuasa.

Kiai Mahfudz bahkan berkata kepada puteranya KH Saiful Bari:" Ful, siap – siap saja negara kita akan di jajah Jepang, karena mereka butuh sumber daya alam (SDA) untuk kebutuhan negaranya. Akan tetapi, mereka tidak akan lama di negara kita karena mereka tidak akan kuat melawan

kekuatan sekutu". Jadi KH Mahfudz sudah memperkirakan Indonesia akan ganti di jajah Jepang sejak melihat langsung keberadaan negara Jepang tersebut.

Begitulah beliau sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi setelah menganalisa keberadaan negara Jepang setelah kunjungannya ke Negara tersebut. Pada saat itu banyak orang Indonesia yang memilih memihak Jepang, namun sebagian dari alasan mereka bersikap mistik. Banyak penduduk Indonesia pada masa itu yang percaya dengan ramalan Joyoboyo. Ramalan tersebut, antara lain menyebutkan bahwa "akan datang bangsa berkulit kuning dari utara, berperawakan tidak tinggi, pendek juga tidak. Mereka itu nanti akan menduduki tanah Jawa tetapi hanya seumur tanaman jagung. Dan akan kembali ke negerinya sendiri pula". Bagi kelompok yang mempercayai ramalan joyoboyo tersebut, kedatangan Jepang adalah sarana untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kekhawatiran akan terpengaruh ramalan joyoboyo terhadap kekuasaan hindia Belanda, akhirnya pemerintah kolonial bersikap keras tehadap orang membicarakannya secara terbuka. Dan ini kemudian membawa malapetaka kepada MH.Tamrin. Beliau ini dengan berani membicarakan ramalan tersebut di *Volksraad* dengan mengutip suatu kalimat yang ditafsirkan sebagai berikut: 'ketika pemerintahan Belanda lenyap maka akan tiba waktunya bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmuran dan kebahagiaan'.

Akibat ramalannya itulah pada Januari 1941 polisi Belandalangsung menahan MH Tamrin dan juga Dous Dekker yang menjabat seketaris kamar dagang Jepang.

Beliau berdua dituduh bersekongkol dengan agen Jepang. Lima hari kemudia MH Thamrin sakit keras dan akhirnya meninggal dunia di dalam tahanan. Meskitidak ada bukti pihak belanda melakukan penyiksaan, peristiwa tersebut bukan hanya dipahami menyebabkan hilangnya seorang pemimpin nasional, akan tetapi juga menyebabkan kecurigaan yang semakin mendalam terhadap perlakuan keji Belanda dikalangan Bangsa Indonesia.

Jepang berusaha merongrong kekuasaan Belanda di Indonesia. Hubungan Amerika Serikat dan Jepang semakin memanas. Amerika Serikat lalu disusul Inggris dan Hindia Belanda melakukan embargo mutlak pengiriman minyak ke Jepang. Iniah pukulan telak terhadap Jepang yang miskin minyak. Sebagai syarat pencabutan embargo, negara-negara barat menuntut agar Jepang menarik diri dari Cina dan Indocina. Dihadapan pilihan sulit antara menyerah kepada persyaratan negara – negara Barat atau berperang, Jepang memilih cara kedua yaitu berperang. Dibawah kepemimpinan langsung Perdana Menteri Jenderal Toko Hideki, Jepang selanjutnya memutuskan menyerang Pearl Harbour, Filipina, Hindia Belanda dan berbagai jajahan Barat lainnya di Asia Pasifik.

Dengan tidak adanya dukungan dari rakyat Indonesia pada umumnya dan Nahdlatul Ulama pada khususnya mengakibatkan Belanda harus hengkang dari bumi pertiwi Indonesia pada tanggal 7 maret 1942 dengan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Akhirnya bangsa Indonesia memasuki kehidupan baru dengan kedatangan bangsa Jepang.

F. Masa Penjajahan Jepang

Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, dimulai dengan beberapa kali propaganda. Jauh sebelum pecah perang Asia Timur Raya, sejak pertengahan 1930-an Jepang telah berusaha menarik minat kaum muslim. Pada hari – hari menjelang pendaratan Jepang ke Indonesia radio – radio di Tokyo menyiarkan bahwa mereka akan datang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu mereka akan menghormati serta menjunjung tinggi agama Islam. Pesawat – pesawat udara Jepang melakukan penyebaran pamflet – pamflet yang berbunyi sama dan juga melakukan pengibaran bendera Merah putih dan bendera Jepang sejajar. Oleh karena itulah sejak sekitar tahun 1937 hampir seluruh umat muslim telah memperlihatkan sikap pro-Jepang. Salah satu wujud simpati dari beberapa umat muslim diperlihatkan di Aceh, ketika itu Jepang dijemput oleh para kaum muslim yang tergabung di dalam PUSA (persatuan ulama seluruh Aceh). Sebelum adanya perang Pasifik mereka melakukan sabotase dan membunuh tentara Belanda dengan melakukan bekerjasama dengan Jepang. Ketika meletusnya perang Pasifik antara Jepang melawan Sekutu, secara langsung juga melibatkan Hindia Belanda dan juga secara tidak langsung juga melibatkan bangsa Indonesia karena sedang dalam penjajahan Belanda. Pada satu sisi negara Jepang ingin membangun suatu imperium di Asia. Maka pada tanggal 8 Desember 1941 secara tiba – tiba Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan mengebom Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di lautan Pasifik. Akibat dari penyerangan tersebut lima jam

kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh menyerah kepada Jepang.

Cepatnya serangan Jepang dalam menguasai Hindia Belanda bukan tanpa perlawanan, pihak Sekutu segera membentuk suatu komando gabungan yaitu ABDACOM (American British Dutch Australian Command) yang bermarkas di lembang, Bandung Jawa Barat. Sebagai panglimanya Jenderal Sir Archibald Wavell. Sedangkan panglima dari pihak Hindia Belanda adalah Letnan Jenderal H.Ter Poorten. Pihak Sekutu pada waktu itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda, khususnya di daerah pulau Jawa. Kekuatan itu terdiri dari tiga resimen infanteri Belanda, tiga bataliyon Australia dengan dukungan dua kompi pasukan berlapis baja, satu kompi taruna Akademi Militer Kerajaan (KMA) dan korp Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Adapun di Jawa Tengah pasukan Sekutu terdiri dari empat bataliyon Infanteri, sedangkan di daerah Jawa Timur terdiri dari tiga bataliyon pasukan bantuan Indonesia dan satu bataliyon Marinir yang semuanya dibantu oleh satuan – satuan Artileri, diantaranya terdapat satuan satuan dari Inggris dan Amerika Serikat.

Di lain pihak Jepang, telah menempatkan dan mendaratkan pasukan Divisi ke-II di Jawa Barat, dan Devisi ke-48 di Jawa Tengah berdekatan dengan Jawa Timur. Penyerangan Jepang yang di khususkan ke pulau Jawa ini di bawah komando Tentara ke-16 dan dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Kekuatan pasukan tempur Jepang di Jawa memang lebih besar dibandingkan dengan jumlah tentara Sekutu. Di Jawa Barat Jepang telah

menempatkan tiga resimen Invanteri dan satu Resimen Kaveleri, Zeni dan angkutan. Kekuatannya bertambah dengan adanya satu detasemen dari Divisi ke-38 yang terdiri dari dua bataliyon invanteri yang dipimpin Kolonel Shoji. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasukan – pasukannya terdiri dari tiga resimen invanteri beserta satu brigade invanteridengan bantuan satu bataliyon pasukan perintis dan beberapa satuan arteleri dan Zeni. Selain itu juga terdapat pula brigade Sakaguchi yang sebelum mendarat di Jawa, pasukan yang dipimpinnya telah merebut Tarakan, Balikpapan, Banjarmasin di Kalimantan. Pada sisi yang lain Jepang juga memiliki bantuan udara taktis, sebaliknya Belanda sudah tidak memilikinya di karenakan kekuatan udaranya sudah dihancurkan pada pertempuran sebelumnya di bagian-bagian lain Indonesia dan Malaya.

Saat itu juga, bersamaan dengan Pemerintah Kolonial Belanda memaklumatkan perang terhadap Jepang sehingga Belanda terlibat dalam Perang Pasifik. Bangsa Indonesia yang berada dalam kolonial/jajahan Belanda, tentu saja berada dalam suasana tertekan karena aturan kolonial Belanda yang ingin membawa bangsa Indonesia membantu pihak Belanda dalam perang Pasifik. Pemuda-pemuda Indonesia dipaksa agar menjadi suka-relawan membantu Belanda untuk menghadapi Jepang.

Melihat keadaan yang mengkuatirkan ini, para pejuang dan Ulama sepakat mengadakan pertemuan yang dikemas dalam Kongres Rakyat Indonesia. Nahdlatul Ulama dalam Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh MIAI dan GAPI di Yogjakarta, Kiai Mahfud selaku Presiden Tanfidziah HBNO mengutus KH. Muhammad Ilyas dan

Kiai Muhammad Dahlan dari HBNO untuk menghadirinya dan menyampaikan 2 hal yang substansial terkait kewajiban perang tersebut. Kyai Ilyas yang ditugasi menjelaskan hukum Islam tentang ikut sertanya bangsa Indonesia dalam perang Pasifik dan KH. Muhammad Dahlan menjelaskan Hukum Islam mengenai transfusi darah guna keperluan Perang Pasifik. Pada forum kongres tsb, NU memutuskan, bahwa:

1. Yang berperang melawan Jepang adalah Pemerintah Belanda, bukan rakyat Indonesia.
2. Sehingga rakyat Indonesia tidak terikat oleh kewajiban perang tersebut.
3. Dan bila rakyat Indonesia nantinya mati dalam peperangan untuk kepentingan penjajah Belanda tsb maka hukumnya adalah mati sia-sia.

Sikap politik NU tersebut adalah implementasi dari dalil-dalil fiqih (hukum islam) yang menjadi pedoman bagi para kyai dalam kehidupan sehari-harinya dan yang diajarkan kepada para santrinya. Rujukan fiqih tsb selalu dijadikan dalil pada setiap bahsul masail diniah yaitu membahas setiap masalah kemasyarakatan dari tinjauan agama.

Dengan tidak adanya dukungan dari rakyat Indonesia pada umumnya dan Nahdlatul Ulama pada khususnya mengakibatkan Belanda harus hengkang dari bumi pertiwi Indonesia pada tanggal 7 maret 1942 dengan menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

G. Masa Pemerintahan Jepang

Dengan menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang maka terjadi peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang. Pada awal kedatangan Jepang menimbulkan simpati

dan harapan baru di saentero bangsa Indonesia. Dengan siaran radio Tokyo diumumkan bahwa tujuan perang pasifik adalah mengusir orang – orang kulit putih di bumi Asia. Sebelumnya Jepang banyak melakukan aktifitas Internasional untuk menarik simpati bangsa – bangsa yang beragama Islam dan meneguhkan slogan anti Barat.

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda "Jepang Pemimpin Asia, Jepang Saudara Tua Indonesia". Akan tetapi, dalam peperangan melawan sekutu Barat (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dan Negara sekutu lainnya), nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dari bangsa Indonesia, maka Jepang bermurah hati kepada Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kelak kemudian hari.

Pendudukan Jepang di Indonesia dengan berlang-sungnya perang Dunia kedua di kawasan Asia Pasifik, (1941-1945). Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperalis barat. Tentara jepang berhasil memenangkan pertempuran di Pasifik melawan tentara sekutu. Kemudian, mereka terus bergerak ke selatan memasuki wilayah Asia Tenggara, tidak terkekecuali Indonesia.

Jepang menduduki Tarakan pada 11 Januari 1942; Palembang pada 14 Januari; Manado pada 17 Januari; Balikpapan pada 22 Januari; Pontianak pada 22 Februari; dan Bali pada 26 Februari 1942. Operasi Gurita dibentuk oleh Jepang dalam upaya merebut pulau Jawa. Operasi Gurita Barat dimulai dari Indo-Cina melalui Kalimantan Utara dengan sasaran Pulau Jawa, sedangkan Operasi Gurita Timur dimulai dari Filipina melalui selat Makasar menuju

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Operasi Gurita Barat tidak mengalami kesulitan mendarat di Eretan (Indramayu) dan Banten. Selain itu, Pertempuran Laut Jawa (Pertempuran Laut Jawa) berlangsung selama 7 jam pada tanggal 27 Februari 1942 di perairan antara Bawean, Tuban, dan Laut Rembang.

Untuk mencegah korban lebih lanjut, Belanda terpaksa menyerah kalah terhadap Jepang pada 8 Maret 1942 dan menandatangani perjanjian Kalijati. Di lapangan terbang Kalijati di Jawa Barat, Tjarda van Starkenborgh Starchouwer (Gubernur Jendral Hindia-Belanda) dan Jendral Hitoshi Imamura (Koman Gurita Barat) dari Jepang, bersama dengan Letnan Jendral Heindrik Ter Poorten (Panglima Tentara Belanda), menandatangani perjanjian itu. Jepang menaklukkan Hindia Belanda. Belanda kehilangan wilayah jajahan yang telah dikuasainya selama bertahun-tahun atau beberapa abad. Perjalanan sejarah Indonesia juga memasuki fase baru.

Dalam rangka menancapkan kekuasaannya di Indonesia, Jepang membuat kebijakan politik pada Awal Pedudukan, yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi untuk kepentingan Militer Jepang, sebagai berikut :

1. Gerakan Tiga A

   Semboyan awal dari Gerakan Tiga A adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Semboyan ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai Cahaya (penerang), Pemimpin, dan Pelindung bagi negara-negara Asia lainnya. Ternyata, Gerakan Three

A tidak bertahan lama karena kurangnya dukungan publik.

2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

   Pemerintah militer Jepang menawarkan kerja sama dengan para pemimpin Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Tokoh-tokoh Nasionalisme seperti Ir. Soekarno, Dr. Moh Hatta, dan Sultan Syahir dibebaskan karenanya. Para pemimpin negara Indonesia telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Dibentuklah organisasi baru bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan kesepakatan kerja sama. Empat orang: Ir. Soekarno, Dr. Moh Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara bertanggung jawab atas organisasi ini.

3. Jawa Hokokai

   Pemerintah militer Jepang mendirikan organisasi baru yang disebut Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) karena Potera menguntungkan Indonesia. Pembentukan Jawa Hokokai dilakukan untuk memungkinkan Indonesia untuk mengumpulkan kekuatan fisik dan mental untuk mengamalkan kebaktiannya sesuai dengan semangat hokoseisyen. Ada tiga dasar utama dalam tradisi Jepang: rela mengorbankan diri, memperkuat persahabatan, dan melakukan sesuatu yang harus menghasilkan bukti. Gunseikan, yang berfungsi sebagai kepala pemerintah militer, bertanggung jawab atas organisasi ini, dan Syucokan, yang berfungsi sebagai gubernur atau residen, bertanggung jawab atas tiap derah.

Dalam Jawa Hokokai, ada banyak hokokai profesi, seperti Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), dan Keimin Bunko Syidosyo (Pusat Budaya).

Setelah Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang ada perbedaan sistem pemerintahan militernya dimana perbedaan dengan zaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu:

1. Pemerintahan militer angkatan darat (Tentara ke-25) untuk daerah pulau Sumatera yang berpusat di Bukittinggi.
2. Pemerintahan militer angkatan darat (Tentara ke-16) untuk daerah pulau Jawa – Madura yang berpusat di Jakarta.
3. Pemerintahan militer angkatan darat (Armada Selatan) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku yang berpusat di Makasar.

Untuk menjalankan kegiatan kenegaraan atau Pemerintahan dikeluarkanlah Undang – Undang. Dari Undang – Undang inilah dapat diketahui bahwa Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan untuk segala kekuasaan yang dahulu di tangan Gubernur Jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Dengan Undang – Undang ini juga pemerintah militer Jepang ingin terus menggunakan aparat pemerintahan sipil yang lama beserta para pegawainya, agar roda pemerintahan

dapat berkelanjutan dengan aman. Bedanya hanya dipegang oleh tentara Jepang, baik dipusat maupun di daerah.

Selain itu juga ada data dari sisi lain Rikclefs mengatakan bahwa bangsa Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah oleh pemerintahan militer Jepang yaitu:

1. Sumatera ditempatkan dibawah angkatan darat ke-25
2. Jawa dan Madura berada dibawah angkatan darat ke-16, Kedua wilayah ini (Sumatera, Jawa dan Madura) berada dibawah angkatan darat wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura.
3. Kalimantan dan wilayah Indonesia timur dibawah langsung oleh angkatan laut Jepang.

Pada umumnya pulau Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting di karenakan Sumber daya Alamnya kalah besar dengan daerah lain. Sedangkan di Jawa sumber daya yang utama adalah manusianya.

H. Penangkapan para Kiai – Kiai Nahdlatul Ulama

Pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim.

Pada saat itu, para penguasa Jepang lebih suka bekerja sama dengan orang-orang Islam daripada orang-orang nasionalis atau pemimpin konvensional. Kecondongan ini terjadi karena Jepang percaya bahwa para kyai yang memimpin pesantren adalah pendidikan masyarakat pedesaan yang dapat digunakan untuk propaganda. Dalam

bentuk kompensasi, para pemimpin Islam diberi kemudahan dalam hal urusan keagamaan. NU tidak mengabaikan kecenderungan Jepang ini.

Ini dilakukan bukan karena ingin dianggap sebagai propagandis, tetapi karena memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan hasrat untuk merdeka. Ketika Jepang membentuk kantor urusan agama (shumubu) untuk berhubungan langsung dengan para kyai di daerah pedesaan, mereka juga dilatih dan diajarkan sejarah, kewarganegaraan, senam, dan bahasa Jepang. Namun, ini tidak membuat kyai tunduk pada Jepang tetapi sebaliknya memicu politisasi di kalangan mereka.

I. Penahanan KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq oleh Jepang

Politisasi di kalangan kiai untuk menyusun kekuatan melawan penjajah Jepang terus dilakukan. Melalui kegiatan Lailatul Ijtima dengan mengadakan tahlil dan istighosah para kiai menyusun strategi perangnya. Diluar rumah para hadirin mengadakan kegiatan tahlil dan istighosah akan tetapi para kiai didalam rumah menyusun strategi perang.

Siasat yang dibuat Nahdlatul Ulama tersebut tercium oleh Jepang. K.H. Hasyim Asyari (Rais Akbar) ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Terjadi kegoncangan di tubuh organisasi NU. Kegoncangan bertambah hebat ketika Banyak ulama pesantren menjadi sasaran tuduhan gerakan anti Nippon. Selain KH Hasyim Asyari ada juga K.H. Mahfoedz Shiddiq (Presiden HBNO/Ketua PBNU), beserta beberapa ulama lain, ditangkap dan dipenjara. Hadratus Syaikh, bersama dengan beberapa putera dan

kerabatnya, ditahan sebagai bagian dari tindakan represif yang dilakukan oleh Jepang.

Kyai Hasyim menolak seikerei, jadi ini dilakukan. Itu berarti bahwa Anda harus berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 07.00 pagi sebagai cara untuk menghormati Kaisar Hirohito dan tunduk pada Dewa Matahari (Amaterasu Omikami). Setiap orang di wilayah pendudukan Jepang yang melintasi atau berpapasan di depan tentara Jepang harus melakukan aktivitas ini. Aturan tersebut ditolak oleh Kyai Hasyim. Karena hanya Allah yang harus disembah, bukan manusia. Selain itu, tokoh penting dari organisasi Muslim NU ini didakwa mendalangi perusakan pabrik gula cukir yang terletak di dekat pesantren Tebuireng. Itu benar-benar tuduhan yang dibuat-buat.

Pimpinan puncak NU KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq ditangkap tentara Jepang lalu dipenjarakan di Jombang, kemudian dipindah ke Mojokerto dan terakhir dicampur dengan tawanan Belanda di penjara koblen bubutan, Surabaya. Peristiwa ini sangat menggemparkan dunia pesantren karena KH Hasyim Asyari selain dikenal sebagai pimpinan tertinggi NU, Beliau juga merupakan bapak umat Islam.

Atau sangat mungkin NU sebagai korban dari orang-orang yang tidak suka akan keberadaan tokoh Nahdlatul Ulama. Sebetulnya Intelijen Jepang *(F-Kikan)*, sudah mengantongi nama KH Mahfudz Shiddiq sejak diundang ketiga ada acara peresmian masjid Kobe di Jepang sejak tahun 1939 beliau bersama tokoh muslim Indonesia lainnya yaitu: Mr. R. Kasmat dari PII/Persatuan Islam Indonesia, KH. Abdul Kahar Muzaqqir dan KH. Farid Ma'ruf dari

Muhammadiyah (Tokoh MIAI). Selain itu pula ada rapat tertutup yang dipimpin KH Mahfudz Shiddiq yang dihadiri 11 tokoh pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama pada Muktamar NU ke-XV yang berlangsung di kawasan Praban, Surabaya pada tanggal 10 Dzul Hijjah 1359 H/9 Februari 1940 M. kepada semua yang hadir pada waktu itu untuk tidak menceritakan kepada siapapun hasil rapat tertutup tersebut. Pada saat itu KH Mahfudz Shiddiq mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tinggal sesaat lagi dengan kata lain tinggal menunggu waktu saja. Karena itulah, siapa yang akan memimpin bangsa ini periode pertama sangat diperlukan sudah segera dipikirkan di lingkungan para Nahdliyin ini. Setelah melalui pemikiran dan berbagai pertimbangan yang ada disaat itulah seluruh peserta rapat tertutup sepakat untuk menentukan Ir Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama. Inilah salah satu bukti pengabdian NU untuk bangsa ini.[1]

Kemungkinan lain yang terjadi adalah rapat tertutup yang dilakukan disaat Muktamar XV di Surabaya tersebut sudah tercium oleh orang yang tidak menyukai Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian dilaporkan kepada pihak Intelijen Jepang dengan berbagai macam versi yang menfitnah. Dengan kata lain Nahdlatul Ulama pada saat itu menjadi korban orang-orang yang munafik.

Tak hanya pemimpin tertinggi yang ditahan, ratusan kiai pengurus NU tingkat cabang pun ditangkapi dan

[1] Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, PT Duta Aksara Mulia,Surabaya,1999. Halaman 28-30

dipenjara. Sebagian bahkan langsung dihukum mati tanpa proses pengadilan.

Dalam upaya pembebasan para Kiai NU, Kiai Wahab Hasbullah didampingi oleh Kiai muda yang cerdas dan pemberani yaitu KH Wahid Hasyim yang tidak kenal lelah untuk membebaskan kedua tokoh tersebut. Beliau berdua juga didampingi para *Pokrol* (pengacara) diantaranya KH Muhammad bin Hasyim (Ulama Jember) dalam upaya membebaskan para Kiai tersebut. Para Kiai ini harus bolak-balik menemui Gubernur militer Jepang bernama *Gunseikan*. Dan juga sering kali menemui *Gunsereikan* atau *Saiko Sikikan* pucuk pimpinan pemerintahan militer Jepang. Upaya ini tidak lain adalah meminta KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq untuk dibebaskan karena tuduhan Jepang sangat tidak terbukti.

Penangkapan itu terus terjadi pada ulama-ulama lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan tuduhan yang sama yakni gerakan anti Jepang. Selama keduanya ditahan, kendali NU dipegang oleh KH. A.Wahab Hasbullah dengan menamakan dirinya Ketua Akbar Nahdalatul Ulama

Kiai Wahab pada saat itu mengumpulkan seluruh konsul NU di Jakarta. Beliau melakukan konsolidasi di tubuh NU dan memompa semangat juang para *Nahdliyin* bahwa dalam waktu dekat Kiai Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq akan dibebaskan, oleh karena itulah NU diperlukan untuk mengadakan perubahan pengurus agar kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab. Sehingga disepakatilah pada waktu itu perubahan kepemimpinan sebagai berikut:

Ketua Besar : KH A Wahab Chasbullah

: KH Mahfudz Shiddiq
Rais Akbar : KH Hasyim Asyari
Ketua Tanfidziyah : KH Muhammad Noer
Sekretaris : KH Wahib Wahab

Setelah melakukan berbagai ikhtiar dan lobi panjang disertai jalan liku dan penuh resiko, dengan semangat tidak kenal lelah serta pantang menyerah, akhirnya KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Shiddiq dapat dibebaskan dari penjara Dai Nippon pada hari selasa 6 Sya'ban 1361H/18 Agustus 1942.

Setelah KH Hasyim Asyari dibebaskan langsung dibawa ke Markas Besar Oelama (MBO) di daerah Waru Sidoarjo. Di Markas Besar Oelama (MBO) inilah sementara waktu KH Hasyim Asyari tinggal ada kekuatiran dari para santri apabila dibawa ke Pesantren Tebuireng Jombang akan ditangkap lagi oleh tentara Jepang. (wawancara dengan Gus Sholahuddin 13 Desember 2022).

J. Penangkapan KH Mahfudz Shiddiq di Jember Jawa Timur

Ada yang menarik ditemukan oleh penulis terkait penangkapan KH Mahfudz Siddiq. Melalui wawancara dengan putera beliau yaitu KH Syaiful Bari bahwa sang ayah Kiai Mahfudz Shiddiq ditangkap oleh tentara Jepang bersama KH Muhdori dan KH Ismail, keduanya berasal dari Gebang Jember. Awal mulanya Kiai Syaiful kecil sedang melihat acara yang diadakan tentara militer Jepang di Alun-Alun Jember. Sepulang dari acara tersebut, sampai dirumah melihat sang Ibunda, Nyai Siti Saroh menangis sedih. Kemudiah Kiai Syaiful bertanya sebab sedihnya sang

Ibunda. Nyai Siti Saroh kemudian menceritakan kejadian ayahnya yang ditangkap oleh tentara Jepang bersama dengan Kiai Muhdori dan Kiai Ismail.

Nyai Siti Saroh juga menjelaskan bahwa penangkapan KH Mahfudz Shiddiq karena beliau dianggap sangat dekat dengan salah satu mantan Gubernur Belanda yaitu Charles Olke van der Plas. Charles Olke van der Plas merupakan Gubernur Jawa Timur sampai saat Jepang mengalahkan Belanda tahun 1942. Van Der Plas pada saat itu diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur karena pernah menjadi perwakilan Belanda di Arab Saudi sehingga ditempatkan di Jawa Timur karena beliau bisa berbahasa Arab dan mengerti kultur agama Islam.

KH Mahfudz Shiddiq di penjara di Jember selama kurang lebih empat minggu. Kemudian dibebaskan dikarenakan Salah tangkap sebab ada laporan dari mantri polisi bernama sutopo bahwa beliau tidak bersalah terkait kedekatannya dengan Van Der Plas. Setelah bebas dari semua tuduhan tersebut, KH Mahfudz Shiddiq kembali beraktivitas sebagai Presiden HBNO di kantor HBNO Surabaya.

Kiai Syaiful menyangkal apabila KH Mahfudz Shiddiq pernah di penjara di koblen bubutan Surabaya, karena pada waktu itu beliau masih sekolah di Madrasah NU Tembok Dukuh sebelah barat penjara koblen. Kiai Syaiful setiap hari dibimbing oleh ayahnya ketika masih sekolah. Dan tidak pernah melihat ayah ditangkap ataupun di masukkan di penjara Koblen Bubutan Surabaya karena sekolahnya sangat dekat dengan penjara tersebut. Apabila benar ayahnya di

penjara di Koblen maka beliau pasti tahu keadaannya ayah waktu itu. (Syaiful Bari, 2023).

Dari hasil wawancara dengan Kiai Syaiful yang didapat, penulis mencoba mengambil benang merah yaitu ketika KH Hasyim Asyari dibebaskan dari masa tahanan di penjara Koblen Bubutan Surabaya, KH Mahfudz Shiddiq ikut menjemput KH Hasyim Asyari selaku Rois Akbar Nahdlatul Ulama sedangkan KH Mahfudz Shiddiq sebagai Presiden HBNO masa itu. Kemungkinan para kai dan hadirin yang ikut menjemput mengira jika KH Mahfudz Shiddiq juga ikut dipenjara bersama KH Hasyim Asyari di penjara Koblen tersebut.

K. Penjara Koblen Bubutan Surabaya

Penjara ini merupakan saksi sejarah bagi kaum Nahdliyin. Karena ditempat inilah sang Rois Akbar Kiai Hasyim Asyari pernah ditahan semasa penjajahan Jepang. Penulis pernah beberapa kali melakukan observasi di penjara ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat terkait penjara militer di zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Belanda membangun markas dan asrama militer ini pada tahun 1930. Selama Perang Dingin, tentara Jepang dan Indonesia juga menginap di tempat ini. Sampai saat ini, tembok batu setinggi tiga meter di sekeliling kompleks masih terlihat utuh. Parit melingkari tembok. Di setiap sudutnya terdapat menara pengawas yang cukup tersisa.

Penjara Koblen dikelilingi oleh benteng yang tampaknya sangat kokoh. Ada beberapa menara yang masih utuh, tetapi sebagian besar telah mengalami kerusakan yang

cukup parah. Terdapat Taman Kanak-Kanak di bagian dalam, dan ada juga tempat untuk menyimpan bus lama dan truk-truk yang terlihat parkir di sana. Kondisi lapangan bola yang sudah rusak menambah "kekurangharmonisan" lingkungan di lokasi tahanan Jepang sebelumnya.

RTM Koblen atau biasa disebut penjara Koblen, menurut Pak Suyitno, merupakan tempat tahanan orang-orang yang terlibat urusan politik dizaman orde lama serta menjelang pergantian rezim menuju orde baru. Juga digunakan sebagai penjara transit bagi mereka yang akan 'dibuang' ke Nusakambangan atau Pulau Buru. Bagian tembok bekas Rumah Tahanan Militer (RTM) Koblen disisi jalan Pirngadi, persis berhadapan dengan deretan pedagang buah dan jasa cuci motor, terlihat berlubang. Sisa bongkaran bangunan tembok itu persis dibawahnya. Bagian yang berlubang ditutupi dengan gedhek. (wawancara dengan Pak Suyitno penjaga Penjara Koblen, 22 Desember 2021)

Rumah Tahanan Militer (RTM) Koblen demikian biasanya di sebut, dulunya adalah sebuah tangsi belanda. Tangsi yang di bangun sekitar tahun 1930 ini dengan dinding batu 3 meter dan ada menara pengawas di setiap sudut serta diposisi tengah antara 2 manara yang di pojokan. Dibagian dalamnya ada dinding dalam dan ada menara pengawas yang jumlah 2 (sekarang tersisa 1), pada tahun 1946-1949 sebagai tahanan militer pasukan Jepang dan dan pejuang kita. Pada masa orde baru dipakai sebagai tahanan Politik, banyak orang yang dituduh terlipat komunis dan makar di tahan di penjara koblen.

Gambar 6. 6 Gerbang masuk Penjara Koblen Bubutan Surabaya

Gambar 6.6 merupakan gerbang masuk satu-satunya yang ada di penjara ini. Gerbang penjara yang tersisa ini begitu kokoh.

Gambar 6. 7 Pos Penjaga Penjara Koblen Bubutan Surabaya

Gambar 6.8 merupakan salah satu Pos Penjaga yang ada ada di penjara ini. Penjara koblen mempunyai 6 Pos penjaga.

Gambar 6. 8 Rumah dinas Kepala Penjara Koblen

Gambar 6.8 merupakan rumah dinas yang diperuntukkan kepada kepala penjara. Rumah ini satu-satunya bangunan yang tersisa selain pos penjaga di koblen,

Gambar 6. 9 Gambar Pagar Penjara Koblen

Gambar 6.9 merupakan gambar pagar yang mengelilingi penjara koblen dengan ketinggian kurang lebih 6 meter dengan parit yang mengelilinginya.

L. Kondisi Setelah Penangkapan Para Kiai

Potensi besar yang dimiliki oleh oleh organisasi-organisasi Islam terutama Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, tampaknya mulai diperhitungkan oleh pemerintah Dai Nippon. Hal itu bukan hanya didasarkan pada kenyataan bahwa kaum Islam merupakan mayoritas dari penduduk bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena mereka juga kaum yang anti bangsa barat, sehingga bisa digunakan untuk alat kepentingan

Jepang. Selanjutnya untuk menarik simpati tokoh umat Islam dibentuklah Shumubu (Kantor urusan Agama) di bawah pimpinan kolonel Horie Choso.

Kolonel Horie ingin menunjukkan bahwa pemerintahan militer Jepang sangat peduli dan memperhatikan umat Islam dengan mengupayakan agar sejumlah 32 Ulama diterima oleh *Genseikan*. Maka pada tanggal 7 Desember 1942 terjadilah pertemuan di Istana Gambir. Diantara 32 Ulama tersebut banyak Kiai NU yang diundang diantaranya KH Hasyim Asyari, KH Wahab Chasbullah dan KH Mahfudz Shiddiq. Dalam pertemuan itu Mayor Jenderal Okazaki meminta maaf pada umat islam dan mengemukakan antara lain "Bala tentara Jepang hendak menyelidiki agama islam lebih mendalam lagi dan alan mengindahkan adat dan Ajaran Agama Islam, supaya bangsa Nipon dan bangsa Indonesia bersatu mencari kemenangan dalam peperangan ini".

Selanjutnya Kolonel Horie juga mengupayakan mengembangkan pengaruh Jepang dikalangan kaum muslimin dengan mengadakan secara berturut-turut pertemuan dengan para Kiai di beberapa kota Jawa Barat selama bulan Januari 1943. Selain itu pula kolonel Horie juga mendelegasikan kepada bawahannya yang beragama muslim seperti Muhammad Sayido Wakas dan Abdul Muniam Inada untuk mengunjungi masjid-masjid dan memberikan Khotbah Jumat. Namun demikian , kebikan Jepang ini dalam mendekati umat muslim masih banyak terkendala karena para Kiai tidak menyukai kebiasaan orang Jepang yang sering mabuk-mabukan dengan minum *sake* (arak khas Jepang) dan kebiasaan memakai cawat di depan umum

karena bertentangan baik dengan ajaran islam maupun adat bangsa Indonesia.

Kiai Hasyim Asyari kemudian diangkat sebagai kepala Shumubu, atau kepala jawatan agama, oleh pemerintah Dai Nippon sebagai kompensasi atas penangkapan sewenang-wenang itu. Kiai Hasjim terpaksa menerima jabatan tersebut untuk melindungi NU dan para nahdliyyin dari kebengisan bala tentara Dai Nippon serta fitnah anti Nippon. Namun, karena usia dan kondisi kesehatannya, Mbah Hasjim memberikan tanggung jawabnya kepada putranya, K.H. Abdul Wahid Hasyim. "Menerima jabatan itu lebih kecil madharatnya bagi warga nahdliyyin daripada menolaknya," kata Kiai Wahid.

Sementara MIAI pada tanggal 22 Nopember 1943 diakui oleh pemerintah Dai Nippon dengan nama baru, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi, yang kelak menjadi partai politik), dengan K.H. Hasyim Asyari tetap sebagai ketua. Akan tetapi karena Kiai Hasyim Asyari ingin tetap tinggal di pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur maka yang menjadi ketua organisasi tersebut KH Abdul Wahid Hasyim.

Masyumi dipercaya untuk mengorganisasikan pelatihan terhadap guru-guru agama desa yang sebelumnya ditunjuk oleh para petinggi Jepang dari *Shumumbu.* Selanjutnya pada tahun 1944, para pemimpin Masyumi ditunjuk untuk menempati jabatan penting di *Shumumbu* yang merupakan pemerintahan yang ada di militer Jepang. Pada tahun itu juga K.H. Wahid Hasyim berhasil melobi Jepang untuk memberikan pelatihan militer khusus kepada para santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan

pertahanan rakyat tersendiri yakni Hizbullah dan Sabillilah. Sejak saat itu ormas Islam memiliki pasukan tersendiri. Selanjutnya pesantren-pesantren menjadi pusat markas pelatihan Hizbullah dengan para santri menjadi prajuritnya dan putra-putra Kiai sebagai komandannya.

Kaum nasionalis yang netral agama menguasai tentara nasional (Peta) yang dibentuk Jepang. Masuknya banyak orang Indonesia ke Peta lebih karena untuk mengetahui seluk-beluk kemiliteran dan menginginkan mendapat peranan politik yang lebih besar di masa yang akan datang, bukan karena semata ingin membantu Jepang. Perjuangan melawan Jepang akhirnya melalui strategi militer dan mempunyai pasukan yang tangguh baik mental maupun spiritual yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Tidak terasa sudah jutaan tetesan air mata dan darah dari para pejuang yang mati sahid demi menegakkan Izzul Islam wal Muslimin dan Kemerdekaan yang diidamkan sejak lama oleh bangsa Indonesia. (Anam; 2015)

M.Masa Kemerdekaan

Menjelang masa kemerdekaan pembicaraan mengenai calon pemimpin pertama Indonesia itu dilakukan pada saat Indonesia belum bisa memastikan kapan akan merdeka. NU melakukan pembicaraan dini mengenai pemimpin bangsa Indonesia dikarenakan NU menganggap pemimpin itu sangat penting. Islam mengatakan bahwa pemimpin yang buruk masih lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali.

Pada tanggal 29 April 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk dengan 62 anggota dan dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan persiapan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nama K.H. Wahid Hasyim juga terdaftar sebagai anggota badan tersebut. BPUPKI tidak hanya menyusun Undang-Undang Dasar (UUD), tetapi juga membahas bentuk negara. Di BPUPKI ada perbedaan pendapat tentang bentuk negara Indonesia. Sebagian orang ingin negara itu menjadi negara Islam, sedangkan yang lain ingin negara itu menjadi kesatuan nasional yang memisahkan agama dan negara. Soekarno membangun dasar negara Indonesia di BPUPKI.

Sebagian orang Islam ingin membangun Negara Islam untuk memungkinkan syariat Islam diterapkan secara penuh. Soekarno menyatakan bahwa ada dua opsi untuk bentuk negara Indonesia: persatuan staat-agama tetapi tanpa demokrasi; atau demokrasi tetapi staat terpisah dari agama.

Soekarno lebih cenderung memilih opsi yang kedua. Menurutnya, dengan memisahkan agama dari negara, negara demokrasi tidak mengabaikan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama dapat dimasukkan ke dalam hukum dengan tujuan mengontrol parlemen, sehingga undang-undang yang dibuat oleh parlemen sesuai dengan Islam. Pemikiran Soekarno ini substansialistik, ingin ajaran Islam dilaksanakan, tetapi tidak setuju dengan formalisasinya.

Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyarankan agar negara Indonesia didasarkan pada Pancasila, yaitu lima dasar: 1) kebangsaan; 2)

internasionalisme, perikemanusiaan; 3) permusyawaratan, perwakilan, mufakat; 4) kesejahteraan; 5) ketuhanan.

Polarisasi di BPUPKI masih ada. diskusi sengit tentang sila Ketuhanan yang Maha Esa dan tanggung jawab untuk menerapkan syariat agama Islam bagi pemeluknya yang diajukan dalam Piagam Jakarta. Kelompok nasionalis-sekuler-kristen menentang keras tujuh kata terakhir. Debat ini berakhir ketika para pemimpin nasionalis-muslim seperti Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Bagus Hadikusumo bertemu dengan Hatta sebelum sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 setuju untuk mencabut tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta yang menjadi perdebatan dengan kelompok nasionalis-sekuler-kristen.

Piagam Jakarta dibuat oleh tim sembilan orang dari PPKI, termasuk KH. Wahid Hasyim, yang ditugaskan untuk mengembangkan dasar negara. Dalam percakapan akhir Mei 1945 antara Soekarno dan KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur (NU), dan Kahar Muzakir (PII), sikap ketiga pemimpin nasionalis-muslim muncul.

N. Markas Besar Oelama (MBO)

Markas Besar Oelama (MBO) pada gambar 6.10 yang terletak di jalan Brigjen Katamso gang Satria no 181, Kedungrejo kecamatan Waru Sidoarjo ini merupakan saksi bisu berbagai peristiwa perjuangan para Kyai Nahdlatul Ulama. Di Gedung ini Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari berdiam setelah keluar dari tahanan Koblen bubutan Surabaya. Selain itu juga konon para Kyai disaat pertempuran 10 Nopember 1945 menyusun strategi

melawan Sekutu. Hal ini disebabkan kota Surabaya menjadi tempat pertempuran para santri dan pejuang melawan Sekutu. Sehingga kota Surabaya tidak bisa dijadikan markas untuk menyusun strategi perang. Lewat semangat Resolusi Jihad yang di kobarkan langsung oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari, membuat para pejuang *arek - arek Suroboyo* semakin bersemangat untuk memenangkan peperangan di bumi Surabaya melawan tentara NICA.

Di Markas Besar Oelama ini menjadi tempat singgah para Kyai Jawa Timur untuk bermalam dan juga untukmenyusun semua kebutuhan logistik untuk berperang. Atas perintah KH Hasyim Asyari para Kyai dipimpin oleh KH Wahab Hasbulloh dan KH Bisri Syamsuri membuat semua strategi perang dan mengkomando para pejuang untuk berperang dalam pertempuran di Surabaya (Wawancara dengan Gus Sholahuddin tanggal 13 Desember 2022).

Gambar 6. 10 Markas Besar Oelama (MBO)

O. Refleksi Perkembangan NU Semasa Kemerdekaan

Semasa kemedekaan, organisasi NU ini berkembang selain dari banyaknya anggota, tetapi juga mampu mendirikan beberapa madrasah dan menambah jumlah pesantren dengan tumbuhnya para kiai dan santrinya.

Selain itu, NU juga berkembang di bidang ekonomi. Pada tahun 1929, mereka mendirikan ekonomi kerakyatan dengan koperasi Muslim, seperti Nahdlatut Tujjar. Kemudian, dibentuk koperasi yang lebih besar dan luas dengan nama Syirkah Mu'awanah, yang berkembang pesat hingga menjadi perdagangan internasional. Selain itu, NU juga aktif dalam media cetak. Sebelum Perang Dunia II pada 1 September 1939, mereka mencetak beberapa majalah, termasuk Berita Nahdlatoel Oelama, Surabaya.

P. Masa Orde Lama

Pertumbuhan NU di masa orde lama sangatlah semakin menjanjikan. Dengan kekuatan anggota yang semakin banyak dan didukung dengan kekuatan Pesantren yang semakin solid menyebabkan NU semakin diperhitungkan sebagai organisasi besar di negara ini. Ibarat seorang gadis yg sangat cantik maka banyak golongan yang ingin meminang NU. Jadi, setelah kemerdekaan, peran NU berubah dari berpartisipasi dalam perlawanan menjadi bertanggung jawab atas negara dan pemerintahan.

Sebagian ulama dari Partai Nasional Islam (NU) diangkat menjadi pejabat penting di lembaga legislatif dan eksekutif. K.H. A. Wahid Hasyim dan K.H. Masykur diangkat sebagai Menteri Agama di Kabinet Perlementer. Selama masa Presiden Soekarno, K.H. Muhammad Ilyas, K.H. Wahib Wahab, dan K.H. Saifuddin Zuhri semuanya menjabat sebagai Menteri Agama, sedangkan K.H. Muhammad Dahlan adalah Menteri Agama terakhir dari Partai Nasional Indonesia hingga awal Orde Baru.

Gambar 6. 21 Bung Karno menghadiri Muktamar NU ke 23 di Solo tahun 1962

Ulama NU berhasil memperoleh posisi penting dalam pemerintahan karena mereka merupakan salah satu dari tiga partai besar, bersama dengan PNI dan PKI. Selain itu, pemimpin mereka, yang biasanya didominasi oleh kelompok ulama, memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atau menunjukkan loyalitas yang kuat kepada Soekarno sebagai penentu kebijakan pemerintah saat itu.

Ulama NU cenderung berkolaborasi dengan pemerintah selama masa kekuasaan Soekarno, setelah Dekrit Presiden (1959-1965). Sudut pandang seperti ini dapat dipahami karena ulama adalah kelompok elit keagamaan yang terlibat dalam berbagai masalah masyarakat Islam. Ulama juga bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat tentang ajaran Islam sehingga mereka dapat menghayati dan mengamalkannya. Para ulama biasanya

membutuhkan perlindungan dari penguasa agar pekerjaan mereka berjalan dengan baik atau agar mereka terhindar dari intimidasi dan gangguan dari orang-orang yang tidak berwenang.

Dengan kata lain, ulama tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik tanpa bekerja sama dengan atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah adalah kelompok elit politik yang memiliki otoritas untuk mempertahankan ideologi negara dan menerapkan kebijakan politiknya. Pemerintah juga ingin agar kebijakan politik tersebut diterima dan didukung oleh masyarakat.

Untuk tujuan ini, biasanya pemerintah meminta bantuan para ulama. Karena otoritas keilmuan, keshalehan, dan integritas ulama, kebijaksanaan politik pemerintah mudah diterima oleh masyarakat. Ulama memiliki kharisma dan menjadi panutan masyarakat karena memiliki kepribadian yang mulia. Oleh karena itu, ulama dan umara harus berinteraksi satu sama lain atau memiliki hubungan yang saling membutuhkan, yang pada akhirnya menghasilkan kerja sama antara kedua kelompok elit kepemimpinan ini.

Di masa sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Majelis Konstituante di Bandung (1956–1959), ulama NU menunjukkan sikap reaktif dan oposan. Mereka mempertahankan ideologi negara, yaitu dasar Islam atau Pancasila.

Gambar 6. 12 Wawancara dengan Dr Wasid Mansyur

Perubahan Organisasi NU dari konvensional menjadi organisasi yang merakyat terlihat ketika perlawanan melawan colonial Belanda dan Jepang. Begitu juga saat kemerdekaan, ketika ulama NU duduk di lembaga Legislatif di masa Demokrasi Liberal atau Perlementer (1952-1957), sikap reaktif masih mewarnai perilaku politik ulama NU. Akan tetapi, ketika NU terseret ke alam Demokrasi Terpimpin (1959-1965), para pemimpin NU yang dimotori oleh ulama atau kyai cenderung bersikap akomodatif. Sikap inilah yang kemudian dicap oleh kalangan di luar NU sebagai sikap oportunistik walaupun disanggah oleh pimpinan NU sesudahnya. Predikat apapun yang diberikan kepada perilaku politik NU yang luwes mengisyaratkan bahwa telah terjadi pergeseran perilaku politik ulama NU, dari reaktif kepada akomodatif. Selanjutnya ikhtiarnya adalah pemberdayaan masyarakat Indonesia yang seutuhnya di berbagai bidang pembangunan negara. (Wawancara dengan Wasid Mansyur tanggal 24 Nopember 2022).

Ketika NU bergabung dengan Masyumi sebagai partai politik, keterlibatannya dalam dunia politik semakin terlihat. Namun, NU tidak terwakili di badan eksekutif Masyumi dan hanya berpartisipasi dalam dewan syuro, yang tidak memengaruhi kebijakan partai, bahkan sampai dewan syuro akhirnya diturunkan. Akibat sejumlah perdebatan, NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Setelah keluar dari Masyumi, Nahdlatul Ulama secara institusi telah siap untuk mengubah visi dan misi. Dahulunya, organisasi ini berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi sekarang berfungsi sebagai organisasi politik.

Setelah resmi menjadi partai politik, NU mengikuti pemilu pertamanya pada tahun 1955. Meskipun NU adalah partai baru, hasilnya memuaskan, dengan PNI dan Masyumi berada di posisi ketiga. Karena massanya yang besar, tidak mengherankan jika NU dapat menjadi tiga besar pada pemilu 1955. Ketika Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpinnya dan NASAKOM muncul, posisi NU menjadi sangat sulit. Meskipun NU dekat dengan Soekarno, ia juga sangat membenci PKI. NU mengambil sikap tegas bahwa kemaslahatan umat yang lebih penting dan akan ikut berperan aktif dalam penumpasan PKI.

Sejak lama, NU telah curiga dan membenci PKI. Ketika PKI memulai gerakan yang disebut "Aksi Sepihak", kebencian ini semakin meningkat. Kader-kader PKI, terutama aktivis dari organisasi tani BTI (Barisan Tani Indonesia), secara sepihak memaksa pembagian tanah dan hasil pertanian kepada petani di berbagai desa, terutama di pulau Jawa. NU kemudian melakukan konsolidasi secara

matang dan barisan NU yang terdiri dari Pertanu, Lesbumi, Sarbumusi, Fatayat, Muslimat, IPNUIPPNU, PMII, dan khususnya Pemuda Anshor dan Banser telah siap menghadapi apa pun yang akan terjadi.

قال الحواريون نحن أنصار الله

Nama : PN. RAMBANG S.
Alamat : Djl. Semeru No. 10.
Renting K. Tjatjing Nr. 12.
Anak Tjb. Salatiga Nr. –
Tiabang Salatiga Nr. 11317.

Pas photo atau tiap djari

Nr. 199965.

KETERANGAN

Pemegang kartu ini adalah Anggauta Gerakan Pemuda Ansor Wilajah Djawa Tengah, dengan kesanggupan dan djandji akan mendjalankan dan mentaati ketentuan pasal II PRT Gerakan Pemuda Ansor.

Disjahkan pada tgl. 1 - I - 1965

PIMPINAN WILAJAH
GERAKAN PEMUDA ANSOR DJAWA TENGAH

Ketua:

(SODERI SISWODARSONO)

Gambar 6. 33 Kartu Anggota Gerakan Pemuda Ansor

Selanjutnya, NU memainkan peran penting dalam peralihan kekuasaan yang bertahap setelah Jenderal Soeharto menumpas G 30 S dalam beberapa hari saja. Selain terlibat dengan para aktivis radikalnya dalam demonstrasi mahasiswa di tahun 1966, NU juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh Soeharto. Bagi para jenderal yang percaya bahwa peralihan kekuasaan harus dilakukan, NU adalah satu-satunya pasangan yang dapat diharapkan. Hubungan Partai Nasional dengan Soekarno terlalu dekat, dan Masyumi menjadi partai yang dilarang tahun 1960 dan

diawasi pemerintah, sementara partai-partai lain terlalu kecil untuk berperan.

Pada saat itu, dua orang NU memainkan peran yang menentukan, yaitu Achmad Sjaichu di DPR-GR dan Subchan di MPRS. Meskipun semula NU ragu memberikan dukungan kepada Soeharto, namun ketika semakin jelas bahwa ia cukup memiliki pijakan legitimas yang kuat untuk berkuasa, pada saat yang sama mulai muncul kekecewaaan terhadap Soekarno, maka secara luwes NU mengalihkan dukungannya dari Soekarno kepada Soeharto. Maka sejak Januari 1967, NU menyatakan memisahkan diri dari Soekarno dan menolak Pel-Nawaksara, suatu laporan pelengkap pidato Soekarno di depan sidang MPRS, pertengahan 1966. Pada saat yang sama, NU juga mengajukan usulan untuk segera mencabut kekuasaan Soekarno, dan meminta MPRS untuk mengangkat Soeharto sebagai presiden.

Q. Pasca Proklamasi

Perjuangan terus berlangsung setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Setelah kekalahan Jepang dari Sekutu, kehidupan nasional dan internasional menjadi tidak stabil. Sekutu yang datang ke Indonesia untuk melakukan pelucutan senjata terhadap Jepang dianggap sebagai musuh yang akan mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda. Terbukti bahwa tentara Belanda (NICA) memboncengi tentara Sekutu. Tentara Nasional dan laskar rakyat melawan Sekutu dan Belanda dari 1945 hingga 1949.

Sejak awal, para kiai dan banyak pengikutnya terlibat aktif dalam perang kemerdekaan. Banyak dari mereka yang

bergabung dengan barisan Hizbullah adalah kelompk semi-regular yang dilatih dalam kemiliteran oleh tentara Jepang. Zainul Arifin, anggota Nahdlatul Ulama dari Sumatera Utara, adalah komandan Hizbullah. Laskar-laskar yang terdiri dari kiai desa dan pengikutnya muncul dengan nama Sabilillah, dipimpin oleh KH. Masykur, seorang tokoh NU yang kemudian menjadi politisi terkenal dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama beberapa kali. Seluruh Jawa-Madura, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera, sudah terbentuk pada awal tahun 1944, empat bulan setelah pembentukan Hizbullah. Sabilillah adalah laskar pendamping Hisbullah yang terdiri dari masyarakat non-formal.

Pada bulan September 1945, tentara Inggris tiba di Jakarta atas nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pada pertengahan bulan Oktober, tentara Jepang merebut kembali beberapa kota di Jawa, termasuk Semarang dan Bandung, yang sebelumnya berada di bawah kendali Indonesia. Kota-kota ini kemudian diserahkan kepada Inggris. Pemerintah Republik Indonesia, yang didirikan pada 17 Agustus 1945, menahan diri dari perlawanan dan mengharapkan penyelesaian diplomatik. Ketika bendera Belanda dikibarkan di Jakarta, pemerintah tampaknya menerimanya saja. Kondisi dan kenyataan ini sangat mengganggu para pempimpin Indonesia, termasuk para ulama Nahdlatul Ulama.

Kemudian, dengan mengeluarkan "Resolusi Jihad", NU secara aktif terlibat dalam perjuangan ini. Pada tanggal 21-22 Oktober, wakil-wakil dari cabang-cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan

menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah jihad. Resolusi jihad ini meminta pemerintahan Republik Indonesia untuk memulai perang suci sesuai dengan Resolusi Jihad Fisabilillah.

Resolusi Jihad menyatakan bahwa perang harus dilakukan untuk menentang dan melawan pendjadjah Fardloe "*ain*", yang harus dikerdjakan oleh semua orang Islam, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dengan atau tanpa senjata. Jika mereka berada dalam jarak 94 kilometer dari tempat masoek dan kedodoekan moesoeh, kewadjiban itu dianggap fardloe kifayah, atau dikerdjakan sebagian saja.Apabila kekoetan nomor satu dapat mengalahkan moesoeh, orang-orang yang berada dalam jarak 94 kilometer harus berperang untuk membantoi nomor satu, sehingga moesoeh kalah. Menurut riwayat Moeslim, kaki tangan moesoeh adalah pemedjah teqat dan kehendak ra'jat, dan haroes dibinasakan, menurut sabda Islam Chadist. P.J.M Presiden Republik Indonesia disampaikan melalui delegasi Moe'tamar; Panglima Tertinggi T.R.I.; M.T. Hizboellah; M.T. Sabilillah; dan Ra'jat Oemoem

Resolusi Jihad sangat berpengaruh besar terhadap umat Islam, khususnya NU. Banyak santri dan pemuda NU ataupun rakyat umum yang kemudian bergabung ke pasukan-pasukan non reguler seperti Hizbullah dan Sabillilah. Pada tanggal 10 Nopember, dua minggu setelah Surabaya kedatangan Inggris (diboncengi Belanda) pecah perang, yang dikenal sebagai perang 10 Nopember 1945. Resolusi Jihad ini dibuat di Markas Besar Oelama (MBO) di Waru Sidoarjo (Wawancara dengan Gus Sholahuddin tanggal 13 Desember 2022).

Banyak kaum muda NU dan santri aktif dalam perang. Banyak pejuang NU ini "memakai jimat" yang diberikan oleh para kiai mereka di pesantren atau desanya. Menggerakkan massa melalui pidato radio, Bung Tomo mungkin tidak pernah menjadi santri. Namun, dia dikenal meminta nasehat kepada K.H. Hasyim Asy'ari. Selain itu, konflik terjadi di beberapa wilayah seperti Ambarawa dan Semarang.

Dengan Resolusi Jihad dan kritiknya terhadap pemerintahan Indonesia yang dianggap pasif menghadapi serangan kaum agresor penjajah, NU telah menampilkan dirinya sebagai kelompok yang cinta tanah air dengan membangun kekuatan radikal melawan musuh dengan perang. Dengan terus mengkritik pemerintah yang menandatangani "Perjanjian Linggarjati dan Renville" dengan Belanda, pandangan ini muncul berkali-kali. Kaidah fikih yang menjadi dasar keagamaan NU menyebabkan perubahan sikap mereka, yang kadang-kadang moderat dan kadang-kadang radikal.

Dalam konteks ini, penguasa yang sah adalah para pemimpin Republik Indonesia. Namun, dalam sejarah, Nahdlatul Ulama juga mengakui pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah de facto yang sah yang harus dihormati (walaupun bukan muslim) selama masih memungkinkan umat Islam beragama. Jepang mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda, dan ketika Belanda ingin kembali, mereka menggantikannya dengan pemerintahan pribumi.

Jadi, Belanda dan sekutunya adalah musuh kafir yang harus diperangi. Perang suci dianggap sebagai kewajiban agama. Setelah perang, Muktamar Nahdlatul Ulama pertama

diadakan pada bulan Maret 1946. Kali ini, Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa orang yang diwajibkan agama harus berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia.

R. Masa Orde Baru

Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerintahan dan masyarakat Indonesia. NU terus membantu Indonesia karena tujuan utama berdirinya adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur (terwujudnya suatu negara yang aman, makmur, dan mendapat pengampunan dari Tuhan).

Selama Orde Baru, tepatnya pada tahun 1970, Nahdlatul Ulama berusaha untuk mempertahankan kepentingan agamanya di sidang MPR. Mereka diganggu oleh dua masalah penting: rencana untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan (penataran P-4) kepada semua orang Indonesia dan pengakuan resmi bahwa kelompok aliran kepercayaan akan memiliki direktoratnya sendiri di Departemen Agama.

Mengenai masalah kepercayaan, pertanyaan utama ialah apakah kepercayaan ini merupakan kepercayaan agama atau bukan, atau apakah itu merupakan agama baru. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana kata "kepercayaan" ditafsirkan dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kepercayaan Hatta semasa hidupnya ialah kepercayaan agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha), bukan ajaran lain. Pada saat itu, NU sangat menentang rencana pemerintah tersebut. Dalam pertemuan dengan Soeharto, Kiai Bisri meminta agar kelompok aliran

kepercayaan tidak diberi pengakuan resmi karena mereka dianggap kafir dan musyrik. Namun, presiden tidak mau menyerah, menyebabkan NU keluar dari pemilihan.

Namun, para ulama belum benar-benar kalah dalam perjuangan itu. Meskipun penataran P-4 masih berlangsung, ada perjanjian bahwa kelompok aliran kepercayaan tidak akan berada di bawah naungan Departemen Agama (Wawancara dengan Choirul Anam pada 3 Mei 2022).

Gambar 6. 44 Wawancara dengan Drs. Choiril Anam

S. Kepemimpinan NU semasa Gus Dur

Dengan kepimpinan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nahdlatul Ulama (NU) mengalami transformasi yang luar biasa selama periode Orde Baru. Gus Dur melakukan banyak hal yang berbeda dari mayoritas kelompok Islam yang menentang penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Dengan sumber hukum yang luas, NU dapat menerima Pancasila.

Namun Presiden Soeharto tidak mau begitu saja membiarkan NU. Gus Dur juga dimusuhi oleh Soeharto karena pilihan sikap oposisinya. Namun demikian, Gus Dur berkawan dengan Jenderal Benny Moerdani. Gus Dur tentu saja tahu, bahwa dirinya bisa ditahan kapan saja oleh aparat Soeharto. Saat Gus Dur mengalami penahanan di era 1980-an, ia meminta kepada kawan-kawannya memberi tahu Benny yang saat itu sedang menjabat sebagai Panglima ABRI (1983-1988). Setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 yang memicu krisis kepercayaan dalam hubungan antara pemerintah dengan kalangan Islam politik, Gus Dur mengajak Jenderal Benny untuk bersafari dari pesantren ke pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu upaya Gus Dur yang nantinya bisa membuat ABRI dan pemerintah tidak dianggap musuh oleh rakyat Indonesia terutama oleh kalangan kelompok Islam.

> "Kita menghadapi tugas-tugas yang banyak dan berat, namun apabila kita tetap menjunjung akhlak ulama dalam kehidupan kita sehari-hari, Insya Allah kita akan dapat menempuhnya dengan penuh kesabaran dan tawakkal. Tujuan NU amat mulia, karena itu harus kita tempuh dengan cara-cara yang mulia pula."

Petikan Pidato KH Wahab Chasbullah, Muktamar ke-25 NU di Surabaya, 20-25 Desember 1971

T. Masa Reformasi

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengerikan yang kemudian meluas ke krisis ekonomi dan politik. Krisis ini kemudian berubah menjadi krisis kepemimpinan Order Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Krisis multidimensi ini memicu gerakan reformasi yang digalang oleh mahasiswa dan kelompok menengah. Pada akhirnya, krisis ini menyebabkan ketidakpercayaan di masyarakat dan protes besar-besaran, terutama di kalangan mahasiswa. Ratusan ribu mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut Soeharto turun sebagai presiden dan mengembalikan kekuasaan pemerintah ke hati nurani rakyat. Singkatnya, pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden BJ Habibie akhirnya memegang jabatan presiden.

Antara tahun 1999 dan 2004, organisasi Nahdlatul Ulama mengalami pergeseran yang signifikan terkait dengan penyikapan terhadap Khittah NU 1926. Warga NU telah memiliki kesempatan untuk membentuk partai politik baru sebagai hasil dari gerakan reformasi.Meskipun ada pro dan kontra, warga NU harus memiliki platform yang representatif untuk menyampaikan aspirasi politik mereka.

Setelah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid, warga NU mulai melakukan gerakan politik yang tak tertahankan. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan PKB pada saat itu, masih menjabat sebagai pengurus NU di semua tingkatan. Selain itu, banyak politisi dari berbagai partai beralih ke PKB. KH Abdurrahman Wahid meminta kepada KH Hasyim Muzadi untuk tetap membesarkan NU, tetapi KH Abdurrahman Wahid memilih untuk membesarkan PKB. Choirul Anam ditunjuk sebagai ketua Tanfidziyah PKB di tingkat pengurus wilayah Jawa Timur.

Pada Pemilu awal era reformasi KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-4 setelah memenangkan pemilihan melalui pemilihan di Lembaga

DPR RI. Sejarah baru tercipta seorang kader Nahdlatul Ulama pertama yang diberi Amanah memimpin bangsa Indonesia (Wawancara dengan Choirul Anam).

Dalam situasi di mana Gus Dur terpilih sebagai presiden Republik Indonesia, pelaksanaan Khittah NU menghadapi banyak masalah. Selain itu, seolah-olah misi Khittah NU tidak lagi diperhatikan, dan pertimbangan politik semakin menonjol di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Untuk mengembalikan NU ke Khittah tahun 1926 terus berusaha, terutama selama masa kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU dari tahun 1999 hingga 2009. Untuk pengurus politik—bukan hanya PKB—rangkap jabatan tidak lagi diperbolehkan dalam kepengurusan NU di semua tingkatan. Demikian pula, mereka yang ingin menjadi anggota DPR harus menghindari menggunakan nama NU untuk kepentingan politik. Meskipun demikian, kebijakan itu hilang setelah Megawati Soekarno Putri digandeng oleh KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2004. Selain KH Hasyim Muzadi, ada juga KH Sholahuddin Wahid, yang merupakan adik kandung dari KH Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden 2004, dan Prof. KH Maruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Di sini, Khittah NU diuji lagi, tetapi keputusannya tetap berlaku meskipun banyak hambatan.

Sangat penting untuk mengembalikan Nahdlatul Ulama ke tujuan awalnya sebagai gerakan sosial masyarakat yang berfokus pada bidang keagamaan dan sosial untuk umat. Meskipun ada upaya politik, Nahdliyyin terus

mendorong pemikiran masyarakat, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan pendidikan. Semangat Khittah NU 1926 harus dihidupkan kembali untuk membuat perjuangan NU lebih bermanfaat dan bermakna bagi masyarakat.

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
https://lptnu-jatim.or.id/

BAB VI
STRATEGI ORGANISASI DALAM MENUJU NAHDLATUL ULAMA YANG MODERN DAN MAMPU BERTAHAN DALAM ERA GLOBALISASI

A. Strategi Modernisasi Organisasi Nahdlatul Ulama

Modernisasi Nahdlatul Ulama sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum didirikan organisasi ini. (Wawancara Prof. Dr. Ir A. Jazidie, M.Eng, Tanggal 4 Maret 2024).

KH. Wahab Hasbullah dan ulama-ulama lain membentuk tiga organisasi pergerakan yang merupakan embrio dari lahirnya NU, yaitu Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), Taswirul Afkar (Pengembangan Pemikiran), dan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Para Pedagang). Dalam rangka membangkitkan spirit kebangsaan, KH. Wahab juga mengarang sebuah syair yang digubah menjadi lagu yang berjudul Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air).

Selanjutnya, organisasi NU merespons berbagai kondisi sosial politik dan kemasyarakatan pada abad-abad modern, termasuk juga melakukan persiapan-persiapan untuk merespons perkembangan di masa depan pada abad-abad *post modern*. Kemampuan organisasi NU dalam

merespons perubahan dan perkembangan zaman telah teruji dengan baik dan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan pemikiran dan ajaran yang sangat luas dalam kehidupan dunia.

Organisasi modern dijalankan oleh satuan-satuan kerja yang saling tergantung untuk melakukan tugas-tugas terspesialisasi dalam suatu pembagian kerja (Friedson 1976; Durkheim 1984). Menurut Friedson (1976:310), pembagian kerja paling baik digambarkan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana individu dan kelompok menghadapi berbagai macam kondisi dan situasi di tempat kerja mereka, terlepas dari model organisasi yang digunakan untuk menilai, mengontrol, atau mengkonfirmasi hasil kerja mereka (Friedson 1976).

Dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat modern sampai ke masyarakat postmodern, NU memiliki beberapa prinsip yang sangat relevan, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Sikap pemikiran kemasyarakatan NU dituangkan dalam konsep berikut:

Pertama, mengembangkan sikap tawassuth atau pertengahan atau bersikap moderat yang disebut sebagai ummatan wasatha. Sikap ini mengambil pedoman dari surat al-Baqarah ayat 143. Tawassuth atau moderat, menghindari pemikiran yang ekstrem, baik yang mengarah kepada literal maupun liberal.

Kedua, sikap tawazun atau seimbang, yaitu menyelaraskan hubungan dengan Allah S.W.T. dan hubungan dengan sesama manusia, serta makhluk lain, menyeimbangkan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan demikian, sikap tawazun adalah sikap yang

senantiasa berusaha mencari cara atau jalan yang tepat untuk melaksanakan ibadah dan berkhidmat pada masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan zaman.

Ketiga, sikap I'tidal atau lurus dan konsisten, sikap ini rujukannya adalah QS. Al-Maidah 08: berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan sikap adil ini, maka warga NU mengakui bahwa umat Islam secara keseluruhan adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang bersifat majemuk dan multikultural. Dengan sikap adil dan konsisten, maka akan mengarahkan umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan terpuji dalam berbagai kehidupan, serta mewujudkan kemaslahatan umum bagi sesama umat manusia.

Keempat, sikap tasamuh (toleran) terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Sikap tasamuh ini sangat dibutuhkan dalam seluruh kehidupan umat manusia di dunia, karena pada abad-abad modern dan postmodern seluruh bangsa-bangsa di dunia merupakan masyarakat yang multikultural dengan berbagai macam budaya, adat istiadat, keyakinan, agama, dan pandangan hidup.

Demikianlah bahwa Nahdlatul Ulama bisa dikatagorikan sebuah organisasi modern yang terus bisa menyesuaikan dengan semua kondisi setiap zamannya. Dimana mampu mengarahkan umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan terpuji dalam berbagai kehidupan, serta mewujudkan kemaslahatan umum bagi sesama umat manusia.

Konsep strategi ini sesuai dengan konsep Dynamic *Capabilyty* Dimana organisasi NU mempunyai kemampuan berkembang dan terus tumbuh dalam membangun, mengintegrasikan dan merekonfigurasi komptensinya baik internal maupun eksternal.

Gambar 6.15. Wawancara dengan Prof. Dr. Ir Ahmad Jazidie, M.Eng tanggal 4 Maret 2024

B. Pendidikan

Sektor pendidikan sangatlah penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sektor Pendidikan menjadi perhatian penting bagi para kader Nahdlatul Ulama terutama para generasi muda. Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2022 – 2026. Prof. Zakki begitu beliau biasa dipanggil menyampaikan:

Kekuatan Nahdlatul Ulama bisa kuat bertahan dan berkembang sampai berusia 100 tahun lebih hingga sekarang karena:

1. Model tata kelola organisasi
2. Ragam substansi yang berkembang di Nahdlatul Ulama
3. Faktor pandangan hukum Islam yang di yakini.

Dalam pandangan Prof. Zakki ini model tata kelola organisasi ini dilihat dari pandangan beliau bahwa:

Di NU ada rumusan NU itu adalah pesantren yang kecil dan pesantren adalah NU yang besar, ataupun sebaliknya pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren yang besar. Maksudnya tidak ada NU jika tidak ada pesantren dan sebaliknya pesantren bisa bertahan dan berkembang dengan NU. NU akan menjadi kuat karena mempunyai pesantren. Selama pendidikan di pesantren kuat tidak perlu ragu maka NU akan semakin kuat.

Sehingga NU tidak bisa dipisahkan dengan Kyai dan santri. Hal ini akan berpengaruh dengan bagaimana NU tersebut di kelola. Karena *The Back Bone of Nahdlatul Ulama is Pesantren*. Sehingga mengelola Nu tidak bisa jauh dengan pesantren. Sehebat apapun kita tidak bisa mengajarkan tata

kelola organisasi NU tanpa belajar dan tahu bagaimana sebuah pengelolahan pendidikan pesantren.

Mobilisasi sosial keilmuan para kader NU terjadi di tahun 1980an, banyak perubahan para kader NU yang keluar belajar dari basis keilmuan Agama terutama kader mudanya. Mereka banyak keluar belajar keilmuan sains, teknologi, manajemen, kedokteran dan keilmuan lainnya. Hal inilah yang semakin membuat NU semakin dinamis dan kenyal dalam menjalankan kehidupan organisasinya. Semakin banyak kader NU baik struktural maupun kultural bisa menguasai berbagai bidang keilmuan yang bisa digunakan untuk memperbesar pertumbuhan NU dengan berbagai sendi kehidupan selain di pesantren. Tanpa mengurangi dan meninggalkan jati diri sebagai seorang santri. Dengan kapasitas dan akademik yang berbeda beda para kadernya akan membuat NU semakin dinamis dan kenyal. Maka tidak heran ada transformasi di tubuh Nahdlatul Ulama mereka yang berangkat dengan kaum santri, mereka mengalami transformasi akademik. Sehingga prespektif agama dapat diintegrasikan dengan keilmuan modern, apakah dengan ekonomi, politik, teknologi maupun sains. Sama juga dengan semua keilmuan modern bisa dibahas dengan presepektif kesantrian. Inilah dinamika NU sekarang ini.

Karena kuatnya hubungan NU dan Pesantren maka semua perubahan di tubuh NU akan mempengaruhi pola pikir di kalangan pesantren. Sehingga tidak sedikit pesantren memasukkan ilmu modern dalam kurikulum pesantrennya. Bahkan bertransformasi menjadi pesantren modern tanpa meninggal keilmuan *salaf* yang menjadi ruh keilmuan di

pesantren. Kuatnya NU karena *back bone* kuat dengan pesantren yang kuat.

Hasil wawancara dengan M.Ishaq santri aktif di Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Kabupaten Probolinggo adalah belajar di Pesantren NU mengajarkan sebuah kemandirian, keimanan yg kuat akan sebuah ajaran islam dan yang terpenting adalah mampu mencintai bangsa dan negara sampai akhir hidupnya.

Selanjutnya ragam substansi yang berkembang di Nahdlatul Ulama. NU yang awalnya berupa organisasi *jamiyah diniyah islamiyah* yang murni untuk kegiatan keislaman tanpa dipengaruhi ekonomi, politik, maupun sosial, tetapi karena munculnya mobilisasi sosial di tubuh Nahdlatul Ulama sehingga banyak kader-kader NU berkembang keahliannya bukan hanya keahlian bidang agama saja, maka berkembanglah keragaman keilmuan modern. Substansi inilah yang menguatkan Nahdlatul Ulama. Sehingga terjadi kebesaran NU tidak bisa semata mata dari satu sektor bidang Agama saja. Disinilah kebutuhan ekonomi dan infrastruktur sosial sangat penting sehingga bertemulah mobilisasi sosial dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya tumbuh di struktur organisasi NU ada berbagai devisi keahlian.

Kemudian sebagai pelengkap transformasi di tubuh Nahdlatul Ulama muncullah kebutuhan kader berbagai bidang lintas zaman. Kemudian muncul sekarang Gus Yahya sebagai pemimpin NU. Struktur Nu dianggap seperti struktur negara. Negara Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200juta jiwa dengan mempunyai ASN sekitar 6 ribu ASN, maka NU harus mempunyai struktur diseluruh Indonesia sebanyak 6 ribu . tentunya NU

harus mempunyai sistem kaderisasi yag terstruktur dan massif di semua tingkatannya. Ada 3 sistem kaderisasi di tubuh Nahdlatul Ulama yaitu:

1. PD-PKPNU (Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama)
2. P-MKNU (Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama)
3. AKN-NU (Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama)

Sistem pendidikan kaderisasi ini diluncurkan setelah disahkan melalui acara Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Jakarta, pada tanggal 20-22 Mei 2022. Pada acara Konbes NU di Jakarta ini menghasilkan 19 Peraturan Perkumpulan (Perkum), dimana salah satunya adalah Peraturan Perkumpulan (Perkum) mengenai Sistem Kaderisasi. Sebelumnya pada awal Maret 2022, PBNU telah melakukan moratorium terhadap dua jalur kaderisasi yang lama yakni MKNU dan PKPNU. Dimana sudah selesai dintegrasikan program dua sistem kaderisasi yaitu MKNU dan PKPNU.

Selanjutnya mengelolah Nahdlatul Ulama sekarang adalah mengelolah keberagaman. Dengan mengintegrasikan semua sumber daya kader Nahdlatul Ulama dari berbagai sumber disiplin keahlian keilmuannya.

Pendidikan di tubuh NU bukan hanya di lingkungan Pesantren saja. NU sudah membuat lembaga Perguruan Tinggi NU (PTNU) di berbagai daerah di Indonesia. Program studi yang ada di PTNU bukan saja Program studi Agama Islam saja melainkan Program Studi Umum sudah menyebar di PTNU seluruh Indonesia.

Tercatat dalam Perguruan Tinggi yang ada dibawah Lembaga Perguruan Tinggi NU (LPTNU) hingga hari ini berjumlah 283 Perguruan Tinggi dengan rincian:

1. Badan Perkumpulan: 28 Perguruan Tinggi
2. Afiliasi: 2 Perguruan Tinggi
3. Yayasan: 253 Perguruan Tinggi

Sehingga Total perguruan tinggi yang berada dibawah Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama berjumlah 283 Kampus.

C. Media Komunikasi

Komunikasi di kalangan NU sangatlah bervariasi. Melalui komunikasi diantara Pesantren, Teknologi maupun melalui pertemuan rutin Lailatul ijtima dan Bahtsul Masail.

Generasi muda sangat terampil dalam penggunaan teknologi, oleh karena itu, NU memanfaatkan alat-alat digital untuk berkomunikasi dengan mereka. Membangun platform online, aplikasi mobile, atau media sosial yang didedikasikan untuk NU dapat membantu mempertahankan keterlibatan generasi muda .

Gambar 6. 16 Aplikasi Mobile NU Online Super App

NU memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi dengan generasi muda. Membuat akun resmi NU di platform-platform ini dan secara rutin membagikan konten yang relevan dengan pesan-pesan organisasi dapat membantu mendekati dan mempertahankan keterlibatan mereka. Menggunakan teknologi secara efektif adalah cara yang penting untuk mendekati dan mempertahankan keterlibatan generasi muda dalam NU. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dalam era digital dan membangun jaringan yang kuat dengan anggota yang lebih muda yang memiliki potensi besar untuk mendukung dan memperluas visi dan misi organisasi.

Kemudian sistem komunikasi ini diperkuat lagi dengan faktor pandangan hukum Islam yang di yakini. Sebagai jam'iyah Nahdlatul Ulama sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* mulai sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama meletakkan faham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* sebagai dasarnya. Nahdlatul Ulama menganut salah satu dari empat

mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Peralihan mazhab secara total atau pun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan *(hajah)* dimungkinkan saja terjadi, meskipun pada kenyataan sehari-hari, para ulama Nahdlatul Ulama menggunakan *fiqih* masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa semua fatwa, petunjuk hukum dan keputusan hukum yang telah diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren bisa dipastikan selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya dalam keadaan tertentu saja untuk tidak selalu melawan budaya konvensional untuk berpaling ke mazhab lain.

Dalam struktur kepengurusannya, NU mempunyai lembaga Syuriyah yang bertugas antara lain menyelenggarakan forum komunikasi antar pesantren, kyai dan santri melalui bahtsul masail secara rutin. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, yang bertalian dengan masail fiqhiyyah mau pun masalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (*Thoriqah*). Forum ini biasanya juga diikuti oleh Syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pesantren.

Rumusan hukum semua persoalan umat sejak NU berdiri selalu dijadikan acuan dalam meyelesaikan problematika umat islam. hasil produk bahtsul masail Syuriyah NU, bukan merupakan keputusan akhir. Masih dimungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang bila diperlukan. Bila di kemudian hari ada salah seorang ulama, meskipun bukan peserta forum Syuriyah, menemukan nash/qaul dari salah satu kitab dan ternyata bertentangan dengan keputusan tersebut, maka keputusan itu bisa ditinjau

kembali dalam forum yang sama. Tidak ada perbedaan, antara pendapat ulama yunior maupun senior, antara yang muda dan yang tua dan antara santri dan kiai. Karena dalam dialog hukum pada acara *bahtsul masail* ini yang paling mendasar adalah benar atau tepatnya pengambilan hukum sesuai dengan substansi masalah dan latar belakangnya.

Gambar 6.17 Kegiatan *Bahtsul Masail* di arena Muktamar Lampung akhir bulan Desember tahun 2021 yang pernah diikuti oleh penulis.

Hasil keputusan *bahtsul masail Syuriyah* Nahdlatul Ulama itu, oleh pengurus Cabang (PC) kepengurusan NU di tingkat Kota/Kabupaten disebar luaskan melalui kelompok pengajian rutin, majelis Jumat, pesantren-pesantren dan kemudian untuk dipedomani, dijadikan rujukan oleh warga Nahdlatul Ulama khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya juga merujuk kepada keputusan

forum *bahtsul masail* tersebut Para Kyai NU dalam memberikan petunjuk hukum kepada masyarakatnya.

Hal ini bukan karena keputusan hasil *bahtsul masail* itu mengikat warga NU, karena kepercayaan dan rasa mantap, warga NU dan masyarakat terhadap hasil produk Syuriyah NU. Meskipun warga NU tahu, proses pengambilan keputusan dalam forum *bahtsul masail* itu terdapat perdebatan yang sengit misalnya, namun apabila keputusan *bahtsul masail* telah diambil, masyarakat dan warga NU mengikuti keputusan *bahtsul masail* itu tanpa ada rasa keterikatan-paksa, tetapi justru dengan kesadaran yang mantap, yang mungkin dipengaruhi oleh budaya paternalistik.

Gambar 6.18 Wawancara dengan Prof Ahmad Muzakki tanggal 17 Desember 2023 di Jember.

D. Kemitraan dan Toleransi

NU dapat menjadi organisasi yang modern dan tangguh dalam menghadapi era globalisasi, sambil tetap setia pada nilai-nilai Islam, kebudayaan Indonesia, dan misinya untuk melayani masyarakat dan mempromosikan perdamaian serta keadilan (Musyarrofah & Zulhannan, 2023).

Dalam Hal ini, jika organisasi tidak peduli dengan perkembangan zaman dan tidak mampu menarik perhatian generasi muda, dapat menjadi hambatan serius dalam menjaga kelangsungan dan relevansi organisasi. Oleh karena itu, NU harus mengambil tindakan yang proaktif untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan organisasi. Organisasi harus mengembangkan program dan aktivitas yang menarik bagi generasi muda, seperti program pendidikan, pelatihan, kegiatan sosial, dan olahraga. Ini akan membantu menjaga mereka tetap terlibat dalam NU.

Menjaga kemitraan dengan semua lapisan golongan masyarakat baik sesama muslim ataupun *non muslim* terus dilakukan sejak organisasi ini berdiri. Menjaga pluralisme keberagaman demi sebuah persatuan bangsa adalah cita cita pendiri organisasi Hadratus Syaikh Hasyim Asyari

Selain itu ada pesan dari Kyai Zuhri Zaini (wawancara tanggal 8 Januari 2023) pengasuh Pondok pesantren Nurul Jadid, Paiton, kabupaten Probolinggo Jawa Timur sekaligus *Rois* Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur:

Manajemen NU itu seperti filosofi *tasbih* (alat untuk berdzikir) NU itu seperti *kuncung* (pangkal Tasbih) *tasbih*. Jika akan memulai awal berdzikir dan mengakhiri berdzikir mesti

melalui kuncung *tasbih* tersebut. Saat dimulai berdzikir maka 99 pioner *tasbih* mengikuti bergerak untuk berdzikir. Itulah di NU. *Kuncung tasbih* tersebut adalah NU sedangkan 99 pioner *tasbih* adalah pondok - pondok pesantren, Badan Otonom (Banom) NU, Pengurus NU di semua tingkatan serta jamaah Nahdliyin akan mengikuti kebijakan dan keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Semua kebijakan dan Keputusan organisasi NU akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan kondisi bangsa Indonesia.

Konsep pemikiran dari Kyai Zuhri Zaini ini selaras dengan konsep *Dynamic Capabilities,* dimana kemampuan sebuah organisasi dalam mengintegrasikan, membangun kompetensi organisasi baik secara internal maupun eksternal bergerak secara bersama dalam mengatasi perubahan lingkungan secara tepat. Serta bergerak bersama dalam satu tujuan organisasi yang digerakkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan dapat mempertahankan daya saing organisasi dimasa sekarang maupun akan datang.

Pergerakan Nahdlatul Ulama yang selalu berada dalam satu ikatan organisasi bergerak demi persatuan sebuah bangsa bisa mendapatkan sebuah kelincahan organisasi dalam mengembangkan dan mempertahankan keutuhan organisasi dalam merasakan dan menanggapi sebuah perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat. Keutuhan organisasi ini tentunya harus bisa menjadi garda terdepan menjaga toleransi dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Gambar 6.19 Penulis setelah melakukan interview dengan KH Zuhri Zaini

Gambar 6.20 *Tasbih* alat untuk *berdzikir*

BAB VII
E P I L O G

Setelah menelaah berbagai aspek manajemen strategi dan sistem organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita sampai pada kesimpulan yang mempertegas betapa pentingnya peran strategis NU dalam mempertahankan keutuhan dan stabilitas bangsa ini. Buku ini telah mengupas secara mendalam sejarah, dinamika, strategi, serta tantangan yang dihadapi oleh NU dalam menjalankan misinya.

Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga sebuah kekuatan sosial yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip Islam yang moderat, inklusif, dan toleran, NU berhasil merumuskan strategi-strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini membuktikan bahwa NU memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengelola organisasi besar dengan struktur yang kompleks.

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa yang luas dan beragam, NU menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Namun, dengan manajemen yang baik dan strategi yang tepat, NU terus mampu menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Keberhasilan NU dalam

menjalankan perannya juga tidak terlepas dari komitmen dan dedikasi para pengurus dan anggotanya yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang kontribusi NU dalam menjaga NKRI. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi organisasi-organisasi lain dalam mengembangkan strategi dan sistem yang efektif demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berharga bagi pembaca, serta menjadi sumbangsih nyata dalam upaya menjaga dan mempertahankan NKRI.

Akhir kata, mari kita terus berjuang dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam setiap langkah dan upaya kita.

DAFTAR PUSTAKA

Afridah, M. H. (2017). Why Islam Nusantara Is A Significant Leveraging Feature To Indonesia's Foreign Policy. *Istiqro*, *15*(2), 453–474.

Anwar, S., & Saidun Anwar, M. (2019). Development Of Digital Library Through Student Empowerment Scholarship Of NU Smart Program. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, *8*(11). www.ijstr.org

Arifianto, A. R. (2021). From ideological to political sectarianism: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the state in Indonesia. *Religion, State and Society*, *49*(2), 126–141. https://doi.org/10.1080/09637494.2021.1902247

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, *17*(1), 99–120. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01492063911700108

Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. *Human Resource Management*, *37*(1), 31–46.

https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-050X(199821)37:1<31::AID-HRM4>3.0.CO;2-W

Barton, G., Fealy, G., & Suaedy, A. (2010). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKis Yogyakarta.

Baru, G., & Boboh, R. W. (2018). ISLAM NUSANTARA AND WORLD PEACE A CONCEPT OF STRUGGLE NAHDLATUL ULAMA IN INDONESIA. *International Journal of Current Advanced Research*, *7*(5). https://doi.org/10.24327/ijcar.2018

Child, J. (1972). Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice. *Sociology-the Journal of The British Sociological Association - SOCIOLOGY*, *6*, 1–22. https://doi.org/10.1177/003803857200600101

Dove, R., & Palmer, L. M. (2004). Response Ability: The Language, Structure, and Culture of the Agile Organization. *INSIGHT*, *6*(2), 41–41. https://doi.org/10.1002/inst.20046241

Ernawan, E. R. (2011). *Organizational Culture: Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta.

George, B. (2003). *The Value of Leadership*. www.corecoaching.org

Grewal, R., & Tansuhaj, P. (2001). Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis / 67 Building Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic Flexibility. In *Journal of Marketing* (Vol. 65).

Halim, A. (1970). *Sejarah Kyai Haji Abdul Wahab (NU)*. Percetakan Baru.

Hamdi, A. Z. (2021). Constructing Indonesian Religious Pluralism: The Role of Nahdlatul Ulama in Countering Violent Religious Extremism. *Journal of Indonesian Islam*, *15*(2), 433–464. https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.433-464

Handoyo, B. H. C. (2003). *Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Atma Jaya.

Haryono, A. (2018a). Communication patterns among kiais of Nahdlatul Ulama in the madurese ethnic group. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *7*(3), 714–726. https://doi.org/10.17509/ijal.v7i3.9822

Haryono, A. (2018b). Communication patterns among kiais of Nahdlatul Ulama in the madurese ethnic group. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *7*(3), 714–726. https://doi.org/10.17509/ijal.v7i3.9822

Hasan Bisri. (2001). *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama Islam*. Raja Grafindo Persada.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life cycle theory of leadership. *Training & Development Journal*, *23*(5), 26–34.

Hosen, N. (2004). NAHDLATUL ULAMA AND COLLECTIVE IJTIHAD. In *New Zealand Journal of Asian Studies* (Vol. 6).

Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Ibda, H. (2019). The Strategy of the Educational Institution Ma'arif Nahdlatul Ulama of Central Java In Preventing Radicalism. In *Borneo International Journal of Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 2).

http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/viewFile/673/595.

Ishomuddin, Abidah, L., Kartono, R., & Wahyudi. (2019). Culture and Political Understanding on Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) in East Java. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, *6*(8). https://doi.org/10.20431/2349-0381.0608006

Ismail, F. (2011). THE NAHDLATUL ULAMA Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State. *Journal of Indonesian Islam*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.247-282

Journé, B., Laroche, H., Bieder, C., & Gilbert, C. (2020). *Human and Organisational Factors Practices and Strategies for a Changing World*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-25639-5

Khari, C., & Sinha, S. (2018). Organizational Spirituality and Knowledge Sharing: A Model of Multiple Mediation. *Global Journal of Flexible Systems Management*, *19*. https://doi.org/10.1007/s40171-018-0197-5

Lewis, P. V. (1987). *Organizational Communication: The Essence of Effective Management*. Jhon Willey & Sons. Inc.

Mahmud, Y. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an.

Masudi, M. F. (2007). *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat*. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, *42*(1), 58–84. https://doi.org/10.1355/cs42-1c

Miller, K. D. (2002). Competitive strategies of religious organizations. *Strategic Management Journal*, *23*(5), 435–456. https://doi.org/10.1002/smj.234

Morgan, G. (2006). Images of Organization. In *The Academy of Management Review* (Vol. 12). https://doi.org/10.2307/258079

Mubin, F. (2020). *SEJARAH DAN KIPRAH NAHDLATUL ULAMA DI INDONESIA*. https://doi.org/10.31219/osf.io/69wjh

Mujahid, A. (2013). *Sejarah NU "Ahlus Sunnah Wal Jama'ah" di Indonesia*. Toobagus Publishing.

Musyarrofah, U., & Zulhannan, Z. (2023). Religious Moderation in the Discourse of Nahdlatul Ulama's Dakwah in the Era of Industry 4.0. *Millah: Journal of Religious Studies*, 409–434. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art5

Pace, R. W., & Faules, D. F. (1989). *Organizational Communication* (2nd ed.). Prentice-Hall.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2015). *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*.

Pribadi, Y. (2014). Religious networks in Madura pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the core of santri culture. *Al-Jami'ah*, *51*(1), 1–32. https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32

Roy Purwanto, M., Mukharrom, T., & Munjin Nasih, A. (2019). Inclusive, Exclusive, Radical and Nahdlatul Ulama. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net* (Vol. 9, Issue 10). www.ijicc.net

Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping Agility Through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms. *MIS Quarterly*, *27*, 237–263. https://doi.org/10.2307/30036530

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, *18*(7), 509–533. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Tim PWNU Jawa Timur. (2007). *Aswaja an-nahdliyah : ajaran ahlussunnah wa al-jama'ah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama*. Khalista.

Wajdi, F. (2018). The Discourse of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama with Considerations of Geertz's Religion of Java. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, *2*(1), 45–60. https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.04

Woodward, M., & Kunci, K. (2018). *Islam Nusantara: A Semantic.... HERITAGE OF NUSANTARA: INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIGIOUS LITERATURE AND HERITAGE ISLAM NUSANTARA: A SEMANTIC AND SYMBOLIC ANALYSIS*.

Yusuf, S. E. (2008). *Mengukuhkan Tradisi Memodemisasi Organisasi*.

BIOGRAFI

Dr. H. Mohammad Khusnu Milad, S.T., M.MT.; Lahir di Probolinggo 29 Januari 1979. Pendidikan dasar di SDN Sukabumi II Probolinggo. Pendidikan Menengah di SMPN I Probolinggo dan SMAN I Probolinggo. Pendidikan Tinggi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Surabaya, dilanjutkan di Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya jenjang Strata-1. Pendidikan Tinggi Strata-2 di Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pendidikan Tinggi Strata-3 di Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.Dilahirkan dari keluarga Bani KH Shiddiq dan menjadi ketua Yayasan Pesantren Darul Mukhlasin Tegalsiwalan Probolinggo serta kedekatan dengan banyak narasumber Kiai menjadikannya tidak banyak kesulitan menggali data sejarah NU, baik dari pelaku sejarah maupun Literatur yang ada.

Alamat Rumah
Pondok Pesantren Darul Mukhlasin, Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

Pengalaman Organisasi
1. PMII Komisariat ITS, 1998-1999
2. Direktur Majalah "Alternatif", ITS 1998-2000
3. Wakil Ketua PC IPNU Kota Probolinggo, 2000-2003
4. Ketua Litbang Pimpinan Pusat (PP) IPNU, Jakarta 2003-2006
5. Wakil Ketua PC ANSOR, Kabupaten Probolinggo 2006-2009
6. Divisi Sumber Daya Manusia Pimpinan Wilayah Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PW LPTNU), Jawa Timur 2015-sekarang
7. Penasehat PC GP ANSOR Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 2020-sekarang
8. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo2004-sekarang.

Prof. Dr. Pribadiyono, Ir., M.S. Lahir di Jember tanggal 18 Juli 1951. Bertempat tinggal di Jl. Sidosermo I/10 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Riwayat pendidikan yang ia tempuh : Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi 10 November Surabaya, Master of Science University Manajemen Airlangga Surabaya, Doctor of Economic & Management Khusus Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan

Profesor Manajemen Sumber Daya Manusia & Organisasi. Ia adalah Dosen LL Dikti Jatim, Dosen PTN dan PTS, ia merupakan Founder and Owner of PT Quantum HRM Internasional, Direktur Eksekutif LSP Quantum.

Adapun beberapa pengalaman profesional: Assesor Ahli Utama bidang Personal Certification (LSP Quantum), seperti telah dilaksanakan di: KPK, Kejagung, Kemenkes, Setneg, MA, MK, Bappenas, Kemenhub, Komisi Yudicial, BPKH (Keuangan Haji), KNKS (Keuangan Syariah), BKN, Kemen BUMN, SKK Migas, dll Kementerian/Lembaga juga di Perusahaan Swasta Nasional, Asesor Ahli Utama Reviewer Penelitian Nasional (RPN) bersama Kemenristek Dikti-BSN. Sudah 38 Batch, ± 3600 orang Dosen Senior PTN dan PTS terkemuka, Pimpinan Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) – Lembaga Jasa Konstruksi (Sertifikasi Personal), Ketua Bidang Pengembangan Standardisasi SDM Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Leader/Senior Assesor Bidang SDM dan Organisasi diberbagai Kementerian & Lembaga Republik Indonesia (± 40 Kementerian dan Badan Lembaga Republik Indonesia), Konsultan Senior Sumber Daya Manusia dan Restrukturisasi Organisasi, Pemilik Hak Cipta Statis dan Dinamis Pribadi Spider Plot Intelectual Property Right No.027762. Date March 10, 2004, Assessment Center untuk Kementerian / Lembaga di Indonesia (± 25 Kementerian & Lembaga), sesuai dengan ISO 17024, Jumlah Client ± 250 Perusahaan & Kementerian / Lembaga (Swasta & Pemerintah) di Indonesia, Penilaian untuk Seleksi Direktur sekitar 45 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Konsultan Kompetensi Desain untuk Organisasi (Kamus Kompetensi) dan Desain Standar Kompetensi Jabatan, Konsultan Key

Performance Indicator (KPI) untuk Organisasi & Kinerja Organisasi, Konsultan Manajemen Produktivitas, Konsultan Budaya Organisasi Perusahaan, Pemilik Hak Cipta Kecenderungan Perilaku Individu Melalui Analisis Psychometery Kualitatif dan Kuantitatif No. 000100019 Tanggal 18 Juli 2017.

Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA. lahir di Kudus Jawa Tengah. Ia merupakan dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang membidangi keilmuan S2 Akuntansi. Pria bergelar doktor ini menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dengan gelar Akademik: S.E, tanggal Ijazah: 1992. Kemudian melanjutkan strata dua (S2) di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar Akademik: M.Si, tertanggal Ijazah: 2001. Selain itu, ia juga mengambil profesi di Universitas Airlangga dengan gelar Akademik: Ak, tertanggal Ijazah: 2010. Setelah itu melanjutkan studi doktoral di Universitas Brawijaya, mendapatkan gelar Akademik: Dr. tertanggal Ijazah: 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

Manajemen Strategi dan Sistem Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

SATU ABAD NU
1344 - 1444 H

Dalam konteks dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) telah memainkan peran vital dalam menjaga keutuhan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Buku "Manajemen Strategi dan Sistem Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia" ini menyajikan analisis komprehensif mengenai strategi dan sistem yang diterapkan oleh NU dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

Melalui pendekatan multidisipliner, buku ini mengeksplorasi berbagai aspek penting dari NU, mulai dari sejarah pendiriannya pada tahun 1926 hingga perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi dan dinamika politik nasional. Penulis menguraikan bagaimana NU menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis untuk memastikan organisasi ini tetap relevan dan efektif dalam berbagai situasi.

Melalui analisis mendalam dan data empiris, buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana NU berhasil mempertahankan pengaruhnya dan berkontribusi secara signifikan terhadap persatuan dan kesatuan NKRI. Buku ini juga menyoroti bagaimana NU mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran, yang menjadi landasan bagi kebijakan dan strategi organisasinya.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan contoh konkret, buku ini menjadi bacaan yang penting bagi siapa saja yang ingin memahami peran organisasi keagamaan dalam membangun dan menjaga stabilitas sebuah negara.

Mari mengenal lebih dekat bagaimana Nahdlatul Ulama mengelola organisasinya dan terus berkontribusi dalam menjaga NKRI.

The UINSA Press
Anggota IKAPI
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya
Tlp. 031-8410298
sunanampelpress@yahoo.co.id

ISBN 978-602-302-100-8